

2025

Laporan Kinerja

BALAI BESAR
KEKARANTINAAN
KESEHATAN
MAKASSAR

Semester I

KATA PENGANTAR



Segala puji kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Makassar Semester I Tahun 2025 dapat tersusun.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 1 Semester merupakan pertanggungjawaban BBKK Makassar yang dituangkan dalam Laporan kinerja Semester I Tahun 2025 yang

memberikan gambaran tentang pencapaian program-program kegiatan serta evaluasi kinerja BBKK Makassar selama (enam) bulan di tahun 2025. Masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai di Semester I ini, karena kegiatan masih berproses, diharapkan di akhir tahun 2025 target indikator yang telah ditetapkan dapat terealisasi secara maksimal.

Untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya konstruktif guna peningkatan kinerja Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Makassar pada tahun berikutnya.

Makassar, 30 Juni 2025

Kepala Balai Besar Kekeantinaan
Kesehatan Makassar,



dr. Achmad Farchanny Tri Adryanto, MKM

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Kekearifan Kesehatan Makassar selaku Pihak Pertama dan Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI sebagai pihak kedua tanggal 27 Desember 2024. Dalam perjanjian kinerja tahun 2025 terdapat 9 (sembilan) indikator yang harus dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Adapun 9 (sembilan) indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN.
Target bernilai 1, realisasi bernilai 0,39, sehingga capaian kinerja menjadi 39%.
Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.714.661.000,- realisasi Rp. 16.280.000,- sebesar 0,95%.
2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan.
Target 100%, realisasi 100%, serta capaian sebesar 100%.
Pagu Anggaran sebesar Rp. 897.410.000,- realisasi Rp. 98.340.500,- sebesar 10,96%
3. Indeks pengendalian faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN
Target bernilai 0,96, realisasi 0,87, sehingga capaian menjadi 90, 63%
Pagu Anggaran Rp. 1.391.898.000,- realisasi Rp. 59.283.100,- sebesar 4,26%
4. Nilai kinerja anggaran
Target 85, realisasi 56,54, serta capaian sebesar 66,52%
Pagu Anggaran Rp. 350.493.000,- realisasi Rp. 39.039.650,- sebesar 11,14%
5. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran
Target 90, realisasi 95,72, dengan capaian sebesar 106,36%
Pagu Anggaran Rp. 28.147.798.000,- realisasi Rp. 9.688.918.185,- sebesar 34,42%
6. Kinerja implementasi WBK satker
Target nilai 81, realisasi 86,94, serta capaian sebesar 107,33%
Pagu Anggaran Rp. 32.302.000,- realisasi nihil
7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya
Target 90%, realisasi 72,99%, serta capaian sebesar 81,10%.

Pagu Anggaran Rp. 248.719.000,- realisasi Rp. 10.491.200,- sebesar 4,22%

8. Persentase realisasi anggaran

Target 96%, realisasi 30,23%, serta capaian 31,49%

Pagu Anggaran Rp. 32.790.931.000,- realisasi Rp. 9.912.352.635,- sebesar 30,23%

9. Indikator Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti

Target 95%, realisasi 100%

Capaian tertinggi terdapat pada indikator 6 yaitu Kinerja implementasi WBK satker dengan besaran capaian 107,33%. Untuk indicator 9 Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti di tahun 2025 BBKK Makassar dijadikan sampling pemeriksaan oleh BPK, namun tidak terdapat temuan dari hasil pemeriksaan. Sehingga untuk indicator 9 BBKK Makassar mencantumkan realisasi sebesar 100% dengan asumsi semua telah ditindaklanjuti. Hal ini BBKK Makassar lakukan karena Perjanjian Kinerja 2025 belum direvisi, sehingga indicator 9 masih menjadi indicator PK BBKK Makassar.

Pencapaian target indikator yang telah ditetapkan BBKK Makassar tahun 2025 bersumber dari pagu sebesar Rp. 32.790.931.000,- dengan realisasi anggaran sampai dengan Semester I sebesar Rp. 9.912.352.635,- atau sebesar 30,23%.

Dalam laporan kinerja ini Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Surabaya, Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Medan, dan Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Batam, dijadikan sebagai pembandingan capaian kinerja untuk ke 9 indikator kinerja, hal ini karena BBKK tersebut dengan BBKK Makassar memiliki karakteristik yang hampir sama, meliputi :

1. Klasifikasi kelas yang sama yaitu Balai Besar;
2. Lingkup kawasan yang memiliki Pelabuhan Laut atau Bandar Udara;
3. Melayani embarkasi/debarkasi haji.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Gambar	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Grafik.....	ix
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Visi dan Misi	3
D. Struktur Organisasi	6
E. Sumber Daya Manusia.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.....	15
A. Perencanaan Kinerja.....	15
1. Rencana Aksi Kegiatan	15
2. Rencana Kinerja Tahunan.....	17
B. Perjanjian Kinerja.....	17
BAB III Akuntabilitas Kinerja.....	20
A. Capaian Kinerja Organisasi	20
B. Realisasi Anggaran.....	112
BAB IV Penutup	118
A. Kesimpulan	118
B. Rencana Tindak Lanjut	120
Pustaka Acuan	121
Penyusun	122
Lampiran	124

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Struktur Organisasi BBKK Makassar Tahun 2025	6
Gambar III.1	Screenshoot Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada dashboard Aplikasi SMART Kemenkeu BBKK Makassar Bulan Mei Tahun Anggaran 2025	64
Gambar III.2	Screenshoot Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada dashboard Aplikasi SMART Kemenkeu BBKK Makassar Bulan Mei Tahun Anggaran 2025	65
Gambar III.3	Screenshoot Nilai Kinerja Anggaran pada dashboard Aplikasi SMART Kemenkeu BBKK Makassar Bulan Mei Tahun Anggaran 2025	65
Gambar III.4	Dashboard Aplikasi OM-SPAN Hasil Perhitungan Capaian Kinerja IKPA BBKK Makassar Bulan Mei Tahun Anggaran 2025	72
Gambar III.5	Screenshot Persentase Realisasi Anggaran BBKK Makassar Tahun Anggaran 2025	108

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jabatan Struktural BBKK Makassar Tahun 2025	9
Tabel I.2	Jabatan Fungsional Teknis BBKK Makassar Tahun 2025	9
Tabel I.3	Jabatan Fungsional Administrasi BBKK Makassar Tahun 2025	10
Tabel I.4	Jabatan Fungsional Umum Teknis BBKK Makassar Tahun 2025	10
Tabel I.5	Jabatan Fungsional Umum Administrasi BBKK Makassar Tahun 2024	10
Tabel I.6	Jabatan Pelaksana (CPNS) BBKK Makassar Tahun 2025.....	10
Tabel II.1	Matriks RAK BBKK Makassar Tahun 2020-2024	15
Tabel II.2	Indikator Kinerja RKT BBKK Makassar Tahun 2025	17
Tabel II.3	Perjanjian Kinerja BBKK Makassar Tahun 2025	18
Tabel II.4	Anggaran Kegiatan dalam Perjanjian Kinerja BBKK Makassar Tahun 2025	19
Tabel III.1	Pengukuran Kinerja BBKK Makassar dibandingkan Dengan Target Nasional Tahun 2025	20
Tabel III.2	Perbandingan Target dan Realisasi Parameter Persentase Orang, Alat Angkut, Barang, dan Lingkungan yang diperiksa Sesuai Standar BBKK Makassar Semester I Tahun 2025	22
Tabel III.3	Perhitungan Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan/ Bandara/PLBDN BBKK Makassar Semester I Tahun 2025	24
Tabel III.4	Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan dalam Pemeriksaan Orang BBKK Makassar Semester I Tahun 2025	32
Tabel III.5	Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan dalam Pemeriksaan Alat Angkut BBKK Makassar Semester I Tahun 2025	33
Tabel III.6	Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan dalam Pemeriksaan Barang BBKK Makassar Semester I Tahun 2025	33
Tabel III.7	Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan dalam Pemeriksaan Lingkungan BBKK Makassar	

	Semester I Tahun 2025	34
Tabel III.8	Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan BBKK Makassar Semester I Tahun 2024	34
Tabel III.9	Perbandingan Target dan Realisasi Parameter Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara BBKK Makassar Semester I Tahun 2025	43
Tabel III.10	Perhitungan Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara BBKK Makassar Semester I Tahun 2025	43
Tabel III.11	Capaian Indeks Pengendalian FR di Pintu Masuk Negara BBKK Makassar Semester I Tahun 2025 Parameter Sinyal SKD KLB dan Bencana yang Direspon Kurang dari 24 jam Dengan Kelengkapan 80%	45
Tabel III.12	Nilai Indeks Pinjal di Wilker BBKK Makassar Semester I	46
Tabel III.13	Hasil Suevey Tingkat Kepadatan Larva Anopheles di Wilayah BBKK Makassar Semester I Tahun 2025.....	47
Tabel III.14	Kepadatan Kecoa Di Wilayah Kerja BBKK Makassar Semester I Tahun 2025	48
Tabel III.15	Kepadatan Lalat di Wilayah Kerja BBKK Makassar Semester I Tahun 2025	49
Tabel III.16	Kepadatan Jentik Aedes Aegypti Area Perimeter di Wilayah Kerja BBKK Makassar Semester I Tahun 2025	50
Tabel III.17	Kepadatan Jentik Aedes Aegypti Area Buffer < 1 di Wilayah Kerja BBKK Makassar Semester I Tahun 2025	51
Tabel III.18	Pemeriksaan TTU di Wilayah Kerja BBKK Makassar Semester I Tahun 2025	52
Tabel III.19	Pemeriksaan TPP di Wilayah Kerja BBKK Makassar Semester I Tahun 2025	53
Tabel III.20	Hasil Pemeriksaan Kualitas Air Di Wilayah Kerja BBKK Makassar Semester I Tahun 2025	54
Tabel III.21	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	71
Tabel III.22	Revisi DIPA BBKK Makassar Tahun 2025	74
Tabel III.23	Parameter Deviasi Halaman III DIPA BBKK Makassar Semester I Tahun 2025	75

Tabel III.24	Parameter Penyerapan Anggaran BBKK Makassar Bulan Mei Tahun 2025.....	77
Tabel III.25	Parameter Belanja Kontraktual BBKK Makassar Bulan Mei Tahun 2025.....	80
Tabel III.26	Pengukuran Kinerja Indikator Implementasi WBK BBKK Makassar Semester I Tahun 2025	90
Tabel III.27	Jumlah ASN BBKK Makassar yang Ditingkatkan Kompetensinya sebanyak paling sedikit 20 JPL Semester I Tahun 2025	97
Tabel III.28	Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana BBKK Makassar Semester I Tahun 2025	112
Tabel III.29	Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja BBKK Makassar Semester I Tahun 2025	113
Tabel III.30	Realisasi Anggaran berdasarkan Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) Kegiatan BBKK Makassar Semester I Tahun 2025.....	113
Tabel III.31	Realisasi Anggaran berdasarkan Indikator Perjanjian Kinerja BBKK Makassar Semester I Tahun 2025	116

DAFTAR GRAFIK

Grafik	I.1	Distribusi ASN berdasarkan Jenis Jabatan BBKK Makassar Tahun 2025	11
Grafik	I.2	Distribusi ASN berdasarkan Golongan BBKK Makassar Tahun 2025	12
Grafik	I.3	Distribusi ASN menurut Jenjang Pendidikan BBKK Makassar Tahun 2025	12
Grafik	III.1	Perbandingan Target dan Realisasi Parameter Indikator ke-1 BBKK Makassar Semester I Tahun 2025	25
Grafik	III.2	Perbandingan Target dan Realisasi Parameter Indikator ke-1 BBKK Makassar Tahun 2022, 2023, 2024, dan Semester I Tahun 2025	25
Grafik	III.3	Perbandingan Realisasi Indikator Ke-1 Tahun Semester I 2025 BBKK Makassar dengan BBKK Medan, BBKK Surabaya, dan BBKK Batam	26
Grafik	III.4	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator ke-2 BBKK Makassar Semester I Tahun 2025	35
Grafik	III.5	Perbandingan Realisasi Indikator Ke-2 BBKK Makassar Tahun 2022, 2023, 2024, dan Semester I Tahun 2025	36
Grafik	III.6	Perbandingan Target Renstra Kemenkes dengan Realisasi Indikator ke-2 BBKK Makassar Semester I tahun 2025	37
Grafik	III.7	Perbandingan Realisasi Indikator Ke-2 BBKK Makassar, BBKK Medan, BBKK Surabaya, dan BBKK Batam Semester I Tahun 2025	37
Grafik	III.8	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator ke-3 BBKK Makassar Semester I Tahun 2025	55
Grafik	III.9	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator ke-3 BBKK Makassar Tahun 2022, 2023, dan 2024, dan Semester I Tahun 2025	55
Grafik	III.10	Perbandingan Capaian Indikator Ke-3 BBKK Makassar BBKK Medan, BBKK Surabaya, dan BBKK Batam Semester I Tahun 2025	56
Grafik	III.11	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator ke-4 BBKK	

	Makassar Semester I Tahun 2025	66
Grafik	III.12 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-4 BBKK Makassar Tahun 2022, 2023, 2024, dan Semester I Tahun 2025	66
Grafik	III.13 Perbandingan Target Renstra Kemenkes dengan Realisasi Indikator ke-4 BBKK Makassar Bulan Mei Tahun 2025	67
Grafik	III.14 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-4 BBKK Makassar BBKK Medan, BBKK Surabaya, dan BBKK Batam Semester I Tahun 2025	67
Grafik	III.15 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator ke-5 BBKK Makassar Semester I Tahun 2025	83
Grafik	III.16 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-5 BBKK Makassar Tahun 2022, 2023, 2024, dan Bulan Mei Tahun 2025	84
Grafik	III.17 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-5 BBKK Makassar BBKK Medan, BBKK Surabaya, dan BBKK Batam Bulan Mei Tahun 2025.....	85
Grafik	III.18 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator ke-6 BBKK Makassar Semester I Tahun 2025.....	91
Grafik	III.19 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-6 BBKK Makassar Tahun 2022, 2023, 2024, dan Semester I Tahun 2025	91
Grafik	III.20 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-6 BBKK Makassar BBKK Medan, BBKK Surabaya, dan BBKK Batam Semester I Tahun 2025	93
Grafik	III.21 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator ke-7 BBKK Makassar Semester I Tahun 2025	103
Grafik	III.22 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-7 BBKK Makassar Tahun 2022, 2023, 2024, dan Semester I Tahun 2025	104
Grafik	III.23 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-7 BBKK Makassar BBKK Medan, BBKK Surabaya, dan BBKK Batam Semester I Tahun 2025	104
Grafik	III.24 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator ke-8 BBKK Makassar Semester I Tahun 2025	109
Grafik	III.25 Perbandingan Realisasi Anggaran dan Pagu Anggaran BBKK Makassar Tahun 2022, 2023, 2024, dan Semester I Tahun 2025	109

Grafik	III.26 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-8 BBKK Makassar BBKK Medan, BBKK Surabaya, dan BBKK Batam Semester I Tahun 2025	110
--------	--	-----

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekejarantinaan Kesehatan, BBKK Makassar merupakan unit pelaksana teknis (UPT) bidang Kekejarantinaan Kesehatan yang melaksanakan upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara. UPT Bidang Kekejarantinaan Kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan. Namun sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan tanggal 31 Desember 2024, BBKK Makassar berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBKK Makassar dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKj) yang bertujuan untuk mengukur keberhasilan rencana kinerja Semester I tahun 2025 yang telah ditetapkan. Penyusunan LKj mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Petunjuk Teknis dari Perpres tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2025 terdapat 2 (dua) kegiatan untuk BBKK Makassar yaitu :

1. Dukungan pelayanan kekejarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah;
2. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut mengacu pada 9 indikator, yaitu :

1. Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN

2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan
3. Indeks pengendalian faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN
4. Nilai kinerja anggaran
5. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran
6. Kinerja implementasi WBK satker
7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya
8. Persentase realisasi anggaran
9. Indikator Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti

Capaian indikator tersebut akan dibahas dan dianalisa dalam bentuk laporan yaitu Laporan Kinerja (LKj) BBKK Makassar Semester I tahun 2025.

Beberapa isu strategis Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Makassar adalah sebagai berikut :

1. Adanya kebijakan efisiensi anggaran, namun target kinerja dan kualitas layanan public harus tetap ditingkatkan
2. Kewajiban vaksin polio dan covid bagi pelaku perjalanan yang memegang visa haji dan umroh.
3. Tidak semua wilayah kerja memiliki gedung kantor sendiri sehingga harus menyewa ruangan.
4. Tenaga di wilker masih terbatas sedangkan kegiatan yang dilaksanakan mewakili semua kelompok Tim Kerja yang ada di induk, sehingga terdapat pendampingan petugas dari induk BBKK Makassar serta pemanfaatan tenaga kader untuk kegiatan tertentu sesuai dengna kompetensinya.
5. Keseragaman pelaksanaan SOP Pengawasan Kekeantinaan Kesehatan Alat Angkut pesawat belum dilaksanakan sesuai ketentuan.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tanggal 20 Februari 2023, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Bidang Kekeantinaan Kesehatan, UPT Bidang Kekeantinaan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko

Kesehatan masyarakat di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara.

Dalam melaksanakan tugas di atas, UPT Bidang Kekeantinaan Kesehatan menyelenggarakan fungsi yaitu:

1. Penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran;
2. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
3. Pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
4. Pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
5. Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus;
6. Pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekeantinaan kesehatan;
7. Pengelolaan data dan informasi di bidang kekeantinaan kesehatan;
8. Pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekeantinaan kesehatan;
9. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekeantinaan kesehatan;
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekeantinaan kesehatan; dan
11. Pelaksanaan urusan administrasi UPT Bidang Kekeantinaan Kesehatan.

C. VISI DAN MISI

Cita-cita Indonesia dalam RPJPN 2025-2045, yaitu Indonesia Emas 2045 dijabarkan dalam RPJMN 2025-2029 menjadi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Untuk melaksanakan visi Presiden 2025-2029 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden, yaitu “Masyarakat Yang Sehat Dan Produktif Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045”. Visi Dirjen Penanggulangan Penyakit akan tercantum di Rencana Aksi Program Ditjen Penanggulangan Penyakit beserta misi yang diemban untuk menjalankan visi tersebut.

Dalam rangka mencapai terwujudnya visi Presiden yakni “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”, maka telah ditetapkan 8 (delapan) misi Presiden tahun 2025-2029, yakni :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Guna mendukung Masyarakat Yang Sehat Dan Produktif Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan misi Presiden terutama pada Asta Cita nomor 4, yaitu “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas, sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat sehat pada seluruh siklus hidup;
2. Membudayakan gaya hidup sehat;
3. Memenuhi layanan kesehatan yang berkualitas, baik, adil, dan terjangkau;

4. Mengimplementasikan sistem ketahanan kesehatan yang Tangguh dan responsive;
5. Memperkuat tata Kelola dan pendanaan kesehatan nasional yang berkecukupan, adil, dan berkelanjutan;
6. Mengembangkan teknologi kesehatan yang maju;
7. Mewujudkan birokrasi dan layanan public yang *agile*, efektif dan efisien.

Visi dan misi dari Ditjen P2 serta visi dan misi BBKK Makassar akan dirilis seiring dengan penetapan RAP Ditjen P2.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi dan tata kerja BBKK Makassar mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tanggal 20 Februari 2023. Struktur organisasi BBKK Makassar terdiri atas :

1. Kepala Balai
2. Sub Bagian Administrasi dan Umum
3. Wilayah Kerja
4. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Instalasi

Struktur organisasi BBKK Makassar tahun 2025 lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar I.1 berikut.



Gambar I.1
Struktur Organisasi Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Makassar Tahun 2025

Uraian tugas masing-masing adalah :

1. Sub Bagian Administrasi Umum
 - a. Melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan hubungan masyarakat, pengelolaan

data dan informasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan.

2. Instalasi

- a. Unit pelayanan non struktural yang bertanggung jawab kepada Kepala BBKK Makassar.
- b. Dipimpin oleh kepala instalasi, yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BBKK Makassar
- c. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kelompok jabatan fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi instalasi.

3. Wilayah Kerja BBKK Makassar

- a. Memberikan pelayanan fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BBKK Makassar.
- b. Dipimpin oleh kepala Wilker, yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BBKK Makassar.
- c. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kelompok jabatan fungsional.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BBKK Makassar sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- b. Dalam pelaksanaan tugas kelompok fungsional ditetapkan Ketua Tim Kerja.
- c. Ketua Tim Kerja mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- d. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas berbagai jenis dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- e. Jumlah jenis dan jenjang kelompok jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.

- f. Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah pegawai Balai Besar Kekearifan Kesehatan Makassar tahun 2025 sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) orang ASN berdasarkan DUK Juni 2025 yang terdiri dari 130 PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan 7 PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja) dan ditambah tenaga Non ASN berdasarkan data RKAKL 2025 yakni 2 orang PPNPN serta tenaga outsourcing satpam sebanyak 7 orang, sopir sebanyak 13 orang, dan cleaning service sebanyak 9 orang.

1. Menurut Jabatan:

a) ASN	= 137 orang
1) Jabatan Struktural	= 2 orang
2) Jabatan Fungsional Teknis (JFT)	= 94 orang
3) Jabatan Fungsional Administrasi (JFT)	= 13 orang
4) Jabatan Fungsional Umum Teknis (JFU)	= 15 orang
5) Jabatan Fungsional Umum Administrasi (JFU)	= 6 orang
6) Jabatan Pelaksana (JP) (CPNS)	= 7 orang
b) Non ASN	= 31 orang
1) Pengamanan Kantor (Satpam)	= 7 orang
2) Pengemudi (Sopir)	= 13 orang
3) Cleaning Service	= 9 orang
4) PPNPN	= 2 orang

Tabel I.1, I.2, I.3, I.4, dan I.5 menunjukkan pengelompokan ASN berdasarkan jabatan.

Tabel I.1 Jabatan Struktural BBKK Makassar Tahun 2025

No.	Pejabat Struktural	Jumlah (Orang)
1.	Kepala BBKK Makassar	1
2.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	1
Jumlah		2

Berdasarkan tabel I.1 dapat dilihat bahwa di BBKK Makassar terdapat 2 pejabat struktural yaitu Kepala BBKK Makassar dan Kasubag Adum.

Tabel I.2 Jabatan Fungsional Teknis BBKK Makassar Tahun 2025

No.	Fungsional Teknis	Jumlah (Orang)
1	Dokter Ahli Madya (JFT)	4
2	Dokter Gigi Ahli Madya (JFT)	1
3	Dokter Ahli Muda (JFT)	11
4	Dokter Ahli Pertama (JFT)	2
5	Perawat Ahli Muda (JFT)	4
6	Perawat Ahli Pertama (JFT)	5
7	Perawat Penyelia (JFT)	4
8	Perawat Mahir (JFT)	9
9	Perawat Terampil (JFT)	3
10	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama (JFT)	1
11	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama (JFT)	1
12	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia (JFT)	1
13	Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya (JFT)	7
14	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda (JFT)	6
15	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama (JFT)	5
16	Epidemiolog Kesehatan Mahir (JFT)	1
17	Epidemiolog Kesehatan Terampil (JFT)	2
18	Entomolog Kesehatan Ahli Madya (JFT)	2
19	Entomolog Kesehatan Ahli Muda (JFT)	3
20	Entomolog Kesehatan Ahli Pertama (JFT)	2
21	Entomolog Kesehatan Penyelia (JFT)	1
22	Entomolog Kesehatan Mahir (JFT)	3
23	Entomolog Kesehatan Terampil (JFT)	2
24	Sanitarian Ahli Madya (JFT)	1
25	Sanitarian Ahli Muda (JFT)	4
26	Sanitarian Ahli Pertama (JFT)	6
27	Sanitarian Mahir (JFT)	2
28	Sanitarian Terampil (JFT)	1
Jumlah		94

Tabel I.3 Jabatan Fungsional Administrasi BBKK Makassar Tahun 2025

No.	Fungsional Administrasi	Jumlah (Orang)
1	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya (JFT)	1
2	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda (JFT)	2
3	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama (JFT)	1
4	Pranata Keuangan APBN Penyelia (JFT)	1
5	Pranata Keuangan APBN Mahir (JFT)	2
6	Pranata Keuangan APBN Terampil (JFT)	2
7	Perencana Ahli Muda (JFT)	1
8	Perencana Ahli Pertama (JFT)	1
9	Arsiparis Ahli Muda (JFT)	1
10	Arsiparis Ahli Pertama (JFT)	1
Jumlah		13

Tabel I.4 Jabatan Fungsional Umum Teknis BBKK Makassar Tahun 2025

No.	Fungsional Umum Teknis	Jumlah (Orang)
1	Dokter (JFU)	2
2	Perawat Ahli (JFU)	2
3	Perawat / Pengelola Keperawatan (JFU)	5
4	Pranata Laboratorium Kesehatan (JFU)	1
5	Pembimbing Kesehatan Kerja / Analisis Kesehatan Kerja (JFU)	1
6	Epidemiolog Kesehatan / Pengelola Pengamatan Penyakit dan Imunisasi (JFU)	1
7	Entomolog Kesehatan / Pengelola Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang (JFU)	2
8	Sanitarian Ahli / Pemeriksa Sanitasi (JFU)	1
Jumlah		15

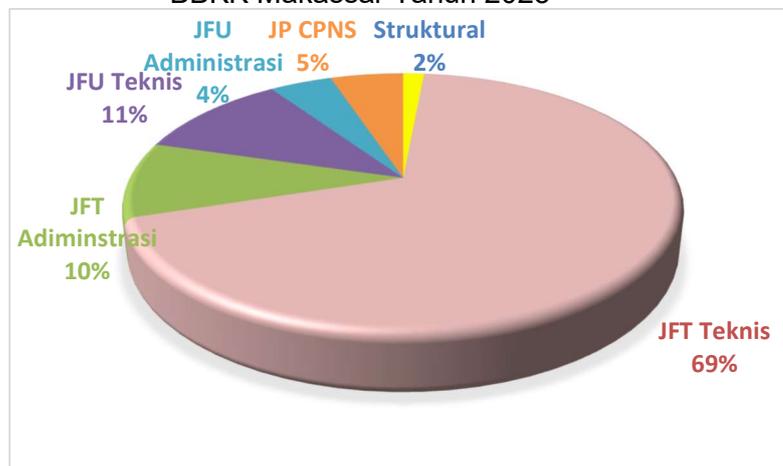
Tabel I.5 Jabatan Fungsional Umum Administrasi BBKK Makassar Tahun 2025

No.	Fungsional Umum Administrasi	Jumlah (Orang)
1	Perencana / Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan (JFU)	1
2	Analisis Kebijakan Barang Milik Negara / Analisis Barang Milik Negara (JFU)	1
3	Arsiparis Ahli / Penyuluh Kearsipan (JFU)	1
4	Pengelola Barang Milik Negara (JFU)	3
Jumlah		6

Tabel I.6 Jabatan Pelaksana (CPNS) BBKK Makassar Tahun 2025

No.	Pelaksana (CPNS)	Jumlah (Orang)
1	Epidemiolog Kesehatan Terampil (JP)	3
2	Sanitarian Terampil (JP)	3
3	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil (JP)	1
Jumlah		7

Grafik I.1 Distribusi ASN berdasarkan Jenis Jabatan
BBKK Makassar Tahun 2025



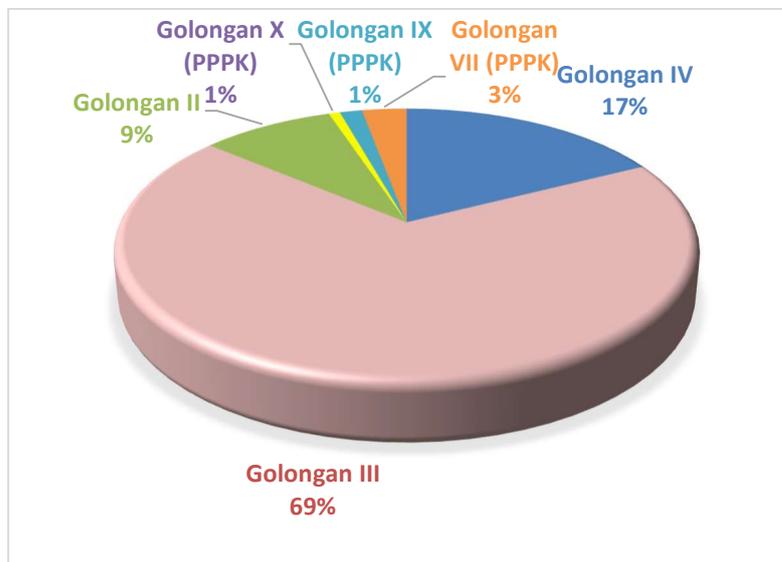
Grafik I.1 menunjukkan 69% pegawai BBKK Makassar adalah JFT Teknis, 11% JFU teknis, 10% JFU Teknis, 5% JP CPNS, 4% JFU administrasi, dan 2 % pejabat struktural.

JFU teknis dan administrasi akan berproses menjadi JFT sesuai dengan aturan yang berlaku. Sedangkan untuk JP yang masih berstatus calon PNS, akan berubah statusnya menjadi JFT teknis setelah menjadi PNS.

2. Menurut Golongan :

a) Golongan IV	=	24 orang
b) Golongan III	=	94 orang
c) Golongan II	=	12 orang
d) Golongan X (PPPK)	=	1 orang
e) Golongan IX (PPPK)	=	2 orang
f) Golongan VII (PPPK)	=	4 orang

Grafik I.2 Distribusi ASN berdasarkan Golongan BBKK Makassar Tahun 2025

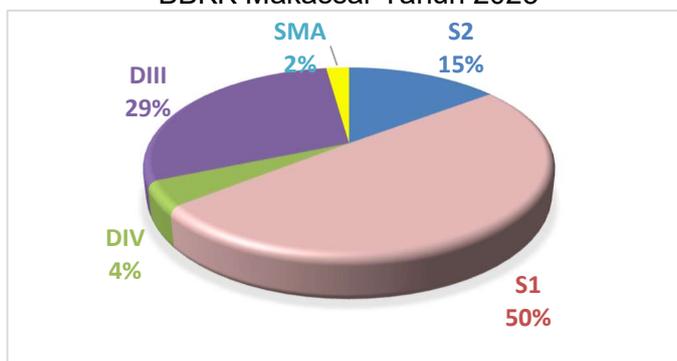


Berdasarkan grafik I.2 ASN BBKK Makassar terbesar berada pada Golongan III sebanyak 69% dan yang terkecil pada Golongan IX dan Golongan X sebesar 1%. Golongan VII, IX dan X merupakan golongan untuk ASN PPPK.

3. Menurut Pendidikan:

- a) S2 = 20 orang
- b) S1 = 68 orang
- c) DIV = 6 orang
- d) DIII = 40 orang
- e) SMA = 3 orang

Grafik I.3 Distribusi ASN menurut Jenjang Pendidikan BBKK Makassar Tahun 2025



Berdasarkan Grafik I.3 distribusi ASN BBKK Makassar terbanyak pada jenjang pendidikan Strata 1 (S1) sebanyak 50% dan yang terkecil sebanyak 2% pada jenjang pendidikan SMA. Jenjang S1 dan DIII menempati urutan 1 dan 2 karena adanya kesempatan tugas belajar yang dibiayai oleh Kemenkes dengan mengikuti rangkaian aturan baik secara administrasi maupun akademik sesuai dengan MOU yang ditetapkan antara Kemenkes dengan Perguruan Tinggi, sehingga ASN BBKK Makassar dapat mengupgrade jenjang pendidikan sesuai dengan kompetensinya dari DIII ke Strata 1, untuk DIII Juni 2025 bertambah sebanyak 7 (tujuh) orang CPNS.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika laporan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Membandingkan realisasi kinerja dengan 3 (tiga) Balai Besar Kekearifan Budaya;
6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
8. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan mewujudkan kinerja organisasi untuk meningkatkan kinerjanya berdasarkan indikator dan rincian output.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja yang telah ditetapkan terdiri atas dua bagian yaitu Rencana Kerja Lima Tahun yang dituangkan dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2025 – 2029 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2025.

1. Rencana Aksi Kegiatan (RAK)

RAK Balai Besar Kekearifan Kesehatan Makassar merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Aksi Program Penanggulangan Penyakit serta Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029. BBKK Makassar merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Ditjen P2 Kemenkes RI. Olehnya itu, kegiatan yang dilaksanakan di BKK harus mendukung program yang direncanakan pada Ditjen P2.

Namun sampai saat ini RAP Ditjen P2 belum ditetapkan sehingga belum dapat dijabarkan dalam bentuk RAK BBKK Makassar. Sehingga matriks RAK 2020-2024 tetap dilampirkan dalam tabel II.1

Tabel II.1 Matriks RAK BBKK Makassar
Tahun 2020-2024

No	Sasaran	Indikator	Target							
			2020	2021	2022	2023	2023 Des	2024	2024 Nov	
1	Meningkatnya Pelayanan Kekearifan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekearifan kesehatan	3,722,715	2,652,728						
		1. Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN			1	1	1	1	1	
		2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Sasaran	Indikator	Target						2024	2024 Nov
			2020	2021	2022	2023	2023 Des	2024		
		3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	85%	90%	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	
2	Meningkatnya Dukuingan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4. Nilai kinerja anggaran	80	83	85	85	85	85	85	
		5. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	80%							
		5. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran		93	93	93	93	90	90	
		6. Kinerja implementasi WBK satker	70	80	81	81	81	81	81	
		7. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45%	70%						
		7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya			80%	80%	80%	85%	85%	
		8. Persentase Realisasi Anggaran				95%	95%	96%	96%	
		9. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah Tuntas Ditindaklanjuti				92,5%		95%		

Dari tabel II.1 dapat dilihat bahwa untuk tahun 2020-2024 RAK BBKK Makassar terlihat pada indikator 8 dan 9 berbeda dengan tahun 2022. Dimana di tahun 2022 indikator berjumlah 7, namun sesuai dengan Surat Sekretaris Ditjen P2P Nomor PR.03.02/C.I/1142/2023 tanggal 2 Februari 2023 terdapat penambahan 2 indikator dalam Perjanjian Kinerja yaitu indikator Persentase Realisasi Anggaran dan Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti. Untuk tahun 2024 PK awal BBKK Makassar berjumlah 9 (sembilan) indikator, namun tanggal 16 November 2024 dilakukan revisi PK menjadi 8 (delapan) indikator. Karena untuk indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah Tuntas Ditindaklanjuti sampai bulan

November 2024 BBKK Makassar tidak menjadi sampel pemeriksaan oleh BPK.

2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025

RKT merupakan penjabaran atau turunan dari RAK tahun 2025-2029. Rencana Kinerja Tahunan kemudian menjadi acuan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Dalam rencana kinerja Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Makassar tahun 2025, telah disusun indikator untuk mencapai sasaran strategis organisasi.

Tabel II.2 Indikator Kinerja RKT
Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Makassar Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Kekeantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1. Indeks deteksi faktor risiko di pintu masuk negara	1
		2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	100%
		3. Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara	0,96
2	Meningkatnya Dukuingan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4. Nilai kinerja anggaran	85
		5. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran	90
		6. Kinerja implementasi WBK satker	81
		7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	90%
		8. Persentase Realisasi Anggaran	96%
		9. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah Tuntas Ditindaklanjuti	

Sumber Data : RKT KKP Kelas I Makassar 2025

B. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima tanggung jawab dengan pihak yang memberi tanggung jawab. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerja dibuat dalam rangka mewujudkan

manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Pernyataan ini ditandatangani oleh penerima amanah yaitu Kepala Balai Besar Kekeparantinaan Kesehatan Makassar sebagai tanda kesanggupan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, dan pemberi amanah yaitu Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit selaku atasan langsung untuk persetujuan atas target kinerja yang ditetapkan tersebut. Dalam hal atasan langsung tidak sependapat dengan target kinerja yang diajukan tersebut, maka pernyataan ini harus diperbaiki hingga kedua belah pihak sepakat atas materi dan target kinerja yang telah ditetapkan.

Sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja awal Tahun 2025 yang ditandatangani pada Desember 2024 dapat dilihat pada tabel II.3.

Tabel II.3 Perjanjian Kinerja BBKK Makassar Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya pelayanan kekarantina di pintu masuk negara dan wilayah	1. Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	1
		2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	100%
		3. Indeks pengendalian faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	0,96
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4. Nilai kinerja anggaran	85
		5. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran	90
		6. Kinerja implementasi WBK Satker	81
		7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	90%
		8. Persentase Realisasi Anggaran	96%
		9. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti	95%

Tabel II.4 Anggaran Kegiatan dalam Perjanjian Kinerja
BBKK Makassar Tahun 2025

No	Kegiatan	Anggaran
1	Dukungan pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah	Rp. 6.377.567.000,-
2	Dukungan manajemen pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rp. 26.413.364.000,-
Total		Rp. 32.790.931.000,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Balai Besar Kekearifan Kesehatan Makassar untuk tahun 2025 melakukan pengukuran terhadap indikator yang telah ditetapkan dan dibandingkan dengan target serta membandingkannya dengan hasil tahun sebelumnya. Pengukuran kinerja indikator dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi sehingga diperoleh data capaian.

Hasil pengukuran kinerja akan menghasilkan data berupa informasi masing-masing indikator, yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam perencanaan program/kegiatan di masa akan datang agar setiap program/kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Di samping itu pengukuran kinerja juga memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan tupoksi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen RAK dan Perjanjian Kinerja.

Sasaran yang akan dicapai dalam indikator kinerja yakni meningkatnya pelayanan kekearifan di pintu masuk negara dan wilayah dan Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Penanggulangan Penyakit.

Adapun indikator yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja BBKK Makassar tahun 2025 tertera dalam tabel III.1 di bawah ini :

Tabel III.1 Pengukuran Kinerja BBKK Makassar
Dibandingkan dengan target Nasional 2025

No.	Indikator Kinerja	Indikator Renstra Kemenkes	Realisasi	Capaian
1	Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN		0,39	39%
2	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk negara yang dikendalikan dengan target tahun 2025 sebesar 94%	100%	100%

No.	Indikator Kinerja	Indikator Renstra Kemenkes	Realisasi	Capaian
3	Indeks pengendalian faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN		0,88	91,67%
4	Nilai kinerja anggaran	Nilai kinerja anggaran Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit dengan target tahun 2025 sebesar 92,3	56,54	66,52%
5	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran		95,72	106,36%
6	Kinerja implementasi WBK satker		86,94	107,33%
7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya		75,14%	83,49%
8	Persentase Realisasi Anggaran		30,23%	31,49%
9	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti		100%	105,26%

Berdasarkan tabel III.1 di atas terdapat 2 (dua) indikator yang dapat dibandingkan dengan target nasional yaitu Renstra Kemenkes. Indikator 2 Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk negara yang dikendalikan dengan target 94% pada Renstra tahun 2025, realisasi sebesar 100% lebih besar di banding dengan dengan target pada Renstra. Untuk indikator Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Penanggulangan Penyakit target 92,3 pada Renstra, realisasinya masih jauh dari target, karena realisasi hanya 56,54 untuk Semester I dan masih berproses untuk Semester selanjutnya.

Capaian indikator tahun 2025 akan diuraikan dalam pembahasan sebagai berikut :

1. INDIKATOR PERTAMA

Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN

a. Pengertian

Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN menggambarkan kinerja deteksi dini faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN yang dilakukan dalam periode satu tahun di wilayah kerja Balai Besar Kekeparantaraan Kesehatan Makassar.

b. Definisi Operasional

Status kinerja deteksi dini factor risiko di Pelabuhan/bandara/PLBDN berdasarkan hasil pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang dilakukan dalam satu tahun.

c. Rumus (cara perhitungan)

Indeks dihitung dari 4 parameter yakni persentase orang yang diperiksa sesuai standar, persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar, persentase barang yang diperiksa sesuai standar dan persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar

$$\frac{\text{Indeks Persentase orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Target Indeks Persentase orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang diperiksa sesuai standar}} \times 100\%$$

d. Capaian Kinerja

$$\frac{0.39}{1} \times 100\% = 39\%$$

Pada tabel III.2 digambarkan capaian indikator terhadap target parameter yang ditetapkan

Tabel III.2 Perbandingan Target dan Realisasi Parameter Persentase orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang diperiksa sesuai standar BBKK Makassar Semester I Tahun 2025

No	Parameter	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase orang yang diperiksa sesuai standar	9.676.936	4.467.360	46,17
	1. Jumlah penumpang pesawat datang		1.810.447	
	2. Jumlah penumpang pesawat berangkat		1.224.792	
	3. Kunjungan Poliklinik Bandara (Keur, Vaksinasi)			

No	Parameter	Target	Realisasi	Capaian (%)
	- Surat Keterangan Pengujian Kesehatan - Pelayanan vaksinasi MM, YF, Typhoid - Kunjungan Petugas dan Selain Penumpang ke Klinik Bandara		20 1.210 3.532	
	4. Laporan Kesehatan Penjamah Makanan untuk Pekerja di Bandara		0	
	5. Pemeriksaan Personil Pesawat (Termasuk ICV Personil Kedatangan)		72.863	
	6. Jumlah Penumpang Kapal Datang		605.248	
	7. Jumlah Penumpang Kapal Berangkat		613.763	
	8. Kunjungan Poliklinik Pelabuhan (Keur, Vaksinasi) - Surat Keterangan Pengujian Kesehatan - Pelayanan vaksinasi MM, YF, Typhoid - Kunjungan Petugas dan Selain Penumpang ke Klinik Pelabuhan		1.013 2.610 7.192	
	9. Laporan Kesehatan Penjamah Makanan untuk Pekerja di Pelabuhan		0	
	10. Pemeriksaan Awak Kapal (Termasuk ICV Awak Kapal Kedatangan)		123.872	
	11. Jumlah Skrining HIV		288	
	12. Jumlah Skrining TB		265	
	13. Jumlah Skrining Sifilis		245	
2	Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar	17.000	7.642	44,95
	1. Jumlah General Declaration (Gendec) Terverifikasi (Ttd/Stempel) di Bandara		400	
	2. Jumlah COP		90	
	3. Jumlah PHQC		7.152	
3	Persentase barang yang diperiksa sesuai standar	710	345	48,59
	1. Surat Ijin Angkut Jenazah di Bandara		301	
	2. Surat Ijin Angkut Jenazah di Pelabuhan		44	
4	Persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar	68.500	33.018	48,20
	1. Form inspeksi hygiene & sanitasi TTU Bandara		10	
	2. Form inspeksi hygiene & sanitasi TPP Bandara		72	
	3. Form inspeksi sarana PAB (Lokus) Bandara		10	
	4. Rekapitulasi hasil survey vektor Bandara		5.464	
	5. Form inspeksi hygiene & sanitasi TTU Pelabuhan		106	
	6. Form inspeksi hygiene & sanitasi TPP Pelabuhan		247	
	7. Form inspeksi sarana PAB Pelabuhan		81	
	8. Rekapitulasi hasil survey vektor Pelabuhan		27.028	

Dari table III.2 terlihat capaian untuk masing-masing parameter belum mencapai nilai 120%. Sehingga untuk perhitungan indeksnya dapat dijabarkan di dalam Tabel III.3.

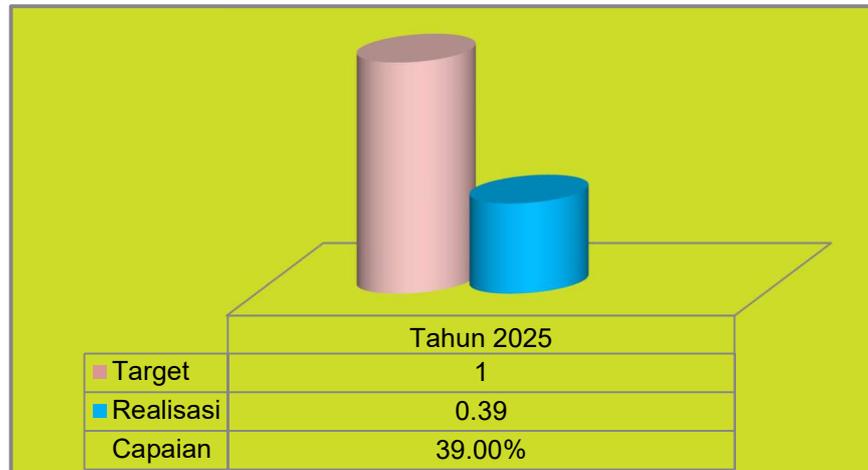
Tabel III.3 Perhitungan Indeks deteksi faktor risiko
Di Pelabuhan/Bandara/PLBDN BBKK Makassar Semester I Tahun 2025

No	Parameter	Bobot	Baseline	Coverage	Score	Maksimal	Cov Max	Score Max	Minimal	Scoe Min
1	2	3	4	$5=(4/7)^*$ 100	$6=3*5$	7	8	$9=3*8$	10	$11=3*10$
1	Persentase orang yang diperiksa sesuai standar	5	46.17	46.17	231	100	120	600	0	0
2	Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar	5	44.95	44.95	225	100	120	600	0	0
3	Persentase barang yang diperiksa sesuai standar	3	48.59	48.59	146	100	120	360	0	0
4	Persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar	5	48.20	48.20	241	100	120	600	0	0
Total					842			2.160		0
$Indeks = \frac{S}{S_{max} - S_{min}}$ $Indeks = \frac{842}{2.160 - 0}$ <p>Indeks = 0,39</p>										

Berdasarkan tabel III.3 diperoleh score sebesar 842. Untuk perhitungan indeks dengan formulasi nilai score dibagi dengan score maksimal, sehingga diperoleh nilai indeks sebesar 0,39.

Grafik III. 1 menjelaskan perbandingan antara target tahun 2025 dengan realisasi Semester I Tahun 2025 untuk indicator 1.

Grafik III.1 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Ke-1
BBKK Makassar Semester I tahun 2025



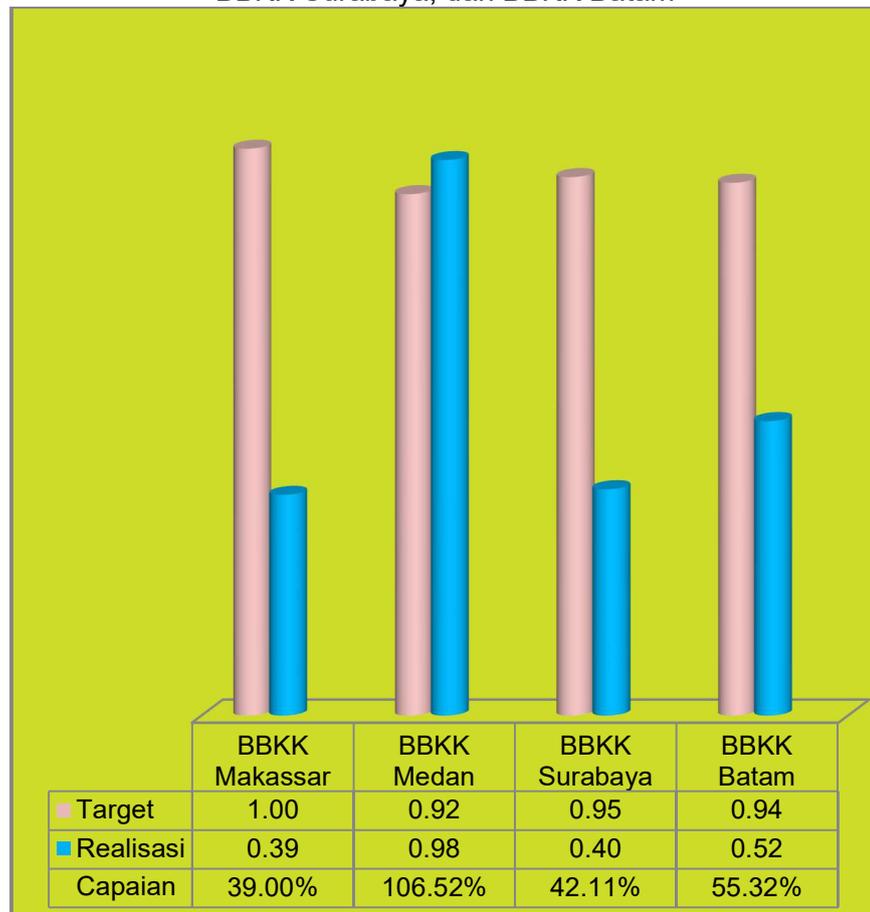
Grafik III.1 menggambarkan antara target dan realisasi indikator 1, dapat dilihat realisasi masih 0,39. Penetapan target untuk tahun 2025 ditetapkan dengan nilai indeks 1 karena realisasi di tahun 2024 maksimal sebesar 1. Di Semester I tahun 2025 jumlah penumpang domestic dan internasional cukup meningkat, peningkatan ini signifikan berasal dari jumlah jemaah haji dan umroh. Untuk Semester I, realisasi baru mencapai 0,39, karena untuk debarkasi haji masih sementara berproses dan pelaksanaan umroh diprediksikan akan melonjak jumlahnya setelah pelaksanaan haji di Juli 2025.

Grafik III.2 Perbandingan Target dan Realisasi Parameter Indikator Ke-1
BBKK Makassar tahun 2022, 2023, 2024
dan Semester 1 Tahun 2025



Dari grafik III.2 dapat dilihat realisasi target untuk indikator ke-1 pada tahun 2022 sd 2024 mencapai target yang telah ditetapkan. Melihata realsiasi dari tahun 2022 sd 2024, sehingga untuk tahun 2025 ditetapkan target sama dengan tahun 2024, namun untuk Semester I tahun 2025, realisasi masih di angka 0,39, sehingga capaian hanya di nilai 39%. Namun kegiatan di indikator ini masih berjalan on track, seiring dengan meningkatnya jumlah pengawasan terhadap orang, alat angkut, barang, dan lingkungan.

Grafik III.3 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-1 Semester I Tahun 2025 BBKK Makassar dengan BBKK Medan BBKK Surabaya, dan BBKK Batam



Grafik III.3 tergambar bahwa hanya BBKK Medan yang mencapai target yang telah ditetapkan, namun dari capaian BBKK Makassar dengan nilai paling kecil, karena penentuan target yang lebih besar dari BBKK Medan, Surabaya, dan Batam.

e. Analisis Keberhasilan Kegiatan

Terdapat beberapa hal yang memberikan kontribusi terhadap tercapainya target indeks deteksi faktor risiko di pintu masuk negara yakni :

- 1) Persentase orang yang diperiksa sesuai standar mencapai target yang ditetapkan, dipengaruhi beberapa faktor keberhasilan yaitu :
 - a) Penambahan frekuensi penerbangan internasional yang signifikan sehingga pengawasan penumpang internasional juga bertambah.
 - b) Dukungan lintas sector dalam pelaksanaan deteksi dini terhadap komunitas Pelabuhan dan bandara
 - c) Pemeriksaan kesehatan pelaut untuk perpanjangan buku pelaut, perpanjangan lisensi dan melamar pekerjaan
- 2) Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar mencapai target yang ditetapkan karena :
 - a) Penambahan frekuensi penerbangan internasional, signifikan jumlah frekuensi penerbangan dalam pelaksanaan umrah.
 - b) Pengawasan alat angkut pelaksanaan haji yang lebih meningkat dari tahun sebelumnya.
- 3) Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar belum mencapai target tahunan yang ditetapkan yakni baru mencapai 44,95 %, target yang diberikan merupakan target tahunan sedangkan realisasi kegiatan saat ini baru semester 1. jika dibandingkan pada periode waktu yang sama yakni bulan Januari s/d Mei tahun 2024. Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar mengalami tren peningkatan hal ini disebabkan karena pada awal tahun 2025 terdapat peningkatan

frekwensi penerbangan internasional dimana penerbangan dari Malaysia yang tadinya 5 kali penerbangan selama 1 minggu bertambah menjadi 7 kali seminggu

- 4) Persentase barang yang diperiksa sesuai standar mencapai target karena kemudahan akses untuk pengiriman jenazah melalui transportasi udara dan laut. Capaian lebih kecil 48,59 % dibandingkan dengan target tahunan, namun jika dibandingkan pada periode waktu yang sama (Januari s/d Mei) pada tahun sebelumnya mengalami tren peningkatan dari 332 tahun 2024 menjadi 345 pada tahun 2025. Hal ini disebabkan kemudahan akses untuk pengiriman jenazah melalui transportasi udara dan laut.
- 5) Persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar tercapai karena adanya dukungan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan serta peran lintas sektor yang mendukung tuisi dari BBKK Makassar.

f. Masalah yang dihadapi

- 1) Eksternal
 - a) Belum semuanya pelaku perjalanan memahami prosedur pelaksanaan kekarantinaan kesehatan pada pelaku perjalanan yang masuk kategori suspek atau kontak erat penyakit menular.
 - b) Kurangnya keseragaman pelaksanaan SOP dalam pengawasan kekarantinaan kesehatan.
 - c) Kurang maksimalnya jaringan internet di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, sehingga untuk pengawasan SSHP membutuhkan waktu yang lama untuk masing-masing pelaku perjalanan.
- 2) Internal
 - a) Ketersediaan tenaga yang masih kurang di beberapa wilker sehingga menyebabkan adanya beban kerja yang berlebihan

- b) Kurangnya tenaga dokter dan perawat, sehingga belum semua wilker membuka layanan vaksinasi
- c) Belum semua Wilker tersedia kendaraan boarding
- d) Masih terdapat beberapa ruang pemeriksaan di terminal pelabuhan masih kurang representatif
- e) Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang laboratorium
- f) Cakupan layanan BBKK Makassar yang terlalu luas mencakup 2 (dua) provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, sehingga koordinasi dengan Wilker yang jaraknya jauh kurang maksimal.

g. Usul Pemecahan Masalah

1) Eksternal

- a) Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait proses kekarantinaan kesehatan
- b) Perlunya regulasi terhadap konsistensi keseragaman pelaksanaan SOP pengawasan kekarantinaan kesehatan untuk semua BKK
- c) Penggunaan modem internal pada saat pelayanan SSHP terhadap pelaku perjalanan dari luar negeri.

2) Internal

- a) Penambahan SDM melalui seleksi CPNS/PPPK/Mutasi Internal
- b) Mengusulkan pengadaan kendaraan operasional untuk *boarding*
- c) Koordinasi dengan lintas sektor terkait di pelabuhan dan bandara
- d) Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium

h. Analisis Efisiensi Sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja dikurang realisasi anggaran

kinerja dibagi dengan perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan :

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran kinerja i

CKi : Capaian kinerja

RAKi : Realisasi anggaran kinerja

NE : Nilai efisiensi

$$E = \frac{(1.714.661.000 \times 0.39) - 16.280.000}{1.714.661.000 \times 0.39} \times 100\%$$

$$E = 97,57\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{97,57\%}{20} \times 50\right)$$

$$NE = 293,91\%$$

Untuk indikator 1 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.714.661.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.280.000,- serta capaian indikator sebesar 39%, sehingga diperoleh efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 97,57%. Sehingga nilai efisiensi diperoleh sebesar 293,91%.

Dari perhitungan di atas dapat dilihat bahwa untuk indikator 1 penggunaan sumber daya efisien dengan nilai efisiensi di atas 50% yaitu 293,91%.

Selain dari penggunaan anggaran, efisiensi penggunaan sumber daya juga dipengaruhi beberapa hal, yaitu :

- 1) Penggunaan alat skrining (*thermal scanner*) dengan sistem sensor lebih efektif dan tidak perlu membutuhkan operator yang banyak sehingga protokol kesehatan bisa diterapkan secara maksimal dengan menjaga jarak aman.

- 2) Penerapan interkoneksi aplikasi Sinkarkes dan Simponi dalam penerbitan dokumen kesehatan.
- 3) Aplikasi Langsung Digital dapat mempersingkat waktu dalam penerbitan dan menyederhanakan alur pelayanan dalam menerbitkan SKLT dan SKTLT.
- 4) Aplikasi Sehat Care yang memudahkan bagi pelanggan ataupun petugas untuk mendapatkan Formulir Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan secara Sistematis, Jelas, Hemat, dan terdata dengan baik.

2. INDIKATOR KEDUA

Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan

Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan pada tahun 2025 adalah sebesar 100%.

a. Pengertian

Persentase faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan hasil dari pemeriksaan/penapisan orang, alat angkut sesuai standar kekarantinaan, barang dan lingkungan yang dilakukan dalam periode satu tahun di wilayah kerja Balai Besar Kekeparantinaan Kesehatan Makassar.

b. Definisi Operasional

Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dalam satu tahun.

c. Rumus (cara perhitungan)

Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dibagi dengan jumlah faktor risiko yang ditemukan

pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dikali 100%

$$\frac{\text{Persentase FR penyakit yang dikendalikan}}{\text{Persentase target FR penyakit yang dikendalikan}} \times 100\%$$

d. Capaian Kinerja

$$\frac{72}{72} \times 100\% = 100\%$$

Pada Semester I tahun 2025 terdapat 50 faktor risiko yang dikendalikan dalam pemeriksaan orang, 18 faktor risiko yang dikendalikan dalam pemeriksaan alat angkut, tidak terdapat faktor risiko yang dikendalikan dalam pemeriksaan barang, serta 4 faktor risiko yang dikendalikan dalam pemeriksaan lingkungan. Rincian faktor risiko yang dikendalikan terdapat dalam tabel III.4 sebagai berikut :

Tabel III.4 Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan dalam Pemeriksaan Orang
BBKK Makassar Semester I Tahun 2025

Jenis Pemeriksaan Orang	Faktor Risiko ditemukan	Faktor Risiko dikendalikan		
		Notifikasi	Tolak Berangkat	SKTLT
1. Suhu $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ atau kontak erat => Notifikasi	331	331	0	0
2. Covid-19 Positif (Data PCR & Antigen Induk di NAR) => Notifikasi	Influenza : 12 Covid : 1	13	0	0
3. Sakit (Termasuk Saturasi < 95, HB < 8,5) => SKTLT atau Pertolongan Gawat Darurat	100	0	84	16
4. Hamil > 32 Minggu => SKTLT	1	0	0	1
5. Hamil < 14 Minggu dan > 26 Minggu (Jamaah Haji) => Berita Acara Tidak Laik Terbang	2	0	0	2
6. Penyakit Menular yang Menimbulkan Wabah => SKTLT	5	0	0	5
7. Belum Vaksin Meningitis => Berita Acara Tolak Berangkat bahwa Ybs Harus Divaksinasi	0	0	0	0

Jenis Pemeriksaan Orang	Faktor Risiko ditemukan	Faktor Risiko dikendalikan		
		Notifikasi	Tolak Berangkat	SKTLT
8. Buku ICV Palsu/Expired => Berita Acara Tolak Berangkat	0	0	0	0
9. HIV Positif, TB Positif, Malaria Positif => Notifikasi+C2	HIV : 0 IMS : 1 TB : 0 Malaria : 0	1	0	0
Jumlah	453	345	84	24

Sumber : Data Sinkarkes Tahun 2024

Berdasarkan tabel III.4 terdapat 9 jenis pemeriksaan pada orang, dengan 453 FR yang ditemukan. Dimana 331 orang dengan Suhu $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ atau kontak erat sehingga diterbitkan notifikasi, 13 orang notifikasi positif covid dan influenza, 100 orang sakit, 1 orang hamil > 32 minggu sehingga diterbitkan SKTLT, 2 orang hamil < 14 Minggu dan > 26 Minggu sehingga ditunda keberangkatan hajinya, 5 orang penyakit menular sehingga diterbitkan SKTLT, dan 1 orang TB Positif.

Tabel III.5 Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan dalam Pemeriksaan Alat Angkut
BBKK Makassar Semester I Tahun 2025

Jenis Pemeriksaan Alat Angkut	Faktor Risiko ditemukan	SSCC	Surat bebas karantina	One month extention
1. Sanitasi dan vektor	18	18	0	0
Jumlah	18	18	0	0

Berdasarkan tabel III.5 ditemukan 18 FR dalam pemeriksaan alat angkut, dengan pengendalian berupa dilakukan penyehatan alat angkut (fumigasi /disinseksi) kemudian diterbitkan Ship Sanitation Certificate Control (SSCC).

Tabel III.6 Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan dalam Pemeriksaan Barang
BBKK Makassar Semester I Tahun 2025

Jenis Pemeriksaan Barang	Faktor Risiko ditemukan	Tolak berangkat	Tunda Berangkat	Desinfeksi
1. Jenazah penyakit menular	0	0	0	0

Jumlah	0	0	0	0
---------------	----------	----------	----------	----------

Berdasarkan tabel III.6 tidak ditemukan FR dalam pemeriksaan barang. Bila ditemukan adanya FR maka petugas BBKK Makassar melaksanakan desinfeksi sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan

Tabel III.7 Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan dalam Pemeriksaan Lingkungan BBKK Makassar Semester I Tahun 2025

Jenis Pemeriksaan Lingkungan	Faktor Risiko ditemukan	Fogging	Pemberantasan Sarang Nyamuk	Abatisasi	Pemberian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
1. TPP (e coli, MPN coliform, alat usap makan dan masak), yang tidak memenuhi syarat/indeks tinggi	0	0	0	0	0
2. Air (e coli, MPN coliform, risiko pencemaran tinggi dan amat tinggi), yang tidak memenuhi syarat, indeks tinggi	4	0	0	0	4
3. Vektor di lingkungan buffer dan perimeter bandara/ pelabuhan	0	0	0	0	0
Jumlah	4	0	0	0	4

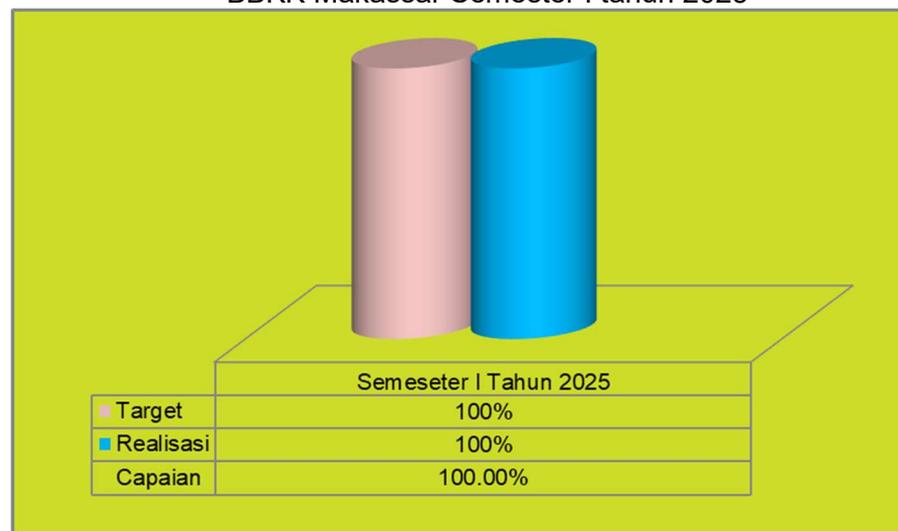
Dari table III.7 terdapat 4 FR pada pemeriksaan bakteriologis kualitas air yang dikendalikan dengan pemberian rekomendasi terhadap lokus yang bersangkutan.

Tabel III.8 Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan BBKK Makassar Semester I Tahun 2025

Pemeriksaan	Jumlah FR yang ditemukan	Jumlah FR dikendalikan	Persentase FR yang dikendalikan $(3/2)*100$
1	2	3	4
Pemeriksaan orang	453	453	100
Pemeriksaan alat angkut	18	18	100
Pemeriksaan barang	0	0	0
Pemeriksaan Lingkungan	4	4	100
Total	475	475	100

Dalam Tabel III.8 terdapat 475 faktor risiko yang ditemukan dan dikendalikan.

Grafik III.4 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Ke-2 BBKK Makassar Semester I tahun 2025



Grafik III.4 menunjukkan realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Target ditetapkan 100% karena realisasi di tahun 2024 sebesar 100%, sehingga di tahun 2025 ditetapkan target yang sama dengan tahun 2024. Untuk realisasi yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan karena untuk Semester I tahun 2025 semua faktor risiko yang didapatkan dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan/penapisan orang, alat angkut sesuai satandar kekarantinaan, barang dan lingkungan dikendalikan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Untuk pemeriksaan orang, dalam hal pengawasan penumpang jika terdapat suhu di atas 37,5°C maka langsung diadakan pemeriksaan antigen dan jika hasil positif akan diberikan notifikasi yang dikirimkan ke Dinkes Provinsi yang selanjutnya akan dikirimkan ke Dinkes Kab/Kota dimana penumpang tersebut berdomisili. Pengawasan berlanjut dengan penyelidikan epidemiolog yang dilakukan oleh kolaborasi Timker I, II, III dan IV. Orang hamil dan sakit juga diterbitkan SKTLT nya jika tidak layak terbang dari hasil pemeriksaan tenaga kesehatan BBKK Makassar.

Untuk alat angkut jika terdapat faktor risiko maka akan diterbitkan dokumen SSCC.

Pemeriksaan barang berupa jenazah dengan penyakit menular langsung diadakan tindakan desinfeksi, namun untuk Semester I tahun 2025 jenazah yang diawasi tidak terdapat jenazah penyakit menular.

Untuk pemeriksaan lingkungan pengawasan TPP yang tidak sesuai fungsinya diberikan rekomendasi.

Grafik III.5 Perbandingan Capaian Indikator Ke-2
BBKK Makassar Tahun 2022, 2023, 2024,
dan Semester I tahun 2025



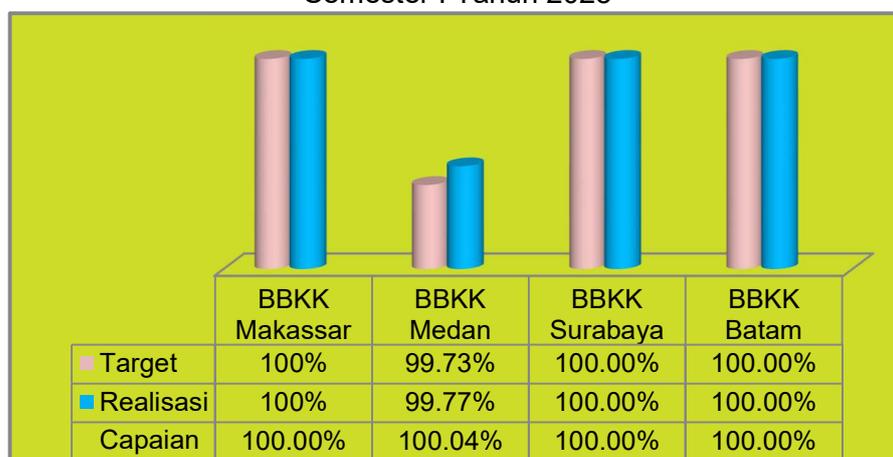
Grafik III.5 menggambarkan capaian untuk indikator ke-2 untuk tahun 2022, 2023, 2024, dan Semester I Tahun 2025. Dimana realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Realisasi tercapai maksimal karena semua faktor risiko yang ditemukan, semuanya dikendalikan.

Grafik III.6 Perbandingan Target Renstra dengan Realisasi Indikator Ke-2 BBKK Makassar Semester I tahun 2025



Grafik III.6 menggambarkan realisasi indikator 2 BBKK Makassar Semester I Tahun 2025 sebesar 100% lebih besar dibanding dengan target Renstra Kemenkes sebesar 94%, karena semua factor risiko yang ditemukan pada indikator 1 dikendalikan pada indikator 2.

Grafik III.7 Perbandingan Capaian Indikator Ke-2 BBKK Makassar dengan BBKK Medan, BBKK Surabaya, dan BBKK Batam Semester I Tahun 2025



Dari grafik III.7 di atas menunjukkan BBKK Makassar, Surabaya, dan Batam dengan realisasi 100%. BBKK Medan realisasi di atas target yang ditetapkan karena menetapkan target yang lebih kecil dibanding dengan ke tiga BBKK. Namun semua berproses sampai akhir tahun 2025. Dalam menetapkan target BBKK Makassar mengacu pada tahun-tahun sebelumnya dengan realisasi sesuai target, sehingga ditetapkan target sebesar 100%. Dengan maksud semua faktor risiko yang ditemukan dikendalikan sesuai dengan aturan berlaku berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan oleh masing-masing parameter.

e. Analisa Keberhasilan Kegiatan

- 1) Dalam pemeriksaan orang, FR yang ditemukan langsung dikendalikan karena :
 - a) adanya dukungan lintas sector dan lintas program yaitu Dinkes Prov., Kota/Kab., PT. Angkasa Pura I, Otoritas Pelabuhan, Otoritas Bandara, Kesyahbandaran, KSOP, maskapai penerbangan, agen kapal dan travel.
 - b) Pengawasan pelaku perjalanan tetap dilaksanakan sebagai deteksi dini masuknya penyakit potensial wabah.
 - c) Pelaksanaan pemeriksaan deteksi dini pada pelaku perjalanan yang masuk kategori *suspect* penyakit menular dan kontak erat.
- 2) Dalam pemeriksaan alat angkut, FR ditemukan langsung dikendalikan sehingga mencapai target yang telah ditetapkan karena :
 - a) Dukungan agen kapal yang memberikan informasi yang akurat
 - b) Dukungan lintas sektor dalam pengawasan alat angkut.
- 3) Dalam pemeriksaan lingkungan, FR yang ditemukan langsung dikendalikan, sehingga target tercapai sesuai yang ditetapkan karena adanya dukungan lintas sector.

f. Masalah yang dihadapi

- 1) Sumber daya dalam pengawasan meliputi SDM, sarana, dan prasarana kurang memadai.
- 2) Masih terdapat beberapa pelaku perjalanan yang tidak menerima dinyatakan status tidak laik terbang
- 3) Masih terdapat Pelaku perjalanan luar negeri yang termasuk suspect dan/atau kontak menolak untuk dilakukan pemeriksaan swab Antigen/PCR.
- 4) Belum ada keseragaman pelaksanaan aturan pengawasan pesawat dalam negeri terjangkau dan OMKABA di BKK seluruh Indonesia.
- 5) Pengawasan pelaku perjalanan dari luar negeri terkait pengisian assessment mandiri (SSHP) tidak seragam dilaksanakan di seluruh BKK Indonesia.

g. Usul pemecahan masalah

- 1) Peningkatan sumber daya yang dibutuhkan di BKK.
- 2) Memberikan edukasi kepada pelaku perjalanan tentang syarat laik terbang, izin angkut jenazah, orang sakit, dan pelaku perjalanan luar negeri yang termasuk *suspect* dan/atau kontak erat.
- 3) Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi dengan lintas sektor mengenai prosedur penanganan pelaku perjalanan luar negeri yang termasuk *suspect* dan/atau kontak erat.
- 4) Mengusulkan keseragaman regulasi dan pelaksanaan terkait pengawasan pesawat dan pelaku perjalanan di seluruh BKK.

h. Analisis Efisiensi Sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja dikurang realisasi anggaran kinerja dibagi dengan perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan :

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran kinerja

CKi : Capaian kinerja

RAKi : Realisasi anggaran kinerja

NE : Nilai Efisiensi

$$E = \frac{(897.410.000 \times 1) - 98.340.500}{897.410.000 \times 1} \times 100\%$$

$$E = 89,04\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{89,04}{20} \times 50\right)$$

$$NE = 272,60\%$$

Untuk indikator 2 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 897.410.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 98.340.500,- serta capaian indikator sebesar 100%, sehingga diperoleh efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 89,04% dengan nilai efisiensi sebesar 272,60%. Nilai efisiensi lebih dari 50, berarti untuk kegiatan pada indikator 2 bernilai efisien dari sisi anggaran.

Selain efisiensi dari anggaran, penggunaan sumber daya juga dipengaruhi beberapa hal, yaitu :

- 1) Adanya *Whatsapp Group* yang telah dibuat yang beranggotakan lintas sektor pelabuhan dan bandara, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, serta dari BBKK Makassar yang memudahkan dalam komunikasi dan koordinasi dan bertukar informasi dalam penanganan penyakit infeksi emerging.
- 2) Penggunaan aplikasi *Langsat Digital* mempercepat proses layanan pemeriksaan kesehatan bagi penumpang yang akan berangkat dengan kategori sakit, bayi, ibu hamil dan berkebutuhan khusus.

- 3) EMFIRE (Mobile Emergency First Response) dengan Motor Listrik (molis) sebagai sarana mobilisasi dalam memberikan pertolongan kegawatdaruratan diharapkan dapat merespon kegawatdaruratan kesehatan yang terjadi di bandara dengan cepat, terutama pada saat kondisi matra yaitu pada arus mudik dan situasi khusus lainnya sehingga korban dapat terhindar dari risiko kecacatan atau kematian
- 4) Pasolle bertujuan untuk memudahkan Badan Usaha Swasta (BUS) penyelenggara penyehatan alat angkut dalam mengajukan surat permohonan pengawas pelaksanaan penyehatan alat angkut di wilayah kerja Balai Besar Kekearifan Kesehatan Makassar, akses untuk melihat progres dokumen, hanya dapat diakses dari email pemohon yang sudah didaftarkan

3. INDIKATOR KETIGA

Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN

Target Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN pada tahun 2025 adalah sebesar 0,96.

a. Pengertian

Persentase status Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN selama periode satu tahun, berupa :

- 1) Persentase Sinyal SKD KLB dan Bencana yang Direspon Kurang dari 24 Jam dengan Kelengkapan 80%
- 2) Persentase Bandara/Pelabuhan dengan Indeks Pinjal ≤ 1
- 3) Persentase Bandara/Pelabuhan Tidak Ditemukan Larva Anopheles (< 1)
- 4) Persentase Bandara/Pelabuhan dengan Indeks Populasi Kecoa < 2

- 5) Persentase Bandara/Pelabuhan dengan Indeks Populasi Lalat < 2
- 6) Persentase Bandara/Pelabuhan dengan HI Perimeter = 0
- 7) Persentase Bandara/Pelabuhan dengan HI Buffer < 1
- 8) Persentase Lokus TTU Memenuhi Syarat dengan Minimal 3 Kali Pemeriksaan
- 9) Persentase Lokus TPP Laik Hygiene dengan Minimal 2 Kali Pemeriksaan
- 10) Persentase Lokus Kualitas Air Bersih Memenuhi Syarat Kesehatan dengan Minimal 2 Kali Pemeriksaan Kimia Lengkap dan 6 Kali Pemeriksaan Mikrobiologis/ Bakteriologis

b. Definisi Operasional

Status faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan dalam satu tahun

c. Rumus (cara perhitungan)

Akumulasi persentase target dan capaian:

- 1) Persentase Sinyal SKD KLB dan Bencana yang Direspon Kurang dari 24 Jam dengan Kelengkapan 80%
- 2) Indeks Pinjal ≤ 1
- 3) Larva Anopheles (< 1)
- 4) Populasi Kecoa < 2
- 5) Populasi Lalat < 2
- 6) HI Perimeter = 0
- 7) HI Buffer < 1
- 8) TTU Memenuhi Syarat dengan Minimal 3 Kali Pemeriksaan
- 9) TPP Laik Hygiene dengan Minimal 2 Kali Pemeriksaan
- 10) Kualitas Air Bersih Memenuhi Syarat Kesehatan dengan Minimal 2 Kali Pemeriksaan Kimia Lengkap dan 6 Kali Pemeriksaan Mikrobiologis/ Bakteriologis

$$\frac{\text{Indeks Pengendalian FR di Pintu Masuk Negara}}{\text{Target Indeks FR di Pintu Masuk Negara}} \times 100\%$$

d. Capaian Kinerja

$$\frac{0,88}{0,96} \times 100\% = 91,67 \%$$

Tabel III.9 Perbandingan Target dan Realisasi Parameter Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN BBKK Makassar Semester I Tahun 2025

No	Parameter	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Sinyal SKD KLB dan Bencana yang Direspon Kurang dari 24 Jam dengan Kelengkapan 80%	100	100	100
2	Nilai Indeks Pinjal ≤ 1	100	100	100
3	Tidak ditemukan Larva Anopheles (< 1)	100	100	100
4	Kepadatan kecoa rendah < 2	100	100	100
5	Kepadatan lalat < 2	100	100	100
6	HI Perimeter = 0	100	100	100
7	HI Buffer < 1	100	100	100
8	Persentase Lokus TTU Memenuhi Syarat dengan Minimal 3 Kali Pemeriksaan	100	91,67	91,67
9	Persentase Lokus TPP Laik Hygiene dengan Minimal 2 Kali Pemeriksaan	100	100	100
10	Persentase Lokus Kualitas Air Bersih Memenuhi Syarat Kesehatan dengan Minimal 2 Kali Pemeriksaan Kimia Lengkap dan 6 Kali Pemeriksaan Mikrobiologis/ Bakteriologis	60	0	0

Tabel III.10 Perhitungan Indeks Pengendalian Faktor Risiko Di Pelabuhan/Bandara/PLBDN BBKK Makassar Semester I Tahun 2025

No	Parameter	Bobot	Baseline	Coverage	Score	Maksimal	Cov Max	Score Max	Minimal	Scoe Min
1	2	3	4	$5=(4/7)^*$ 100	$6=3*5$	7	8	$9=3*8$	10	$11=3*10$
1	Sinyal SKD KLB dan Bencana yang Direspon Kurang dari 24 Jam dengan Kelengkapan 80%	5	100	100	500	100	100	500	0	0
2	Nilai Indeks Pinjal ≤ 1	4	100	100	400	100	100	400	0	0
3	Tidak ditemukan Larva Anopheles (< 1)	3	100	100	300	100	100	300	0	0
4	Kepadatan kecoa rendah < 2	4	100	100	400	100	100	400	0	0

5	Kepadatan lalat < 2	4	100	100	400	100	100	400	0	0
6	HI Perimeter = 0	5	100	100	500	100	100	500	0	0
7	HI Buffer < 1	5	100	100	500	100	100	500	0	0
8	Persentase Lokus TTU Memenuhi Syarat dengan Minimal 3 Kali Pemeriksaan	4	91,67	91,67	366,68	100	100	400	0	0
9	Persentase Lokus TPP Laik Hygiene dengan Minimal 2 Kali Pemeriksaan	5	100	100	500	100	100	500	0	0
10	Persentase Lokus Kualitas Air Bersih Memenuhi Syarat Kesehatan dengan Minimal 2 Kali Pemeriksaan Kimia Lengkap dan 6 Kali Pemeriksaan Mikrobiologis/ Bakteriologis	5	0	0	0	100	100	500	0	0
Total					3866,67			4.400		0
$Indeks = \frac{S}{S_{max} - S_{min}}$ $Indeks = \frac{3866,67}{4.400 - 0}$ $Indeks = 0,88$										

Berdasarkan Tabel II.10 diperoleh score sebesar 3866,67. Untuk perhitungan indeks dengan formulasi nilai score dibagi dengan score maksimal sebesar 4.400, sehingga diperoleh nilai indeks sebesar 0,88. Terdapat 2 dari 24 Lokus TTU yang belum memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan serta Belum ada Lokus Kualitas Air Bersih Memenuhi Syarat Kesehatan dengan Minimal 2 Kali Pemeriksaan Kimia Lengkap dan 6 Kali Pemeriksaan Mikrobiologis/ Bakteriologis.

1) Persentase Sinyal SKD KLB dan Bencana yang Direspon Kurang dari 24 Jam dengan Kelengkapan 80%

Tabel III.11 Capaian Indeks Pengendalian Faktor Risiko
Di Pelabuhan/Bandara/PLBDN BBKK Makassar
Semester I Tahun 2025
Parameter Sinyal SKD KLB dan Bencana yang Direspon Kurang
dari 24 Jam dengan Kelengkapan 80%

Parameter	Pengendalian	Target	Realisasi	%Capaian
		100%	100%	100%
Sinyal SKD KLB dan Bencana yang Direspon Kurang dari 24 Jam dengan Kelengkapan 80%	Penyelidikan Epidemiologi (PE)	1	1	551
	Penumpang Meninggal di Pesawat	2	2	
	Notifikasi Suhu $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ atau kontak erat =>	17	17	
	Notifikasi TB Positif	0	0	
	Notifikasi HIV Positif	0	0	
	Notifikasi IMS Positif	1	1	
	Notifikasi Malaria Positif	0	0	
	Notifikasi Suspek Covid-19 dengan pemeriksaan Antigen/PCR	18	18	
	Notifikasi ILI	18	18	
	Notifikasi SSHP Kuning/Orange/Merah	489	489	
	Penyakit Menular yang Menimbulkan Wabah (SKTLT Penyakit Menular)	5	5	

Pengambilan sampel suspek Covid-19 sebanyak 18 sampel, diperiksa dengan pemeriksaan PCR dan ditemukan sebanyak 1 sampel positif. Semua suspek diberikan notifikasi. Pemeriksaan sampel ILI sebanyak 18 sampel, dengan hasil positif Influenza A sebanyak 11 sampel, hasil positif Influenza B sebanyak 1 sampel dan negatif sebanyak 6 sampel. SKTLT Sakit atau Pertolongan Darurat/ SKTLT Hamil > 32 Minggu sebanyak 101. Penyakit menular sebanyak 5 serta Notifikasi dengan SSHP kuning/orange/merah sebanyak 489 orang.

Berdasarkan tabel III.14 dapat dilihat bahwa indikator sinyal SKD KLB dan bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan

kelengkapan 80% dengan realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

2) Persentase Bandara/Pelabuhan dengan Indeks Pinjal ≤ 1

Nilai indeks pinjal di Wilayah Kerja BBKK Makassar pada Semester I tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel III.12

Tabel III.12 Nilai Indeks Pinjal di Wilayah Kerja BBKK Makassar pada Semester I Tahun 2025

Parameter	Wilayah Kerja	Bulan					
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
Nilai Indeks pinjal ≤ 1	Pelabuhan Awerange	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Bajoe	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Belang-belang	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Biringkassi	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Makassar	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Malili	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Palopo	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Parepare	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Bira Bulukumba	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Majene	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Paotere	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Pasangkayu	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Siwa	0	0	0	0	0	0
	Bandara Tampa Padang	0	0	0	0	0	0
	Bandara Hasanuddin	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Untia	0	0	0	0	0	0

Berdasarkan Tabel III. 12 pada Semester I tahun 2025 dapat dilihat bahwa dari semua wilayah kerja yang ditargetkan pemasangan perangkat tikus, indeks pinjal tidak melebihi baku mutu yang dipersyaratkan (≤ 1) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan. Untuk parameter ini mencapai target 100% pelabuhan/ bandara dengan Indeks pinjal ≤ 1 .

3) Persentase Bandara/ Pelabuhan Tidak Ditemukan Larva Anopheles (< 1)

Tabel III.13 Hasil Survey Tingkat Kepadatan Larva Anopheles di Wilayah Kerja BBKK Makassar pada Semester I Tahun 2025

Parameter	Wilayah Kerja	Bulan					
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
Tidak Ditemukan Larva <i>Anopheles sp</i> (< 1)	Pelabuhan Awerange	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Bajoe	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Belangbelang	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Biringkassi	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Makassar	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Malili	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Palopo	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Parepare	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Bira Bulukumba	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Majene	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Paotere	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Pasangkayu	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Siwa	0	0	0	0	0	0
	Bandara Tamba Padang	0	0	0	0	0	0
	Bandara Hasanuddin	0	0	0	0	0	0

Berdasarkan tabel III.13 pada Semester I tahun 2025 dapat dilihat bahwa dari semua wilayah kerja yang ditargetkan dengan tingkat kepadatan larva *Anopheles sp* tidak melebihi baku mutu yang dipersyaratkan (indeks habitat <1) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan. Diperoleh hasil mencapai target 100%.

4) Persentase Bandara/ Pelabuhan dengan Indeks Populasi Kecoa (< 2)

Tabel III.14 Kepadatan Kecoa di Wilayah Kerja BBKK Makassar Semester I Tahun 2025

Parameter	Wilayah Kerja	Bulan					
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
Kepadatan Kecoa Rendah < 2	Pelabuhan Awerange	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Bajoe	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Belangbelang	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Biringkassi	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Makassar	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Malili	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Palopo	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Parepare	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Bira Bulukumba	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Majene	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Paotere	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Pasangkayu	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Siwa	0	0	0	0	0	0

Parameter	Wilayah Kerja	Bulan					
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
	Bandara Tumpa Padang	0	0	0	0	0	0
	Bandara Hasanuddin	0	0	0	0	0	0

Berdasarkan tabel III.14 di atas dapat dilihat bahwa dari semua wilayah kerja yang ditargetka memenuhi syarat tidak melebihi nilai baku mutu yang dipersyaratkan (<2 ekor) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan. diperoleh capaian target 100%.

5) Persentase Bandara/Pelabuhan dengan Indeks Populasi Lalat <2

Tabel III.15 Kepadatan Lalat di Wilayah Kerja BBKK Makassar Semester I Tahun 2025

Parameter	Wilayah Kerja	Bulan					
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
Kepadatan Lalat < 2	Pelabuhan Awerange	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Bajoe	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Belangbelang	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Biringkassi	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Makassar	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Malili	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Palopo	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Parepare	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Bira Bulukumba	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Majene	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Paotere	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Pasangkayu	1	0	0	0	1	0
	Pelabuhan Siwa	0	0	0	0	0	0

Parameter	Wilayah Kerja	Bulan					
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
	Bandara Tumpa Padang dan Pos Pelabuhan Mamuju	0	0	0	0	0	0
	Bandara Hasanuddin	0,4	0	0	0,3	1	0
	Pelabuhan Untia	0	0	0	0	0	0

Berdasarkan tabel III.15 di atas dapat dilihat terjadi fluktuasi pada hasil pengamatan setiap bulannya, hasil pengamatan yang melebihi baku mutu dilakukan tindakan pengendalian untuk menekan kepadatan dari semua wilayah kerja yang ditargetkan indeks populasi lalat tidak melebihi baku mutu yang dipersyaratkan (<2 ekor) berdasarkan Permenkes Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan. Diperoleh capaian target 100%.

6) Persentase Bandara/Pelabuhan dengan HI Perimeter=0

Tabel III.16 Kepadatan Jentik *Aedes aegypti* Area Perimeter di Wilayah Kerja BBKK Makassar Semester I Tahun 2025

Parameter	Wilayah Kerja	Bulan					
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
HI Perimeter = 0	Pelabuhan Awerange	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Bajoe	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Belangbelang	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Biringkassi	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Makassar	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Malili	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Palopo	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Parepare	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Bira Bulukumba	0	0	0	0	0	0

Parameter	Wilayah Kerja	Bulan					
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
	Pelabuhan Majene	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Paotere	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Pasangkayu	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Siwa	0	0	0	0	0	0
	Bandara Tampa Padang	0	0	0	0	0	0
	Bandara Hasanuddin	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Untia	0	0	0	0	0	0

Berdasarkan tabel III.16 di atas dapat dilihat bahwa dari hasil survey jentik *Ae. aegypti*, semua wilayah kerja yang ditargetkan didapatkan nilai House Indeks (HI) = 0 pada area perimeter dan tidak melebihi baku mutu yang dipersyaratkan berdasarkan Kepmekes RI No. 431 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Kesehatan Lingkungan di Pelabuhan/ Bandara/Pos Lintas Batas dalam Rangka Karantina Kesehatan. Untuk indikator ini mencapai target 100%.

7) Persentase Bandara/Pelabuhan dengan HI Buffer < 1

Tabel III.17 Kepadatan Jentik *Ae. aegypti* Area Buffer di Wilayah Kerja BBKK Makassar Semester I Tahun 2025

Parameter	Wilayah Kerja	Bulan					
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
HI Buffer = 0	Pelabuhan Awerange	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Bajoe	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Belangbelang	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Biringkassi	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Makassar	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Malili	0	0	0	0	0	0

Parameter	Wilayah Kerja	Bulan					
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
	Pelabuhan Palopo	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Parepare	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Bira Bulukumba	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Majene	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Paotere	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Pasangkayu	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Siwa	0	0	0	0	0	0
	Bandara Tampa Padang	0	0	0	0	0	0
	Bandara Hasanuddin	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Untia	0	0	0	0	0	0

Berdasarkan tabel III.17 di atas dapat dilihat bahwa dari hasil survey jentik *Ae. aegypti*, semua wilayah kerja yang ditargetkan didapatkan nilai House Indeks (HI) = 0 pada area buffer area dan tidak melebihi baku mutu yang dipersyaratkan berdasarkan Kepmekes RI No. 431 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Kesehatan Lingkungan di Pelabuhan/ Bandara/Pos Lintas Batas dalam Rangka Karantina Kesehatan. Untuk indikator ini mencapai target 100%.

8) Persentase Lokus TTU Memenuhi Syarat dengan Minimal 3 Kali Pemeriksaan

Tabel III.18 Pemeriksaan TTU di Wilayah Kerja BBKK Makassar Semester I Tahun 2025

Parameter	Wilayah Kerja	Target	%Realisasi	%Capaian
		100%	100%	100%
Persentase Lokus TTU Memenuhi Syarat dengan Minimal 3 Kali Pemeriksaan	Pelabuhan Awerange	4	4	
	Pelabuhan Bajoe Bone	2	2	
	Pelabuhan Belang Mamuju	2	2	
	Pelabuhan Biringkassi	3	3	

Parameter	Wilayah Kerja	Target	%Realisasi	%Capaian
		100%	100%	100%
	Pelabuhan Makassar	2	2	
	Pelabuhan Palopo	2	2	
	Pelabuhan Parepare	2	2	
	Bandara Hasanuddin	1	0	
	Bandara Tampa Padang	1	0	
	Pelabuhan Bira Bulukumba	1	1	
	Pelabuhan Majene	1	1	
	Pos Pelabuhan Paotere	1	1	
	Pos Pelabuhan Pasangkayu	2	2	
	Total	24	22	

Berdasarkan tabel III.18 di atas didapatkan bahwa jumlah lokus yang menjadi target pada tahun 2025 semester I sebanyak 24 lokus dari 13 wilayah kerja, realisasi pada semester I tahun 2025 sebanyak 22 lokus sedangkan 2 (dua) lokus belum mencapai target dengan 3 (tiga) kali pemeriksaan kesehatan selama setahun dengan memenuhi syarat kesehatan. Indikator ini belum mencapai target, yaitu 91,67% dari 100%.

9) Persentase Lokus TPP Laik Hygiene dengan Minimal 2 Kali Pemeriksaan

Tabel III.19 Pemeriksaan TPP di Wilayah Kerja BBKK Makassar Semester I Tahun 2025

Parameter	Wilayah Kerja	Target	%Realisasi	%Capaian
		100%	100%	100%
Persentase Lokus TPP Laik Hygiene dengan Minimal 2 Kali Pemeriksaan	Pelabuhan Bajoe Bone	12	12	
	Pelabuhan Belang Belang Mamuju	1	1	
	Pelabuhan Biringkassi	6	6	
	Pelabuhan Makassar	3	3	
	Pelabuhan Palopo	4	4	
	Pelabuhan Parepare	15	15	

Parameter	Wilayah Kerja	Target	%Realisasi	%Capaian
		100%	100%	100%
	Bandara Hasanuddin	6	6	
	Pelabuhan Bira Bulukumba	1	1	
	Pelabuhan Majene	1	1	
	Pos Pelabuhan Paotere	7	7	
	Total	56	56	

Berdasarkan tabel III.19 di atas didapatkan bahwa jumlah lokus yang menjadi target pada semester I tahun 2025 sebanyak 56 lokus dari 10 wilayah kerja dengan capaian realisasi sebanyak 100%. Setiap lokus ditargetkan dilaksanakan pemeriksaan kesehatan lingkungan minimal 2 (dua) kali pemeriksaan dengan nilai Inspeksi Kesehatan Lingkungan memenuhi syarat sesuai dengan Standar Penunjang Kegiatan Usaha Kesehatan Lingkungan, Standar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi berdasarkan Permenkes No. 14 Tahun 2021. Persentase realisasi kinerja untuk indikator ini telah mencapai target realisasi sebesar 100%.

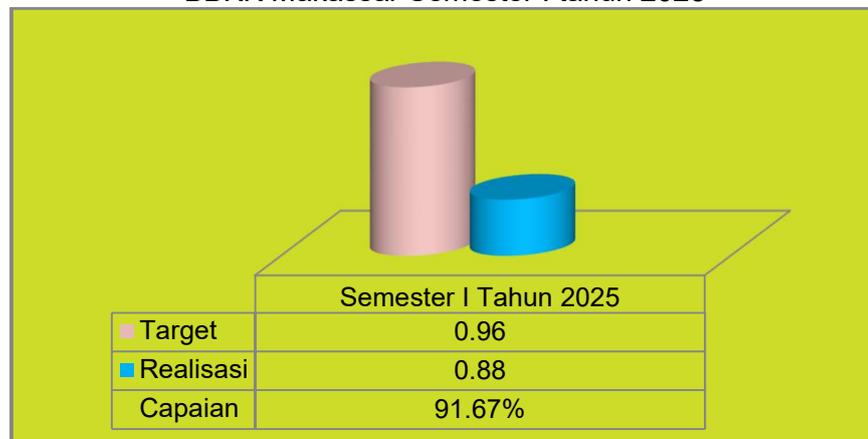
10) Persentase Lokus Kualitas Air Bersih Memenuhi Syarat Kesehatan dengan Minimal 2 Kali Pemeriksaan Kimia Lengkap dan 6 Kali Pemeriksaan Mikrobiologis/ Bakteriologis

Tabel III.20 Hasil Pemeriksaan Kualitas Air di Wilayah Kerja BBKK Makassar Semester I Tahun 2025

Parameter	Wilayah Kerja	Target Lokus (60%)	Pemeriksaan						Realisasi %	Capaian %
			P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	P-6		
Air Bersih Memenuhi Syarat Kesehatan dengan Minimal 2 Kali Pemeriksaan Kimia Lengkap dan 6 Kali Pemeriksaan Mikrobiologis/ Bakteriologis	Bandara Hasanuddin	2	2	2	0	0	0	0	0	0

Berdasarkan tabel III.20 bahwa jumlah lokus yang menjadi target pada tahun 2025 sebanyak 2 (dua) lokus di Wilayah Kerja Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Realisasi capaian pada semester I tahun 2025 belum mencapai target dengan memenuhi kriteria minimal 2 (dua) kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 (enam) kali pemeriksaan mikrobiologi memenuhi syarat kesehatan berdasarkan Permenkes No. 2 Tahun 2023.

Grafik III.8 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Ke-3 BBKK Makassar Semester I tahun 2025



Grafik III.8 menunjukkan realisasi tidak tercapai untuk Semester I Tahun 2025. Perolehan Indeks pada tahun 2025 dipengaruhi oleh 10 parameter, di mana terdapat 2 (dua) parameter yang belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu terdapat 2 dari 24 Lokus TTU yang belum memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan parameter Persentase Lokus Kualitas Air Bersih Memenuhi Syarat Kesehatan dengan Minimal 2 (dua) Kali Pemeriksaan Kimia Lengkap dan 6 (enam) Kali Pemeriksaan Mikrobiologis/ Bakteriologis terhadap

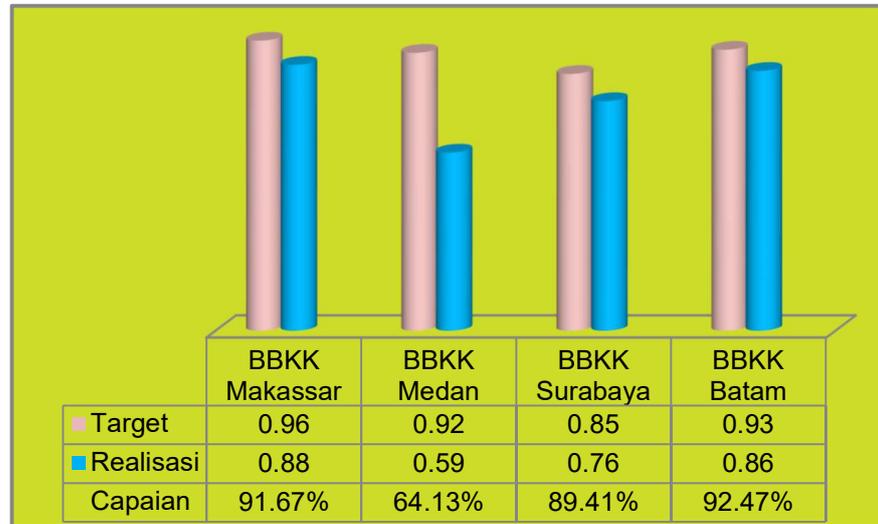
2 (dua) lokus pemeriksaan sampel air belum memenuhi 6 (enam) kali pemeriksaan mikrobiologi dengan hasil pemeriksaan memenuhi syarat kesehatan.

Grafik III.9 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator ke-3 BBKK Makassar Tahun 2022, 2023, 2024, dan Semester I Tahun 2025



Grafik III.9 tergambar realisasi indikator untuk tahun 2022 yang tidak mencapai target. Tahun 2023 dan 2024 terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan. Untuk tahun 2025 penetapan target sama dengan tahun 2024, melihat realiasi di tahun 2024. Untuk Semester I Tahun 2025 terdapat 2 parameter yang tidak mencapai target yaitu parameter Persentase Lokus TTU Memenuhi Syarat dengan Minimal 3 Kali Pemeriksaan dan Persentase Lokus Kualitas Air Bersih Memenuhi Syarat Kesehatan dengan Minimal 2 Kali Pemeriksaan Kimia Lengkap dan 6 Kali Pemeriksaan Mikrobiologis/ Bakteriologis.

Grafik III.10 Perbandingan Capaian Indikator ke-3 BBKK Makassar dengan BBKK Medan, BBKK Surabaya, dan BBKK Batam Semester I Tahun 2025



Dari Grafik III.10 menunjukkan bahwa keseluruhan BBKK belum mencapai target yang telah ditetapkan. Namun untuk capaian terbesar di BBKK Makassar, meskipun target terbesar ada pada BBKK Makassar. Kegiatan masih berproses di Semester berikutnya, diharapkan realisasi tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

e. Analisis Keberhasilan Kegiatan

- 1) Sistem surveilans yang mengintegrasikan pelaporan dari Dinas Kesehatan (Puskesmas), Rumah Sakit dan BBKK pada website <https://skdr.surveilans.org> memudahkan dalam sistim kewaspadaan dini penyakit potensial KLB dan BBKK Makassar berperan aktif dalam menggunakan sistem ini.
- 2) Keberhasilan kegiatan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit di wilayah kerja dalam rangka mengendalikan kepadatan populasi vektor karena adanya dukungan tenaga kader dalam mendukung pelaksanaan kegiatan. Kader yang direkrut sebagian dari lulusan program studi kesehatan lingkungan, sehingga sudah paham teknis pelaksanaan kegiatan pengendalian vektor dan BPP.
- 3) Wilayah kerja yang melebihi baku mutu pada indikator yang dipersyaratkan dilakukan upaya pengendalian sesuai dengan petunjuk teknis ataupun peraturan yang mengatur tentang upaya pengendalian vektor dan BPP antara lain :

- Metode pengamatan yang digunakan untuk mengetahui indeks pinjal yaitu dengan metode pemasangan perangkap jenis perangkap hidup (*lifetraps*) metode tersebut selain sebagai media pengamatan untuk menghitung *succestraps* juga berperan untuk mengurangi populasi tikus pada area pemasangan perangkap sehingga populasi tikus yang berperan sebagai inang dari pinjal pada lokasi pengamatan akan berkurang, selanjutnya pada tikus yang tertangkap dilakukan penyisiran untuk melihat keberadaan pinjal. Pemasangan perangkap yang telah dilaksanakan merupakan intervensi pengendalian terhadap inang dari pinjal yang secara tidak langsung berkurangnya inang dari pinjal pada lokasi pengamatan juga akan menekan indeks pinjal pada area tersebut.
- Pemantauan dilakukan pada lokasi-lokasi yang memungkinkan sebagai perkembangbiakan nyamuk *Anopheles sp.* baik pada *perimeter area* ataupun di *buffer area*. Pada lokasi pengamatan yang ditemukan larva *Anopheles sp.* dilakukan tindakan pengendalian dengan larvasidasi menggunakan larvasida BTI (*Bacillus thuringiensis israelensis*) Larvasida ini memiliki cara kerja yaitu sebagai racun perut, setelah tertelan kristal endotoksin larut yang mengakibatkan sel epitel rusak dan serangga berhenti makan lalu mati.
- Metode pengamatan yang digunakan untuk mengetahui indeks kepadatan kecoa yaitu dengan metode pemasangan perangkap jenis perangkap lem (*sticky traps*) metode tersebut selain sebagai media pengamatan juga berperan untuk mengurangi populasi pada area pemasangan perangkap sehingga populasi kecoa pada lokasi pengamatan akan berkurang. Selain itu beberapa tempat pengolahan pangan di terminal bandara yang sudah rutin melaksanakan pengendalian vektor dan BPP baik secara mandiri ataupun dengan menggunakan jasa *pest control*.

- Tindakan pengendalian yang dilakukan pada lokasi dengan indeks kepadatan lalat yang tinggi yaitu dengan metode pengendalian secara kimia (*spraying*), metode ini dapat menekan dan memberantas lalat dewasa sebagai tindakan pengendalian dalam rangka mencegah penyakit tular vektor dan BPP yang disebabkan oleh lalat.
 - Pengendalian nyamuk *Aedes aegypti* dilakukan pada fase jentik dengan larvasidasi dan untuk nyamuk dewasa yaitu dengan pengasapan/ fogging. Pemberian larvasida ini dapat menekan kepadatan populasi untuk jangka waktu 2 bulan. Pembubuhan larvasida dilakukan bersamaan saat melakukan survey jentik. Apabila ditemukan container yang berpotensi serta positif larva. Jenis larvasida yang digunakan adalah jenis larvasida granula temephos. Temephos 1 % sesuai dengan yang dianjurkan aman bagi manusia dan tidak menimbulkan keracunan. Jika dimasukkan kedalam air maka sedikit demi sedikit zat kimia tersebut akan larut secara merata dan membunuh semua larva nyamuk yang ada dalam tempat penampungan air tersebut. Dosis penggunaan temephos adalah 10 gram untuk 100 liter air.
- 5) Keberhasilan capaian kinerja pada setiap lokus Tempat-Tempat Umum, Tempat Pengelolaan Pangan dan kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan karena adanya upaya pengembangan edukatif melalui :
- a) pendekatan persuasif terhadap pengelola ataupun karyawan untuk memberikan kemudahan dalam membangun komunikasi pendampingan
 - b) frekuensi pemeriksaan dilakukan melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap komponen/variabel yang dinilai
 - c) melakukan upaya peningkatan pengetahuan karyawan/penjamah melalui komunikasi, informasi dan edukasi tentang kualitas dan keamanan pangan

- d) Intervensi terhadap lokus yang tidak memenuhi syarat dapat dilakukan oleh pihak pengelola berdasarkan rekomendasi yang diberikan sehingga komponen yang diperiksa didapatkan hasil memenuhi syarat pada pemeriksaan berikutnya
 - 6) Adanya kesadaran masyarakat pelabuhan dan bandara membangun komitmen dalam mewujudkan pelabuhan dan bandara sehat.
 - 7) Peran aktif lintas sektor membantu dalam menerapkan regulasi terkait SOP pelaksanaan program pengendalian risiko lingkungan di pelabuhan dan bandara.
- f. Masalah yang dihadapi
- 1) Hasil pemeriksaan laboratorium membutuhkan waktu lama sehingga berpotensi menimbulkan penularan di wilayah.
 - 2) Kurangnya SDM dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan jabatan fungsional di wilayah kerja
 - 3) Ketersediaan dana bersumber SBK dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian vektor dan BPP belum maksimal untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
 - 4) Terbatasnya Tenaga Sanitasi Lingkungan (TSL) yang dinyatakan sebagai petugas yang kompeten dalam pengambilan contoh uji air (PPCUA)
 - 5) Terbatasnya jumlah lokus yang menjadi target kualitas air bersih dipengaruhi ketersediaan anggaran terhadap biaya pemeriksaan laboratorium sampel lingkungan
- g. Usul pemecahan masalah
- 1) Berkoordinasi dengan Laboratorium untuk memberikan prioritas terhadap pemeriksaan sampel suspek KLB.
 - 2) Pengadaan SDM melalui CPNS, PPPK maupun mutasi internal Kemenkes untuk didistribusikan ke wilayah kerja.
 - 3) Penambahan anggaran pelaksanaan program pengendalian vektor dan BPP.

- 4) Tenaga sanitasi lingkungan ditugaskan untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi Petugas Pengambil Contoh Uji Air (PPCUA)
- 5) Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) mengenai metode pengendalian vektor serta pemberdayaan masyarakat dalam penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
- 6) Target lokus kualitas air bersih disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pemeriksaan laboratorium

h. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja dikurang realisasi anggaran kinerja dibagi dengan perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\%\right)$$

Keterangan :

- E : Efisiensi
 PAKi : Pagu anggaran kinerja
 CKi : Capaian kinerja
 RAKi : Realisasi anggaran kinerja
 NE : Nilai efisiensi

$$E = \frac{(1.391.898.000 \times 0,92) - 59.283.100}{1.391.898.000 \times 0,92} \times 100\%$$

$$E = 95,35\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{95,35}{20} \times 50\right)$$

$$NE = 288,38\%$$

Untuk indikator 3 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.391.898.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 59.283.100,- serta capaian indikator sebesar 91,67%, sehingga diperoleh efisiensi

penggunaan sumber daya sebesar 95,35% dengan nilai efisiensi sebesar 288,38%. Dari hasil perhitungan terlihat nilai efisiensi yang lebih dari 50, artinya kinerja terlaksana dengan penggunaan anggaran yang tidak terlalu besar.

Selain itu efisiensi penggunaan dari sisi anggaran, efisiensi sumber daya juga dipengaruhi beberapa hal, yaitu :

- 1) Sumber daya yang digunakan adalah memanfaatkan petugas surveilans puskesmas, maupun petugas surveilans BKK, sedangkan untuk wilker dengan jumlah personil yang terbatas ditunjuk petugas penanggung jawab Timker 1.
- 2) Ketersediaan SDM terlatih yang jumlahnya terbatas sehingga satu petugas melaksanakan lebih dari satu kegiatan. Kegiatan dilaksanakan secara bersamaan dengan kegiatan yang lainnya.
- 3) Keterlibatan kader pada kegiatan survey dan pengendalian vektor dan BPP.

4. INDIKATOR KEEMPAT

Nilai Kinerja Anggaran

a. Pengertian

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah hasil pengukuran kualitas kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran belanja yang diukur dengan nilai kinerja perencanaan anggaran dan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA).

Persentase Capaian Nilai Kinerja Anggaran yang diperoleh dari Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran yang tertera pada *dashboard* aplikasi SMART Kemenkeu RI..

b. Definisi Operasional

NKA diperoleh dari Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang tertera pada *dashboard* aplikasi SMART Kemenkeu RI.

- 1) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran terdiri dari beberapa indikator, yaitu sebagai berikut:
 - a) Capaian Realisasi Output dengan bobot sebesar 75%
 - b) Efisiensi SBK dengan bobot sebesar 15%
 - c) Penggunaan SBK dengan bobot sebesar 10%.
- 2) Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari beberapa indikator, yaitu sebagai berikut:
 - a) Revisi DIPA dengan bobot sebesar 10%
 - b) Deviasi Halaman III DIPA dengan bobot sebesar 15%
 - c) Penyerapan Anggaran dengan bobot sebesar 20%
 - d) Belanja Kontraktual dengan bobot sebesar 10%
 - e) Penyelesaian Tagihan dengan bobot sebesar 10%
 - f) Pengelolaan UP dan TUP dengan bobot sebesar 10%
 - g) Capaian Output dengan bobot sebesar 25%, dan
 - h) Dispensasi SPM (sebagai pengurang).

Target indicator Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025 adalah sebesar 85,00.

c. Rumus (cara perhitungan)

Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran, Nilai Kinerja Anggaran tingkat Satker dihitung dengan menjumlahkan 50% Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan 50% Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Adapun bobot dan nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai berikut :

- 1) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

No	Parameter	Bobot	Nilai	Nilai Akhir
----	-----------	-------	-------	-------------

1	Capaian Realisasi Output	75%	100	75
2	Efisiensi SBK	15%	46,30	6.95
3	Penggunaan SBK	10%	100	10
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran				91,95

2) Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

No	Parameter	Bobot	Nilai	Nilai Akhir
1	Revisi DIPA	10%	100	10
2	Deviasi Hal III DIPA	15%	100	15
3	Penyerapan Anggaran	20%	99,38	19,88
4	Belanja Kontraktual	10%	100	10
5	Penyelesaian Tagihan	10%	100	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10%	100	10
7	Capaian Output	25%	100	25
8	Dispensasi SPM (Sebagai Pengurang)		0	0
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran				99,88

Adapun pengukuran NKA ini adalah sebagai berikut:

$$NKA = (50\% \times \text{Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran}) +$$

$$(50\% \times \text{Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran})$$

$$NKA = (50\% \times 17,35) + (50\% \times 95,72)$$

$$NKA = 8,68 + 47,86$$

$$NKA = 56,54$$

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi Nilai Kinerja Anggaran}}{\text{Target Nilai Kinerja Anggaran}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{56,54}{85} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Capaian} = 66,52\%$$

d. Evaluasi Capaian Kinerja

Perhitungan NKA di atas telah sesuai dengan nilai kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang tertera pada *dashboard* aplikasi SMART Kemenkeu RI dimana nilai kinerja perencanaan anggaran sebesar 17,35 dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran sebesar 95,72 sehingga menghasilkan NKA sebesar 56.54.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada *dashboard* Aplikasi SMART Kemenkeu BBKK Makassar Bulan Mei Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat dalam Gambar III.1

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas		Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	SBK	SBK
1	024.05.416143	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR	17,35	14,25	66,67	0,00	

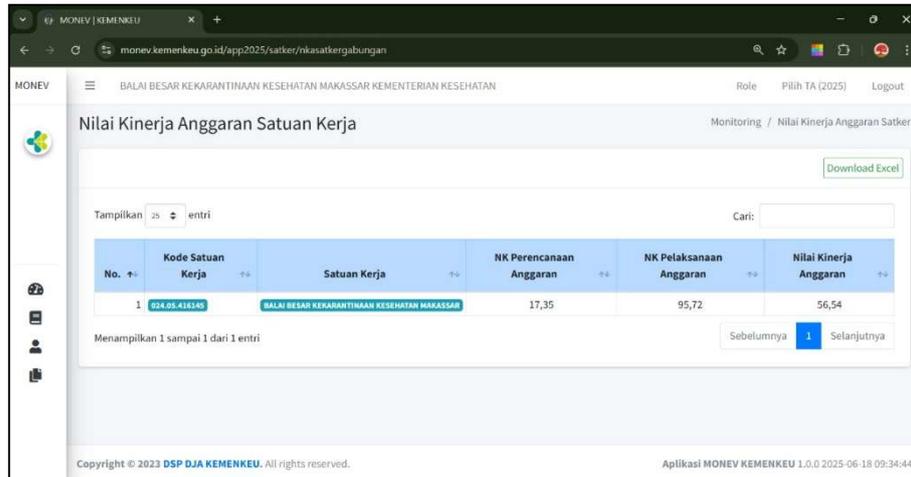
Gambar III.1 Screenshoot Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada *dashboard* Aplikasi SMART Kemenkeu BBKK Makassar Bulan Mei Tahun Anggaran 2025

Adapun Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada *dashboard* Aplikasi SMART Kemenkeu BBKK Makassar Bulan Mei Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat dalam Gambar III.2

No.	Periode	Kode KPPN	Kode DA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Nilai Tercapainya	Kinerja	Disipasi (Pengangsal)	Nilai Akumulatif (Hingga Periode)	
							Revisi 0%	Deviasi Maksimum 5%	Penyempitan Anggaran	Saldo Konvensional	Penjelasan Tagihan	Penghasilan UP dan TUP					Capaian Output
1	Mei	126	024	420245	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR	Revisi	100,00	100,00	17,23	100,00	100,00	100,00	93,27	93,72	100%	0,00	93,12
						Bobot	10	10	20	10	10	10	25				
						Nilai Akhir	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	23,32				
						Nilai Angk	100,00			93,23			93,27				

Gambar III.2 Screenshoot Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada *dashboard* Aplikasi SMART Kemenkeu BBKK Makassar Bulan Mei Tahun Anggaran 2025

Sehingga Nilai Kinerja Anggaran pada *dashboard* Aplikasi SMART Kemenkeu BBKK Makassar Bulan Mei Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat dalam Gambar III.3



Gambar III.3 Screenshot Nilai Kinerja Anggaran pada *dashboard* Aplikasi SMART Kemenkeu BBKK Makassar Bulan Mei Tahun Anggaran 2025

Sesuai dengan Nilai Kinerja Anggaran yang tertera pada *dashboard* aplikasi SMART Kemenkeu RI di atas, nilai BBKK Makassar Bulan Mei Tahun 2025 adalah sebesar 56,54.

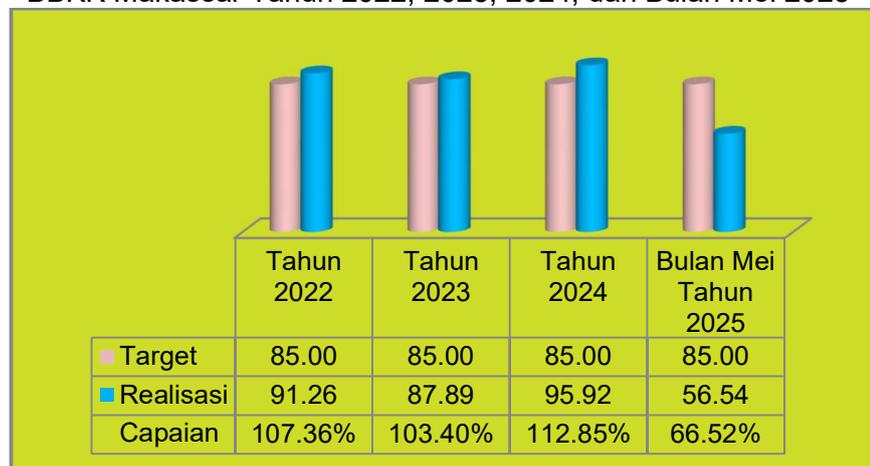
Grafik III.11 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Ke-4 BBKK Makassar Bulan Mei Tahun 2025



Grafik III.11 menunjukkan realisasi yang belum mencapai target. Realisasi di tahun 2024 dijadikan sebagaia acuan untuk penetapan target di tahun 2025. Kegiatan masih on track, sehingga diharapkan untuk akhir tahun 2025 akan mencapai target yang telah ditetapkan.

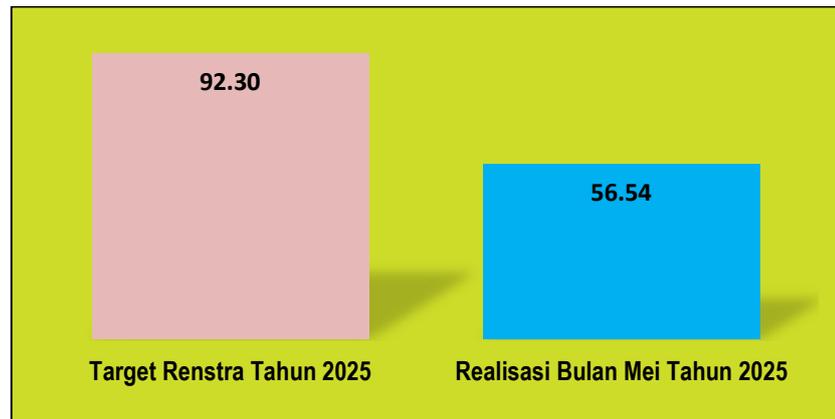
Adapun perbandingan capaian indikator ke-4 antara tahun 2022 sampai dengan Mei Tahun 2025 dapat dilihat dalam Grafik III.12.

Grafik III.12 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-4 BBKK Makassar Tahun 2022, 2023, 2024, dan Bulan Mei 2025



Dari grafik III.12 terlihat untuk realisasi Nilai Kinerja Anggaran untuk tahun 2022 sampai dengan 2024 berada di atas target yang telah ditentukan. Pada Bulan Mei tahun 2025 belum mencapai target, terdapat beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan RPD dan RPK.

Grafik III.13 Perbandingan Target Renstra dengan Realisasi Indikator Ke-4 BBKK Makassar dengan Mei tahun 2025



Grafik III.13 menggambarkan realisasi yang belum mencapai target Renstra. Kegiatan masih berjalan, diharapkan di akhir tahun 2025, terealisasi sesuai dengan target Renstra 2025.

Grafik III.14 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-4 BBKK Makassar dengan BBKK Medan, BBKK Surabaya, dan BBKK Batam Bulan Mei Tahun 2025



Dari Grafik III.14 terlihat realisasi untuk ke empat BKK keseluruhan belum mencapai target. Realisasi terbesar pada BBKK Surabaya dengan nilai 59,31.

e. Analisis Keberhasilan Kegiatan

- 1) Melakukan rapat monitoring dan evaluasi (*monev*) realisasi anggaran serta capaian output kegiatan secara berkala.

Seluruh kegiatan yang ada dalam RKAKL dilakukan pembahasan capaian realisasinya serta kendala yang dihadapi serta rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan sebagai alternatif pemecahan masalah.

- 2) Melakukan revisi kegiatan dan anggaran dalam RKAKL.
Untuk menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan yang tidak terencana sebelumnya, maka dilakukan revisi anggaran baik pada tingkat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), revisi Kanwil DJPb maupun revisi DJA.
- 3) Melaksanakan money per bulan terhadap RPK dan RPD.

f. Masalah yang dihadapi

Terdapat kebijakan efisiensi anggaran, sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan diatur kembali sesuai dengan anggaran yang masih bisa digunakan.

g. Usul pemecahan masalah

Melakukan revisi Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) mengikuti sisa anggaran perjalanan dinas yang tersedia.

h. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja dikurang realisasi anggaran kinerja dibagi dengan perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\%\right)$$

Keterangan :

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran kinerja

CKi : Capaian kinerja
RAKi : Realisasi anggaran kinerja
NE : Nilai efisiensi

$$E = \frac{(350.493.000 \times 0,67) - 39.039.650}{350.493.000 \times 0,67} \times 100\%$$

$$E = 83,26\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{83,26}{20} \times 50\%\right)$$

$$NE = 258,14\%$$

Untuk indikator 4 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 350.493.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 39.039.650,- serta capaian indikator sebesar 66,52%, sehingga diperoleh efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 83,26% dan nilai efisiensi sebesar 258,14%.

Selain itu efisiensi penggunaan anggaran, efisiensi sumber daya juga dipengaruhi beberapa hal, yaitu :

- 1) Pelaksanaan kegiatan monev realisasi anggaran dan monev capaian keluaran yang dilakukan secara berkala dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan lainnya seperti rekonsiliasi data PNBPN dan pertemuan koordinasi internal. Dengan metode pelaksanaan kegiatan monev seperti ini maka akan terjadi efisiensi sumber daya baik waktu, tenaga maupun biaya.
- 2) Aplikasi D'Tawang untuk mempermudah dan mempercepat dalam proses pencairan pertanggungjawaban keuangan di BBKK Makassar.
- 3) Aplikasi Sitopeng yang dapat memonitoring pengadaan sehingga dapat menjadi warning/alarm apabila terdapat belanja kontraktual yang harus segera dilapor kontrak ke KPPN sehingga tidak terlambat untuk dilaporkan. Selain itu memudahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk memonitor proses pengadaan hingga pencairan anggarannya.

5. INDIKATOR KELIMA

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

a. Pengertian

Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran atau IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja.

b. Definisi Operasional

Ukuran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga/ satuan kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Target Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Nilai IKPA) Tahun 2025 adalah sebesar 90,00.

c. Rumus (cara perhitungan)

Nilai IKPA pada aplikasi OM-SPAN diperoleh dengan menjumlahkan 7 (tujuh) nilai kinerja indikator dikalikan dengan bobot masing-masing indikator lalu dikurangi Dispensasi SPM. Dalam hal terdapat satu atau lebih indikator kinerja yang tidak memiliki transaksi, maka nilai akhir IKPA Satker dihitung sebagaimana berikut :

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot *} - \text{Dispensasi SPM}$$

*) keterangan :

- 1) Konversi bobot bernilai 100 persen apabila Satker memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai dan

- 2) Konversi bobot bernilai dibawah 100 persen apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

d. Capaian Kinerja

Dalam melaksanakan pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran terdapat 8 (delapan) indikator dengan bobot terlihat dalam tabel III.21.

Tabel III.21 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Aspek	No	Indikator Kinerja	Bobot	Nilai	Nilai Akhir
Kualitas Perencanaan Anggaran	1	Revisi DIPA	10%	100	10
	2	Deviasi Hal III DIPA	15%	100	15
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	3	Penyerapan Anggaran	20%	97,01	19,40
	4	Belanja Kontraktual	10%	100	10
	5	Penyelesaian Tagihan	10%	100	10
	6	Pengelolaan UP dan TUP	10%	100	10
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	7	Capaian Output	25%	85,27	21,32
	8	Dispensasi SPM (Sebagai Pengurang)		0	0
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran					95,72

Dari hasil perhitungan capaian kinerja indikator IKPA BBKK Makassar Bulan Mei Tahun 2025 sebesar 95,72 dengan kategori sangat baik, ditunjukkan dalam gambar III.4 dashboard OM-SPAN.

LAPORAN KI

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN																
No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	136	024	416145	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR	Nilai	100.00	100.00	97.01	100.00	100.00	100.00	85.27	95.72	100%	0.00	95.72
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.40	10.00	10.00	10.00	21.32				
					Nilai Aspek	100.00		99.25				85.27				

Gambar III.4
Dashboard Aplikasi OM-SPAN
hasil perhitungan capaian kinerja IKPA
BBKK Makassar Bulan Mei Tahun 2025

Dari gambar III.4 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Revisi DIPA

Indikator revisi DIPA merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran berdasarkan frekuensi revisi DIPA yang dilakukan Satker dalam satu semester.

Indikator revisi DIPA ini merupakan salah satu indikator yang mengalami reformulasi dari Perdirjen 5 Tahun 2022 ke tahun 2024, dimana sebelumnya frekuensi yang dihitung adalah per triwulan menjadi semesteran.

Revisi yang termasuk dalam objek perhitungan adalah revisi yang tidak mengakibatkan perubahan pagu di tingkat satker dan termasuk dalam revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap yang disahkan oleh DJA, Direktorat Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Kanwil DJPB Kementerian Keuangan antara lain :

- a. (201) Antar fungsi/sub fungsi dan/atau antar program
- b. (211) Pemenuhan belanja operasional
- c. (212) Penyelesaian pagu minus belanja pegawai operasional
- d. (213) Pergeseran anggaran dari belanja operasional ke belanja non-operasional
- e. (217) Penyelesaian tunggakan
- f. (220) Pemanfaatan sisa anggaran kontraktual dan/atau swakelola
- g. (221) Pergeseran anggaran antarjenis belanja

- h. (222) Kontrak tahun jamak
- i. (225) RO cadangan
- j. (226) Penurunan volume RO secara total
- k. (229) Penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht)
- l. (231) Penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran
- m. (236) Pergeseran anggaran antar KRO dan/atau antar kegiatan
- n. (239) Revisi dalam rangka pagu tetap lainnya

Indikator revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam rentang semesteran dan tidak bersifat kumulatif. Nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori frekuensi revisi DIPA sebagaimana berikut :

Jumlah Revisi DIPA	Nilai Kinerja Revisi Anggaran (NKRA)
0-1	110
2	100
>=3	50

Revisi DIPA yang dilakukan dalam rentang semester I dan semester II masing-masing diberikan bobot sebesar 50%.

Formula perhitungan nilai IKPA revisi DIPA = (50% x NKRA Semester I) + (50% x NKRA Semester II), dimana NKRA berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam satu semester.

Tahun 2024 BBKK Makassar telah melaksanakan revisi DIPA sebanyak 7 kali dengan pagu tetap.

Tabel III.22
Revisi DIPA BBKK Makassar Tahun 2025

No	Revisi DIPA	Tanggal Pengesahan DIPA	Perubahan Pagu	Kode Revisi	Jenis Revisi	Objek penilaian Revisi DIPA
1	Revisi DIPA 1	21 Februari 2025	Tidak	306	Pencantuman/Penghapusan/Perubahan Catatan Halaman IV .A (Blokir)	Tidak
2	Revisi DIPA 2	19 April 2024	Tidak	315	Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA	Tidak

No	Revisi DIPA	Tanggal Pengesahan DIPA	Perubahan Pagu	Kode Revisi	Jenis Revisi	Objek penilaian Revisi DIPA
				325	Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK	Tidak

Sumber : Data Primer, 2025

Berdasarkan aplikasi OM-SPAN, Nilai Parameter Revisi DIPA BBKK Makassar pada Bulan Mei Tahun 2025 adalah 100. Berdasarkan tabel III.22 terlihat bahwa sampai Bulan Mei Tahun 2025 dilakukan dua kali revisi DIPA dengan pagu tetap, namun revisi yang dilakukan tidak termasuk dalam objek perhitungan untuk indikator revisi DIPA dalam penilaian IKPA.

2) Deviasi Halaman III DIPA

Indikator deviasi halaman III DIPA merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran berdasarkan rata-rata nilai kinerja bulanan deviasi Halaman III DIPA.

Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap RPD bulanan pada setiap jenis belanja dengan memperhitungkan proporsi pagu masing-masing jenis belanja.

Nilai RPD yang diperhitungkan adalah RPD yang dikunci setiap awal triwulanan. Batas akhir pemutakhiran RPD pada Halaman III DIPA dalam rangka penilaian IKPA adalah sampai dengan sepuluh hari kerja pertama pada setiap triwulan. Khusus untuk triwulan I, batas akhir pemutakhiran RPD pada Halaman III DIPA adalah sampai dengan sepuluh hari kerja pertama bulan Februari.

Penguncian data RPD pada Halaman III DIPA dan data proporsi pagu masing-masing jenis belanja dilakukan berdasarkan tanggal *posting* DIPA hasil revisi pada sistem. Nilai deviasi bulanan maksimum sebesar 100%. Ambang batas rata-rata deviasi bulanan yang diperkenankan untuk mencapai nilai

Penyerapan anggaran merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran berdasarkan kesesuaian eksekusi belanja dengan target penyerapan anggaran triwulanan.

Pengukuran aspek kualitas pelaksanaan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai penyerapan anggaran pada setiap triwulan. Nilai kinerja penyerapan anggaran setiap triwulan dihitung berdasarkan nilai rata-rata tertimbang antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran masing-masing jenis belanja dengan memperhitungkan proporsi pagu masing-masing jenis belanja.

Target penyerapan anggaran triwulanan ditetapkan untuk masing-masing jenis belanja yakni :

a. Belanja Pegawai (51)

Triwulan I 20%, Triwulan II 50%, Triwulan III 75%, dan Triwulan IV 95%.

b. Belanja Barang (52)

Triwulan I 15%, Triwulan II 50%, Triwulan III 70%, dan Triwulan IV 90%.

c. Belanja Modal (53)

Triwulan I 10%, Triwulan II 40%, Triwulan III 70%, dan Triwulan IV 90%.

Nilai Parameter Penyerapan Anggaran BBKK Makassar Bulan Mei Tahun 2025 pada Aplikasi OM-SPAN adalah 97,01, sebagaimana yang terlihat pada tabel III.24 berikut ini :

Tabel III.24 Parameter Penyerapan Anggaran
BBKK Makassar Bulan Mei Tahun 2025

Periode	Keterangan	Pagu Per Jenis Belanja			NKPA Tertimbang Seluruh J.Bel	Nilai IKPA
		051	052	053		
'01	Pagu Jenis Belanja	20,229,357,000	12,007,042,000	554,532,000	18.22	100.00
	Proporsi Pagu Netto	-	5,812,083,000	86,860,000		

Periode	Keterangan	Pagu Per Jenis Belanja			NKPA Tertimbang Seluruh J.Bel	Nilai IKPA
		051	052	053		
	Nominal Target	20,229,357,000	6,194,959,000	467,672,000		
	Target	75.22%	23.04%	1.74%		
	Penyerapan s.d Periode Ini	3,034,403,550	619,495,900	23,383,600		
	% Realisasi	15%	10%	5%		
	NKPA Tertimbang	20,229,357,000	12,007,042,000	554,532,000		
'02	Pagu Jenis Belanja	-	5,812,083,000	86,860,000	68,97	100.00
	Proporsi Pagu Netto	20,229,357,000	6,194,959,000	467,672,000		
	Nominal Target	75.22%	23.04%	1.74%		
	Target	3,034,403,550	619,495,900	23,383,600		
	Penyerapan s.d Periode Ini	15%	10%	5%		
	% Realisasi	20,229,357,000	12,007,042,000	554,532,000		
	NKPA Tertimbang	-	5,812,083,000	86,860,000		
'03	Pagu Jenis Belanja	20,229,357,000	6,194,959,000	467,672,000	100.00	100.00
	Blokir	75.22%	23.04%	1.74%		
	Pagu Netto	3,034,403,550	619,495,900	23,383,600		
	Proporsi Pagu Netto	15%	10%	5%		
	Nominal Target	20,229,357,000	12,007,042,000	554,532,000		
	Target	-	5,812,083,000	86,860,000		
	Penyerapan s.d Periode Ini	20,229,357,000	6,194,959,000	467,672,000		
	% Realisasi	75.22%	23.04%	1.74%		
'04	NKPA Tertimbang	8,091,742,800	2,477,983,600	93,534,400	75.65	87.83
	Pagu Jenis Belanja	40%	40%	20%		
	Proporsi Pagu Netto	20,229,357,000	12,007,042,000	554,532,000		
	Nominal Target	-	5,812,083,000	86,860,000		
	Target	20,229,357,000	6,194,959,000	467,672,000		
	Penyerapan s.d Periode Ini	75.22%	23.04%	1.74%		
	% Realisasi	8,091,742,800	2,477,983,600	93,534,400		
'05	NKPA Tertimbang	40%	40%	20%	94.02	97.01
	Pagu Jenis Belanja	20,229,357,000	12,007,042,000	554,532,000		
	Proporsi Pagu Netto	-	5,812,083,000	86,860,000		
	Nominal Target	20,229,357,000	6,194,959,000	467,672,000		
	Target	75.22%	23.04%	1.74%		
	Penyerapan s.d Periode Ini	3,034,403,550	619,495,900	23,383,600		
	% Realisasi	15%	10%	5%		
NKPA Tertimbang	20,229,357,000	12,007,042,000	554,532,000			

Sumber : OM-SPAN 2025

Berdasarkan tabel III.24 pada Bulan Mei Tahun 2025 terlihat bahwa baik target belanja 51, 52, maupun 53 semuanya tidak mencapai target. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran dengan realisasi yang masih kurang, sementara jumlah pagu anggaran total masih sama, termasuk pagu anggaran yang diblokir. Hal ini menyebabkan rendahnya persentase penyerapan anggaran yang berdampak pada Nilai Penyerapan

Anggaran dalam hal ini Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Terimbang Seluruh Jenis Belanja (NKPA Terimbang Seluruh Jenis Belanja sehingga diperoleh nilai indikator penyerapan anggaran sebesar 97,01. Dikalikan dengan bobot 20 untuk indikator penyerapan anggaran sehingga nilai IKPA penyerapan anggaran Bulan Mei Tahun 2025 sebesar 19,40.

4) Belanja Kontraktual

Belanja Kontraktual merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur upaya akselerasi belanja kontraktual pada Satker. Belanja kontraktual dihitung berdasarkan nilai komposit antara nilai kinerja :

a. Komponen akselerasi kontrak dini (bobot 40%)

Dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja atas data perjanjian/kontrak yang proses pengadaan dan perikatannya telah selesai sampai dengan triwulan I dan didaftarkan ke KPPN. Data kontrak yang diterbitkan sampai dengan triwulan I adalah kontrak belanja barang/modal dengan nilai di atas Rp50 juta. Poin yang diberikan untuk kontrak yang tanggal penandatanganan kontraknya dilakukan pada rentang setelah DIPA tahun anggaran berkenaan disahkan sampai dengan sebelum 1 Januari tahun anggaran berkenaan (kontrak dini) adalah sebesar 120. Poin yang diberikan untuk data kontrak yang tanggal penandatanganan kontraknya antara 1 Januari sampai dengan 31 Maret tahun anggaran berkenaan (Kontrak Dini) adalah sebesar 110.

b. Komponen akselerasi belanja modal (bobot 40%)

Dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja atas penyelesaian kontrak belanja modal terhadap seluruh data kontrak belanja modal yang didaftarkan ke KPPN. Penyelesaian kontrak belanja modal yang dimaksud adalah penyelesaian pembayaran atas belanja modal yang dibayarkan sekaligus dengan nilai Rp50 juta ke atas sampai

dengan Rp200 juta. Penyelesaian pembayaran yang dimaksud mengacu pada tanggal SP2D.

Poin yang diberikan untuk setiap penyelesaian kontrak belanja modal yakni :

- 1) Perjanjian/kontrak Belanja Modal yang penyelesaian pembayarannya dilakukan pada triwulan I tahun anggaran berkenaan diberikan poin sebesar 100;
- 2) Perjanjian/kontrak Belanja Modal yang penyelesaian pembayarannya dilakukan pada triwulan II tahun anggaran berkenaan diberikan poin sebesar 90;
- 3) Perjanjian/kontrak Belanja Modal yang penyelesaian pembayarannya dilakukan sampai dengan triwulan III tahun anggaran berkenaan diberikan poin sebesar 80; dan
- 4) Perjanjian/kontrak Belanja Modal yang penyelesaian pembayarannya dilakukan sampai dengan triwulan IV tahun anggaran berkenaan diberikan poin sebesar 70.

c. Komponen distribusi akselerasi kontrak (bobot 20%)

Dihitung berdasarkan rasio jumlah data perjanjian/kontrak yang proses pengadaan dan perikatannya telah selesai sampai dengan triwulan II dan didaftarkan ke KPPN dibagi dengan jumlah data perjanjian/kontrak yang didaftarkan ke KPPN selama tahun anggaran berkenaan. Poin yang diberikan untuk setiap data perjanjian/kontrak diberikan secara bertingkat sesuai dengan rasio jumlah data perjanjian/kontrak yang diterbitkan sampai dengan triwulan II yakni :

- 1) Rasio >75% (nilai 100)
- 2) $50,01\% < \text{Rasio} \leq 75\%$ (nilai 80)
- 3) $25,01\% < \text{Rasio} \leq 50\%$ (nilai 60)
- 4) $0,01\% < \text{Rasio} \leq 25\%$ (nilai 50)
- 5) Rasio = 0% (nilai 0)

Nilai Belanja Kontraktual BBKK Makassar tahun 2024 berdasarkan aplikasi OM SPAN sebesar 100.

Tabel III.25 Parameter Belanja Kontraktual BBKK Makassar Bulan Mei Tahun 2025

No.	Kode Satker	Nama Satker	Kode KPPN	Periode	Komponen Distribusi Akselerasi Kontrak			Komponen Akselerasi Kontrak Dini			Komponen Akselerasi Belanja 53			Nilai
					Jumlah Kontrak	Jumlah Kontrak SMT I	Nilai Komponen	Jumlah Kontrak TW I	Jumlah Kontrak Akselerasi	Nilai Komponen	Jumlah Kontrak Belanja 53	Jumlah Kontrak Akselerasi	Nilai Komponen	
1	416145	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR	136	01	7	9	100.00	5	2	112.86	0	0	0.00	100.00
2	416145	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR	136	02	7	9	100.00	5	2	112.86	0	0	0.00	100.00
3	416145	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR	136	03	7	9	100.00	5	2	112.86	0	0	0.00	100.00
4	416145	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR	136	04	7	9	100.00	5	2	112.86	0	0	0.00	100.00
5	416145	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR	136	05	9	9	100.00	5	2	112.86	0	0	0.00	100.00

Sumber : OM-SPAN 2025

5) Penyelesaian Tagihan

Penyelesaian Tagihan merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu penyampaian SPM LS Kontraktual pada Satker. Indikator kinerja penyelesaian tagihan dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan untuk SPM LS kontraktual terhadap seluruh SPM LS Kontraktual yang diajukan ke KPPN. Penyampaian SPM LS kontraktual yang tepat waktu adalah paling lambat 17 hari kerja dari tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP) sampai dengan tanggal SPM LS kontraktual diterima oleh KPPN pada saat proses konversi. Nilai Penyelesaian tagihan Bulan Mei Tahun 2025 pada aplikasi OM SPAN 100, artinya seluruh SPM LS kontraktual disampaikan dengan tepat waktu ke KPPN.

6) Pengelolaan UP/TUP

Pengelolaan UP dan TUP merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu Pertanggungjawaban UP (GUP) dan Pertanggungjawaban TUP (PTUP) serta efisiensi besaran UP dan TUP yang dikelola dan

penggunaan UP Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Pengelolaan UP dan TUP dihitung berdasarkan nilai dari komponen :

a. Pengelolaan UP dan TUP Tunai (bobot 90%)

Dihitung untuk UP Tunai dan TUP Tunai yang dananya bersumber dari selain PNBK. Pengelolaan UP dan TUP Tunai dihitung berdasarkan nilai komposit dari sub komponen Nilai Kinerja :

(1) Ketepatan waktu (bobot 50%)

(2) Persentase GUP disebulankan (25%)

(3) Setoran TUP (25%)

b. Pengelolaan UP KKP (bobot 10%)

Dihitung untuk penggunaan Kartu Kredit Pemerintah yang dananya bersumber dari Rupiah Murni.

Nilai Pengelolaan UP/TUP BBKK Makassar pada Bulan Mei Tahun 2025 berdasarkan Aplikasi OM-SPAN mendapat nilai 100.

7) Dispensasi SPM

Dispensasi SPM merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kepatuhan Satker dalam menyampaikan SPM sesuai dengan batas waktu penyampaian SPM di akhir tahun anggaran yang diatur dalam ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran.

Indikator dispensasi SPM ini mengalami reformulasi untuk penilaian IKPA tahun 2024, dimana sebelumnya menjadi salah satu indikator yang memiliki bobot 5%, sekarang dihitung diluar komponen nilai IKPA yaitu sebagai pengurang nilai IKPA.

Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN di Triwulan IV.

Pengurangan nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori rasio dispensai SPM sebagai berikut :

- a. Kategori 1 : 0,00 (tidak ada dispensasi SPM) pengurangan nilai 0
- b. Kategori 2 : 0,01 - 0,099 pengurangan 0,25
- c. Kategori 3 : 0,1 – 0,99 pengurangan 0,50
- d. Kategori 4 : 1 – 4,99 pengurangan 0,75
- e. Kategori 5 : $\geq 5,00$ pengurangan 1,00

Hingga akhir Bulan Mei Tahun 2025 belum ada pengurangan nilai karena yang dinilai adalah ada dispensasi SPM di triwulan IV.

8) Capaian Output

Capaian *Output* merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu penyampaian data dan ketercapaian *output* pada Satker. Capaian Output dihitung berdasarkan Nilai Kinerja :

a. Komponen Ketepatan Waktu (30%)

Dihitung berdasarkan jumlah poin yang diperoleh dari ketepatan waktu penyampaian data capaian output paling lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya. Poin yang diberikan untuk setiap RO yang dilaporkan tepat waktu ada sebesar 100 dan yang terlambat adalah sebesar 0.

b. Komponen Capaian RO (70%)

Dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO. Ketentuan target capaian RO adalah periode Januari – November berdasarkan target progress capaian RO (TPCRO), periode Desember berdasarkan target volume RO dalam DIPA dan apabila pada periode Januari – November PCRO yang dilaporkan bernilai 100, maka target yang digunakan adalah target RO dalam DIPA. RO yang dihitung nilai kinerjanya adalah RO dengan status terkonfirmasi.

Nilai Capaian output pada Bulan Mei Tahun 2025 berdasarkan aplikasi OM SPAN adalah sebesar 85,27.

Grafik III.15 Perbandingan target dan realisasi Indikator Ke-5 BBKK Makassar Bulan Mei tahun 2025



Dari grafik III.15 terlihat indikator IKPA dengan realisasi sebesar 95,72 lebih tinggi dibanding dengan target sebesar 90. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu maksimalnya nilai untuk parameter IKPA yaitu : Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, serta Pengelolaan UP dan TUP. Terdapat 2 parameter yang tidak bernilai maksimal yaitu penyerapan anggaran yang bernilai 97,01 dan capaian output dengan nilai 85,27.

Perbandingan realisasi indikator ke-5 BBKK Makassar tahun 2022 sd Bulan Mei Tahun 2025 dapat dilihat dalam grafik III.16

Grafik III.16 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-5 BBKK Makassar tahun 2022, 2023, 2024 dengan Bulan Mei Tahun 2025

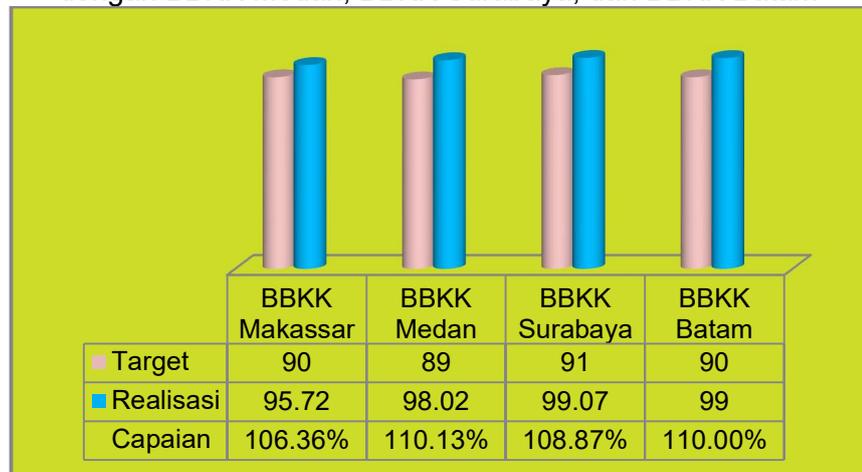


Grafik III.16 terlihat untuk tahun 2022 dan 2023 realisasi indikator ke-5 tidak mencapai target yang ditentukan. Tahun 2022 dan 2023 terdapat 8 parameter perhitungan yang sama dalam penentuan nilai IKPA yaitu revisi DIPA, Deviasi halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP/TUP, Dispensasi SPM dan Capaian Output.

Tahun 2023 realisasi tidak tercapai karena terdapat 4 parameter yang tidak terealisasi secara maksimal yaitu Deviasi halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, dan Pengelolaan UP/TUP, sehingga realisasi hanya bernilai 92,56 mengakibatkan capaian menjadi 99,53%. Melihat realisasi yang tidak tercapai selama tahun 2022 dan 2023, sehingga pada tahun 2024 target diturunkan menjadi 90. Untuk tahun 2024 mencapai nilai 99,88, sehingga ditetapkan target yang sama untuk tahun 2025. Tahun 2025 melebihi target yang telah ditentukan, namun masih berproses sampai akhir tahun 2025.

Grafik III.17 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-5 Bulan Mei Tahun 2025 BBKK Makassar

dengan BBKK Medan, BBKK Surabaya, dan BBKK Batam



Grafik III.17 menggambarkan seluruh BBKK mencapai target, BBKK Surabaya dengan nilai realisasi tertinggi. Untuk BBKK Makassar menetapkan target sama dengan BBKK Batam. BBKK Makassar memperoleh nilai IKPA tersebut karena adanya strategi dan kolaborasi yang mendukung terealisasinya parameter IKPA sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan.

e. Analisa Keberhasilan Kegiatan

- 1) Dilakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran secara berkala;
- 2) Memonitoring masing-masing kegiatan yang mendukung nilai parameter pendukung IKPA sesuai dengan regulasi yang ditetapkan;
- 2) Maksimalisasi pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian target kinerja.

f. Masalah yang dihadapi

- 1) Untuk penyerapan anggaran di IKPA tidak bernilai maksimal karena penarikan data dilakukan pada bulan Mei 2025, sedangkan bobot perhitungan parameter untuk IKPA berdasarkan hasil perhitungan triwulan yang telah ditetapkan sesuai dengan Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

g. Usul pemecahan masalah

- 1) Monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah sesuai bobot target pencapaian nilai IKPA masing-masing parameter.

h. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja dikurang realisasi anggaran kinerja dibagi dengan perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan :

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran kinerja

CKi : Capaian kinerja

RAKi : Realisasi anggaran kinerja

NE : Nilai efisiensi

$$E = \frac{(28.147.798.000 \times 1,06) - 9.688.918.185}{28.147.798.000 \times 1,06} \times 100\%$$

$$E = 67,64\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{67,64}{20} \times 50\right)$$

$$NE = 219,09\%$$

Untuk indikator 5 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.147.798.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.688.918.185,-

serta capaian indikator sebesar 106,36%, sehingga diperoleh efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 67,64%. Dari efisiensi sebesar 10,13% sehingga diperoleh nilai efisiensi 219,09%.

Selain itu efisiensi penggunaan sumber daya juga dipengaruhi beberapa hal, yaitu :

- 1) Koordinasi dan komunikasi yang intens antar timker dan subbag adum untuk memastikan progres pelaksanaan setiap kegiatan baik volume maupun progres keuangan sehingga dapat mengefisienkan sumber daya yang ada.
- 2) Penunjukan petugas khusus untuk konsultasi permasalahan di KPPN per satuan kerja sangat memudahkan untuk melakukan konsultasi kapan dan dimana saja melalui media komunikasi tercepat seperti WA dan telepon.
- 3) Aplikasi D'Tawang untuk mempermudah dan mempercepat dalam proses pencairan pertanggungawaban keuangan di BBKK Makassar.
- 4) Aplikasi Sitopeng memuat data dan informasi terkait proses pengadaan barang/jasa baik secara kontraktual maupun non kontraktual dengan pihak ketiga. Berisi spreadsheet monitoring dan penyimpanan file google drive data arsip pengadaan. Dengan adanya monitoring pengadaan sehingga dapat menjadi warning/alarm apabila terdapat belanja kontraktual yang harus segera dilapor kontrak ke KPPN sehingga tidak terlambat untuk dilaporkan. Selain itu memudahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk memonitor proses pengadaan hingga pencairan anggarannya.

5. INDIKATOR KEENAM

Kinerja Implementasi WBK Satker

Target nilai WBK untuk BBKK Makassar tahun 2025 sebesar 81.

a. Pengertian

WBK merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

b. Definisi Operasional

Perolehan nilai implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Satuan Kerja melalui penilaian mandiri (*self assesment*) yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal (TPI) Kementerian Kesehatan dengan menggunakan lembar kerja evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berlaku.

c. Rumus (cara perhitungan)

Nilai implementasi WBK Satker dihitung dari akumulasi Nilai Total Pengungkit dan Nilai Total Hasil dengan kriteria sebagai berikut :

KOMPONEN	BOBOT
1. Pengungkit	60,00
a) Pemenuhan	30,00
- Pokja I: Manajemen Perubahan	4,00
- Pokja II: Penataan Tatalaksana	3,50
- Pokja III: Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	5,00
- Pokja IV: Penguatan Akuntabilitas	5,00
- Pokja V: Penguatan Pengawasan	7,50
- Pokja VI: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,00
b) Reform	30,00
- Pokja I: Manajemen Perubahan	4,00
- Pokja II: Penataan Tatalaksana	3,50
- Pokja III: Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	5,00

- Pokja IV: Penguatan Akuntabilitas	5,00
- Pokja V: Penguatan Pengawasan	7,50
- Pokja VI: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,00
2. Hasil	40,00
a) Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	22,50
- Nilai Survei Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)	17,50
- Capaian Kinerja Lebih Baik daripada Capaian Kinerja Sebelumnya	5,00
b) Pelayanan Publik yang Prima	17,50
Nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)	17,50

Adapun pengukuran capaian indikator Kinerja Implementasi WBK Satker ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi Nilai WBK}}{\text{Target Nilai WBK}} \times 100\%$$

d. Capaian Kinerja

Nilai Kinerja Implementasi WBK BBKK Makassar Tahun 2024 diambil berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Hasil Assesment Tim Penilai Internal (TPI) Kementerian Kesehatan RI pada Tanggal 22-25 Juli 2024 dengan Nilai 86,94. Hasil ini memenuhi syarat sehingga diusulkan sebagai satker menuju WBK Nasional ke Kementerian PAN RB. Sebelumnya, telah dilakukan pendampingan dan assesment dari Itjen Kemenkes RI dan Unit Utama Ditjen P2P. Selanjutnya dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN) dari Kemenpan RB yaitu pada tanggal 07 Oktober 2024 untuk sesi wawancara yang dilakukan secara virtual dan pada tanggal 07 November 2024 dilaksanakan verifikasi faktual dan peninjauan lapangan. Hasilnya BBKK Makassar mendapatkan predikat sebagai satker menuju WBK tingkat nasional. Piagam

penghargaan diserahkan oleh Menpan RB kepada Kepala BBKK Makassar pada tanggal 10 Desember 2024 di Jakarta pada acara “satu dekade zona integritas dan penganugerahan zona integritas menuju WBK/WBBM tahun 2024”.

Adapun nilai implementasi WBK BBKK Makassar Tahun 2024 dapat dijelaskan sesuai dengan nilai pemenuhan dan reform pada tabel III.29 berikut ini :

Tabel III.26 Pengukuran Kinerja Indikator Kinerja Implementasi WBK BBKK Makassar Semester I Tahun 2025

Area Perubahan		Bobot	Pemenuhan	Reform	Nilai	%
A. PENGUNGKIT		60.00				
	1. MANAJEMEN PERUBAHAN	8.00	3.88	4.00	7.88	98.45%
	2. PENATAAN TATALAKSANA	7.00	3.00	3.33	6.33	90.48%
	3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	10.00	4.52	4.25	8.77	87.73%
	4. PENGUATAN AKUNTABILITAS	10.00	5.00	4.75	9.75	97.50%
	5. PENGUATAN PENGAWASAN	15.00	5.93	6.88	12.80	85.36%
	6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	10.00	4.74	3.22	7.95	79.54%
	TOTAL PENGUNGKIT				53.49	89.15%
B. HASIL		40.00				
I. BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL		22.50			17.24	76.63%
	a. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal :	17.50			15.99	91.38%
	b. Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja	5.00			1.25	25.00%
II. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA		17.50			16.21	92.63%
	- Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal :	17.50			16.21	92.63%
	TOTAL HASIL				33.45	83.63%
NILAI EVALUASI ZONA INTEGRITAS					86.94	

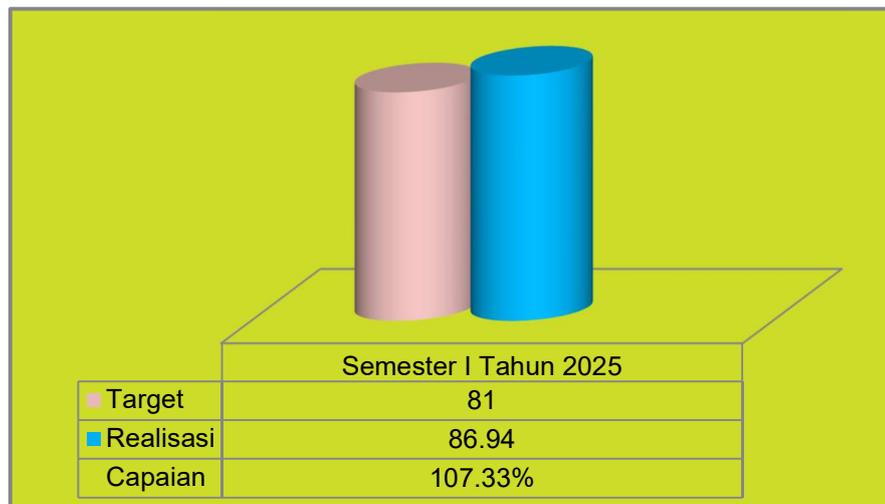
Dari tabel III.26 dapat diperoleh realisasi nilai implementasi WBK BBKK Makassar Tahun 2024 adalah sebesar 86,94, dengan persentase capaian indikator pada rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi Nilai WBK}}{\text{Target Nilai WBK}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{86,9}{81} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Capaian} = 107,33\%$$

Grafik III.18 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Ke-6 BBKK Makassar Semester I Tahun 2025



Grafik III.18 terlihat indikator ini terealisasi dengan realisasi nilai implementasi WBK BBKK Makassar Semester I Tahun 2025 adalah sebesar 86,94 lebih tinggi dibanding dengan target sebesar 81. Nilai Kinerja Implementasi WBK BBKK Makassar Semester I Tahun 2025 diperoleh dari hasil assessment Tim Penilai Internal (TPI) Kementerian Kesehatan RI pada Tanggal 22-25 Juli 2024 sebagai proses pendampingan BBKK Makassar yang diusulkan sebagai satker berpredikat WBK Nasional dan pada tanggal 6 sd 7 November 2024 BBKK Makassar mendapatkan kunjungan dari Tim Penilai Nasional Kementerian PANRB.

Grafik III.19 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-6 BBKK Makassar Tahun 2022, 2023, 2024, dan Semester I Tahun 2025

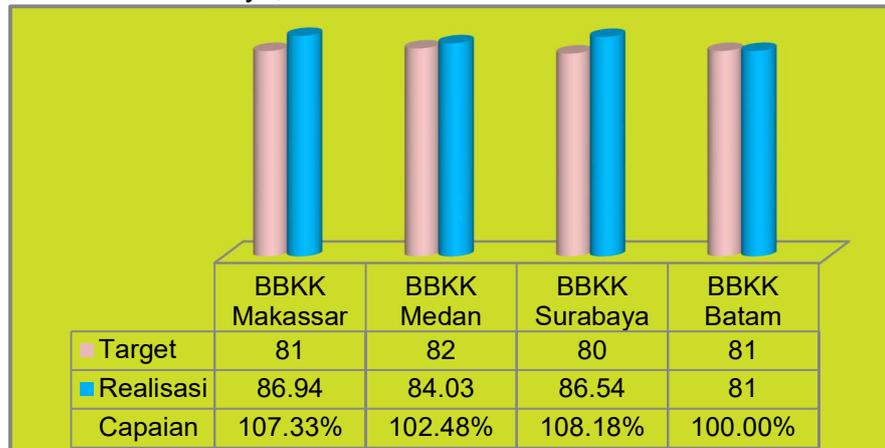


Grafik III.19 menggambarkan bahwa untuk tahun 2022-Semester I Tahun 2025 realisasi indikator berada di atas target yang telah

ditentukan. Untuk tahun 2020 implementasi WBK dijadikan sebagai salah satu indikator capaian kinerja, BBKK Makassar melalui berbagai tahap mulai dari pendampingan, pengawasan, *self assesment*, *pre assesment* sampai ke tahap Penilaian oleh Tim Penilai Internal Kemenkes RI berhasil meraih predikat menuju WBK satker dengan nilai 81,46 sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/6590/2020. Dari nilai tersebut melampaui target indikator yang ditetapkan. Nilai ini masih dijadikan sebagai dasar penilaian indikator keenam pada tahun 2022. Namun pada tahun 2022 target ditingkatkan sebesar 81, merujuk dari realisasi pada tahun 2021, begitu pula dengan target pada tahun 2023 yang masih sebesar 81 dengan realisasi sebesar 81,46 berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Hasil Desk Tim Eselon I Ditjen P2P Kementerian Kesehatan RI Pada Tanggal 29 November 2023. Untuk tahun 2024 berlanjut dengan diusulkannya BBKK Makassar menjadi satker berpredikat WBK Nasional. Untuk hal tersebut dibutuhkan pendampingan dari Tim Itjen dan P2P Kemenkes. Pada tanggal 13 Juni 2024 dilaksanakan *assessment* oleh Tim Itjen Kemenkes sehingga memperoleh nilai sebesar 82,19. Dan pada tanggal 22-25 Juli 2024 diadakan *assessment* penilaian oleh TPI Kemenkes RI sehingga diperoleh nilai 86,94. Dari nilai tersebut merupakan proses BBKK Makassar menuju WBK berpredikat nasional di tahun 2024, selanjutnya dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN) dari Kemenpan RB yaitu pada tanggal 07 Oktober 2024 untuk sesi wawancara yang dilakukan secara virtual dan pada tanggal 07 November 2024 dilaksanakan verifikasi faktual dan peninjauan lapangan. Pada tanggal 10 Desember 2024 di Jakarta pada acara “satu dekade zona integritas dan penganugerahan zona integritas menuju WBK/WBBM tahun 2024” BBKK Makassar memperoleh penghargaan satuan kerja berpredikat WBK Nasional dan WBK Kawasan khusus Kawasan Pelabuhan.

Grafik III.20 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-6
BBKK Makassar dengan BBKK Medan,

BBKK Surabaya, dan BBKK Batam Semester I Tahun 2025



Dari grafik III.20 terlihat dari keempat BBKK realisasi terbesar berada di BBKK Makassar, selanjutnya BBKK Makassar diurutan kedua. BBKK Surabaya, BBKK Medan dan BBKK Batam diusulkan menjadi satker berpredikat WBK Nasional. Untuk BBKK Makassar hasil pendampingan TPI pada tanggal 22-25 Juli 2024 memperoleh nilai 86,94, dan sebagai proses menuju pendampingan selanjutnya oleh TPN. Dan pada tanggal 10 Desember 2024 di Jakarta pada acara “satu dekade zona integritas dan penganugerahan zona integritas menuju WBK/WBBM tahun 2024” BBKK Makassar memperoleh penghargaan satuan kerja berpredikat WBK Nasional dan WBK Kawasan khusus Kawasan Pelabuhan. Untuk BBKK Denpasar dan BBKK Surabaya juga berhasil meraih predikat WBK Nasional.

e. Analisis Keberhasilan Kegiatan

- 1) Kontribusi masing-masing kelompok kerja yang telah ditetapkan di dalam SK Kepala BBKK Makassar tentang Pembangunan Zona Integritas
- 2) Keikutsertaan seluruh pegawai, baik itu ASN maupun PPNPN dalam mewujudkan pembangunan zona integritas
- 3) Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala sehingga pembangunan zona integritas dapat berjalan secara berkesinambungan

- 4) Pendampingan dari Tim P2P dan Tim Itjen Kemenkes untuk pembangunan zona integritas
 - 5) Dukungan lintas sektor yang sangat antusias dalam mewujudkan zona integritas
 - 6) Pembangunan zona integritas kawasan pelabuhan dan bandara yang menjadikan motivasi dalam mewujudkan pembangunan Zona Integritas di BBKK Makassar
- f. Masalah yang dihadapi
- 1) Pengembangan inovasi dengan menggunakan sistem IT yang membutuhkan anggaran khusus dalam pengembangan tersebut
 - 2) Reviu SOP sebagai regulasi dalam pelaksanaan kegiatan belum dilakukan untuk semua SOP
 - 3) Regulasi dari lintas sektor yang berhubungan dengan tugas dan fungsi BBKK Makassar yang kadang berubah tanpa adanya sosialisasi kepada pengguna jasa.
 - 4) Belum ada menu rincian output (RO) kegiatan pembangunan zona integritas dalam petunjuk perencanaan Ditjen P2P sehingga tidak ada anggaran spesifik untuk mendukung pembangunan zona integritas.
 - 5) Perubahan kebijakan tingkat nasional yang berdampak pada perubahan tata kelola organisasi dan kebijakan operasional ditingkat satuan kerja seperti perubahan nomenklatur, perubahan pakaian dinas, perubahan kebijakan layanan publik dalam tata kelola vaksinasi.
- g. Usul pemecahan masalah
- 1) Perlu dianggarkan terkait pengembangan inovasi dalam mendukung sistem operasional perkantoran serta mendukung pelayanan kepada pengguna jasa BBKK Makassar
 - 2) Perlu adanya reviu terhadap seluruh SOP secara berkala sesuai dengan kondisi yang ada

- 3) Perlu adanya komitmen dan sosialisasi terhadap regulasi yang diterbitkan, sehingga tidak ada benturan terhadap pengguna layanan.

h. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja dikurang realisasi anggaran kinerja dibagi dengan perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan :

- E : Efisiensi
 PAKi : Pagu anggaran kinerja
 CKi : Capaian kinerja
 RAKi : Realisasi anggaran kinerja
 NE : Nilai efisiensi

$$E = \frac{(32.302.000 \times 1,07) - 0}{32.302.000 \times 1,07} \times 100\%$$

$$E = 100\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{100}{20} \times 50\right)$$

$$NE = 300\%$$

Untuk indikator 6 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 32.302.000,- dan realisasi anggaran masih nihil serta capaian indikator sebesar 107,33%, sehingga diperoleh efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 100% dan nilai efisiensi sebesar 300%.

Selain itu efisiensi penggunaan sumber daya juga dipengaruhi beberapa hal, yaitu :

Adanya pengembangan inovasi aplikasi Simpelta, Siska, dan Langsung Digital, Sehat Care, Emfire, D'Tawang, SiTopeng, Pasolle serta saluran pengaduan yang memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan layanan dari BBKK Makassar.

6. INDIKATOR KETUJUH

Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya

Indikator persentase peningkatan kapasitas ASN merupakan indikator yang mengukur seberapa besar persentase ASN dalam peningkatan kapasitasnya. Untuk tahun 2025 target untuk persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya sebesar 90%.

a. Pengertian

Indikator persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya merupakan indikator yang mengukur seberapa besar persentase ASN yang telah melaksanakan peningkatan kapasitas sebanyak paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran yang disingkat menjadi JP berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilaksanakan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam satu tahun.

b. Definisi Operasional

ASN yang ditingkatkan kompetensinya paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam satu tahun dan dapat dilaksanakan pada tingkat instansi maupun nasional.

c. Rumus (cara perhitungan)

Pengukuran realisasi jumlah ASN yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dibagi jumlah seluruh ASN dikali 100%, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya Sebanyak Paling Sedikit 20 Jam Pelajaran}}{\text{Jumlah Seluruh ASN KKP Kelas I Makassar}} \times 100\%$$

Adapun pengukuran capaian indikator ketujuh ini yaitu persentase realisasi jumlah ASN yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dibagi dengan persentase target indikator ketujuh dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Persentase Realisasi Jumlah ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya Sebanyak Paling Sedikit 20 Jam Pelajaran}}{\text{Persentase Target Indikator}} \times 100\%$$

d. Capaian Kinerja

Pada tabel III.30 di bawah ini dijabarkan jumlah ASN BBKK Makassar yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran pada tahun 2024.

Tabel III.27 Jumlah ASN BBKK Makassar yang Ditingkatkan Kompetensinya Sebanyak Paling Sedikit 20 (Dua Puluh) Jam Pelajaran Semester I Tahun 2025

No	Nama	Jenis Peningkatan Kompetensi				Jumlah JP Dalam Satu Tahun	Pemenuhan 20 (dua puluh) JP Pengembangan Kompetensi Per Tahun
		Pelatihan Teknis	Seminar/Konferensi	Sosialisasi	e-Learning		
1	dr. MARSELINA SILI PAPU, MPH	0	11	0	15.3	26.3	Terpenuhi

No	Nama	Jenis Peningkatan Kompetensi				Jumlah JP Dalam Satu Tahun	Pemenuhan 20 (dua puluh) JP Pengembangan Kompetensi Per Tahun
		Pelatihan Teknis	Seminar/Konferensi	Sosialisasi	e-Learning		
2	dr. Achmad Farchanny Tri Adryanto, MKM	0	11	0	26	39	Terpenuhi
3	dr. WAHJU VIVA IRIANAWATI	0	7	0	13	20	Terpenuhi
4	NIRWAN, SKM, M.Kes	0	7	0	20	27	Terpenuhi
5	Dra. AISYAH SUFRIE, MSc. PH	0	0	0	41	41	Terpenuhi
6	EGO, SKM, M.Kes	0	0	0	19	33	Terpenuhi
7	HASTAWAVIA, SKM	0	6	0	21	27	Terpenuhi
8	dr. MUH. HASKAR HASAN, M.Kes	0	5.8	0	19	24.8	Terpenuhi
9	H. ANDI ALI RESA, SKM, M.Kes	0	4	0	42	46	Terpenuhi
10	drg. ARIFA SETIANI THAMRIN, M.Kes	0	20	0	0	44	Terpenuhi
11	dr. RIDHA ILAHI	35	0	0	13	51.3	Terpenuhi
12	dr. HJ. JUNIARTY NAIM	42	0	0	0	42	Terpenuhi
13	dr. HJ. TRI HANDAYANI NAIM	0	15	0	7	22	Terpenuhi
14	dr. HJ. RINI ASTUTY	0	9	0	5	21.5	Terpenuhi
15	dr. NURLAILAH MUHYIDDIN	0	10	4	10	24	Terpenuhi
16	Drs. S E R D I, SKM	0	3	0	19	22	Terpenuhi
17	IBRAHIM, SKM, M.Kes	0	0	0	23	23	Terpenuhi
18	HJ. NUR MAGFIRAH, SKM, M.Kes	0	11	0	19	30	Terpenuhi
19	H. TUBIANTO ANANG ZULFIKAR, SKM, M.Epid	0	4	0	19	23	Terpenuhi
20	H. NUR KAMAR, SKM, M.Kes	22	7	0	28	57	Terpenuhi

No	Nama	Jenis Peningkatan Kompetensi				Jumlah JP Dalam Satu Tahun	Pemenuhan 20 (dua puluh) JP Pengembangan Kompetensi Per Tahun
		Pelatihan Teknis	Seminar/Konferensi	Sosialisasi	e-Learning		
21	dr. H. ABBAS ZAVEY NURDIN , Sp.Ok, MKK	35	0	0	0	35	Terpenuhi
22	dr. HJ. FITRIAH	0	3	0	19	22	Terpenuhi
23	HJ. SITTI HAMDIA, SKM., M.Kes	2.5	6.8	0	24	37.3	Terpenuhi
24	SITTI RAHMATIA, SKM	0	7.5	3	10	20.5	Terpenuhi
25	YUSFANDIAR	0	17	0	8	25	Terpenuhi
26	ABD. GANI BUATAN, SKM	7	11	0	21	41	Terpenuhi
27	ARNI ANGRANY AMIR, ST	0	10	0	10	20	Terpenuhi
28	PATMAWATY, SE	0	8	0	14	22	Terpenuhi
29	MARDIYANA, SKM, M.Adm.Kes	0	2	0	26	28	Terpenuhi
30	MARYAM, S. Kep, Ns	0	6	0	14	20	Terpenuhi
31	HJ. ZAINAB, AMK	35	11	0	0	46	Terpenuhi
32	SYAHRUL, ST	36	12	0	0	58	Terpenuhi
33	H. ARHAM ALAM, S.Kep, Ners, M.KKK	7	13	0	5.5	25.5	Terpenuhi
34	dr. HJ JUMARNI	35	4	0	0	39	Terpenuhi
35	HJ. SATRIANI, SKM	0	2	0	21	23	Terpenuhi
36	HJ. DELIA ROSIDAH, SKM, M.Kes	0	3	0	19	22	Terpenuhi
37	dr. HJ. SRI APRIANITA	0	12	0	13	25	Terpenuhi
38	ANDI KUDRAT, SKM	0	2	0	22	24	Terpenuhi
39	HJ. MASRIANI, S.Kep, Ns	0	0	0	21	21	Terpenuhi
40	dr. RUSLAN	35	0	0	0	35	Terpenuhi
41	dr. NAJRIAH NASIR	21	22	0	2	45	Terpenuhi
42	dr. ANDI PERTIWIKUSUMA	35	0	0	0	35	Terpenuhi
43	ABDUL RAHMAN MUSTAFA, SKM	0	8	3	10	21	Terpenuhi

No	Nama	Jenis Peningkatan Kompetensi				Jumlah JP Dalam Satu Tahun	Pemenuhan 20 (dua puluh) JP Pengembangan Kompetensi Per Tahun
		Pelatihan Teknis	Seminar/Konferensi	Sosialisasi	e-Learning		
44	IDIL RAKHMAN, SE	0	0	0	24	24	Terpenuhi
45	dr. ANDI IRFAN LATIF	35	0	0	0	35	Terpenuhi
46	HELPI SOPIAN MOKODOMPIT, SKM	2.5	0	0	26	28.5	Terpenuhi
47	RIZAL, SKM	0	12	7	2	21	Terpenuhi
48	NURDIANSAH SAHRIR, SKM	0	5	6	10	21	Terpenuhi
49	KARYADI EKA PUTRA, SKM	0	0	0	24	24	Terpenuhi
50	H. RIDWAN, SKM	0	0	0	35	35	Terpenuhi
51	NINING AYU PURNAMA, S.Kom	0	21	0	57	78	Terpenuhi
52	HJ. DIANA ABDULLAH, S.Kep, Ns	22	0	0	0	22	Terpenuhi
53	MIRNAWATY, S.ST	0	0	0	21	21	Terpenuhi
54	H.MAHLI SUNUSI, SKM	0	0	0	24	24	Terpenuhi
55	YURIS ARTHA ROMBE ADA, S.K.M	7	0	0	21	28	Terpenuhi
56	HJ. FATMAWATI SALIM, SKM	0	3	0	16	21	Terpenuhi
57	H. RAJIMAN, AMd.KL	0	0	0	24	24	Terpenuhi
58	YULIANA SIRAJUDDIN, AMAK	0	12.5	0	23.5	36	Terpenuhi
59	YUSRAN, S.Kom	0	0	0	35	35	Terpenuhi
60	dr. BONITA SESHARIKA C	4	15	0	10	29	Terpenuhi
61	GERARDHA SUMALU, S.Kep	0	15	0	21	36	Terpenuhi
62	IRHAM, SKM	0	27	0	0	27	Terpenuhi
63	ARFIANI, SKM	0	10	2	14	26	Terpenuhi
64	NURHAYATI HL, SKM	7	3	3	8	21	Terpenuhi
65	MUSDALIFA M, AMKL	0	6	3	22	31	Terpenuhi
66	SUARNI S, AMK	35	0	0	0	35	Terpenuhi

No	Nama	Jenis Peningkatan Kompetensi				Jumlah JP Dalam Satu Tahun	Pemenuhan 20 (dua puluh) JP Pengembangan Kompetensi Per Tahun
		Pelatihan Teknis	Seminar/Konferensi	Sosialisasi	e-Learning		
67	HILDA ADRIATI MALIK, SKM	7	12	3	35	63	Terpenuhi
68	H. AMIR, S.Kep., Ners.	35	0	0	0	35	Terpenuhi
69	AMRIANA AMIN, SE	0	2	0	46	48	Terpenuhi
70	HJ. MUTHMAINNAH, S.Kep., Ners.	0	8	4	13	25	Terpenuhi
71	RINA VIRGIANA THAMRIN, S.Tr.KL	0	7	0	19	28	Terpenuhi
72	RISKA, AMAK	31	9	0	0	40	Terpenuhi
73	DIAN PURNITA, SKM	31	3	3	14	51	Terpenuhi
74	AKBAR HAPID, S.Farm	0	0	0	24	24	Terpenuhi
75	HJ. FITRIANI JAYA, S.Kep, Ners	0	25.8	0	20	47.8	Terpenuhi
76	ANUGRAYANTI, S.Tr.KL	28	7	0	6.7	41.7	Terpenuhi
77	H. CHANDRA WAHYUDDIN, AMK	35	3	0	0	38	Terpenuhi
78	MARIA VERONIKA AMBABUNGA, SKM	0	0	0	21	21	Terpenuhi
79	H. WAHYUDI HIDAYAT, S.Kep, Ners	0	10	0	5.5	22	Terpenuhi
80	HARMAWAN, AMd.KL	0	42.8	0	10	52.8	Terpenuhi
81	NUR SAID RAIS, S.K.M.	0	14	0	21	35	Terpenuhi
82	FATIMAHSARI, S.Tr.Kes	0	20	0	0	20	Terpenuhi
83	RENY MARLINA, S.Kep., Ners	35	0	0	0	35	Terpenuhi
84	HARINA, A.Md.KL	0	6	3	17	26	Terpenuhi
85	NURSAKTI SAPUTRA, A.Md.KL	0	0	4	24	28	Terpenuhi
86	DESI MARLINA, A.Md.KL, SKM	7	22.8	0	14	45.8	Terpenuhi
87	ASTRI EKA WARDANI, AMd.Kep	0	30	0	0	30	Terpenuhi

No	Nama	Jenis Peningkatan Kompetensi				Jumlah JP Dalam Satu Tahun	Pemenuhan 20 (dua puluh) JP Pengembangan Kompetensi Per Tahun
		Pelatihan Teknis	Seminar/Konferensi	Sosialisasi	e-Learning		
88	FATHUL JANNAH, AMd.Kep	10	13	0	0	30	Terpenuhi
89	ILHAM, AMK	0	11	0	14	25	Terpenuhi
90	ISMAINAR, AMK	0	13	0	3	21	Terpenuhi
91	SYAMSURI, AMd. Kep	0	27.3	0	0	27.3	Terpenuhi
92	SRI WAHZUNI, AMK	0	13	0	24	37	Terpenuhi
93	SUHERMAN, AMK	0	5	0	21	26	Terpenuhi
94	ASRI, AMK	16	6	0	0	22	Terpenuhi
95	ADIL NIRWANDI	22	12	3	39	78	Terpenuhi
96	SURAHMAN SYAM	0	5	0	18	25	Terpenuhi
97	AULIA MAGHFIRAH	0	0	0	26	26	Terpenuhi
98	URBA AMELIA	0	0	0	35	35	Terpenuhi
99	HIDAYANI SUTARDI	22	7	0	13	42	Terpenuhi
100	Ns. AHMAD RUSIDANI	0	8.6	0	24	32.6	Terpenuhi
Jumlah Jam Pelajaran Berdasarkan Jenis		739	764	51	1544	3200.7	

tabel III.27 di atas, diketahui bahwa jumlah ASN BBKK Makassar pada Semester I Tahun 2025 adalah sebanyak 137 orang dan jumlah ASN yang telah ditingkatkan kompetensinya paling sedikit 20 (dua puluh) JP adalah sebanyak 100 orang. Dengan demikian persentase capaian indikator ketujuh dituangkan pada rumus sebagai berikut :

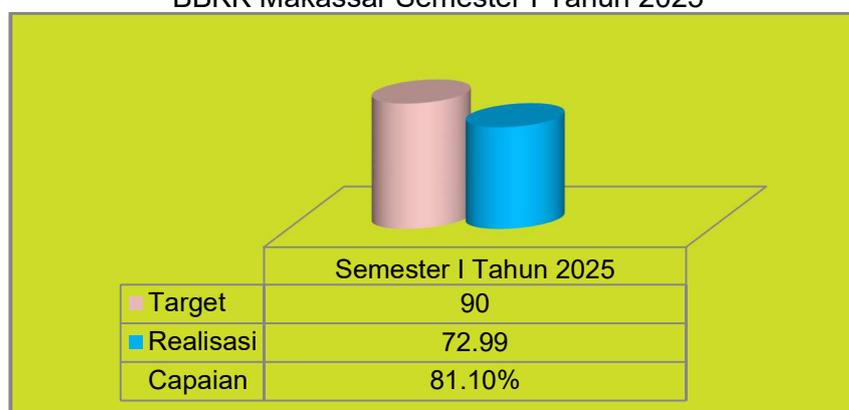
$$\begin{aligned}
 & \text{Jumlah ASN yang Ditingkatkan} \\
 & \text{Kompetensinya} \\
 & \text{Sebanyak Paling Sedikit} \\
 & \text{20 Jam Pelajaran} \\
 \text{Persentase} &= \frac{\text{Jumlah Seluruh ASN}}{\text{KKP Kelas I Makassar}} \times 100\% \\
 \text{Persentase Realisasi} &= \frac{100}{137} \times 100\%
 \end{aligned}$$

Persentase Realisasi = 72,99%

Setelah diperoleh hasil persentase dari pengukuran di atas, dapat diperoleh persentase capaian indikator ketujuh ini, dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \textbf{Persentase Realisasi Jumlah ASN} \\ & \textbf{yang Ditingkatkan} \\ & \textbf{Kompetensinya} \\ & \textbf{Sebanyak Paling Sedikit} \\ & \textbf{20 Jam Pelajaran} \\ \text{Capaian} &= \frac{\text{Persentase Target Indikator}}{\text{Persentase Target Indikator}} \times 100\% \\ \text{Capaian} &= \frac{72,99\%}{90\%} \times 100\% \\ \text{Capaian} &= 81,10\% \end{aligned}$$

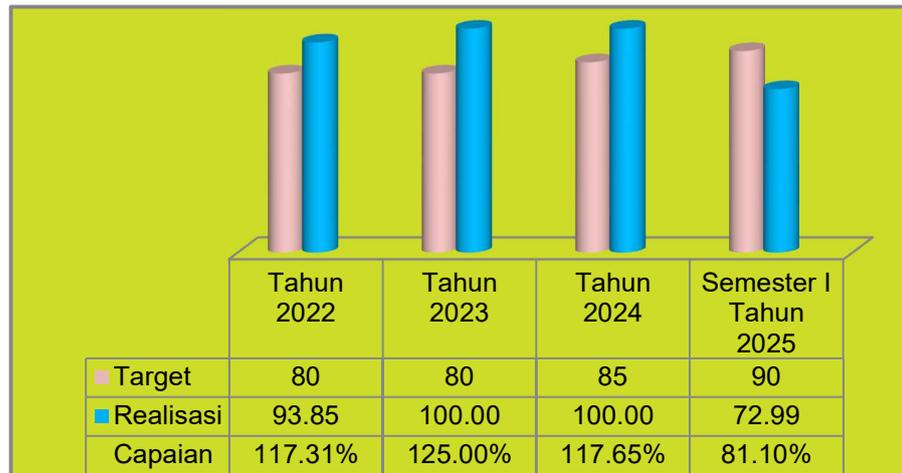
Grafik III.21 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Ke-7 BBKK Makassar Semester I Tahun 2025



Dari grafik III.21 terlihat realisasi IKK belum mencapai target yang telah ditentukan. Peningkatan kapasitas pada tahun 2025 dilakukan dengan cara tatap muka dan dalam jaringan (daring). Informasi pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas sangat mudah diperoleh dan fleksibel untuk diikuti. Peningkatan kapasitas dengan daring masih menjadi keuntungan yang maksimal bagi ASN karena tanpa biaya pelaksanaan, kegiatan tersebut dapat diikuti. Untuk realisasi tahun 2024 dengan realisasi sebesar 100%, maka di tahun 2025 targetnya ditingkatkan menjadi 90%. Untuk Semester I Tahun

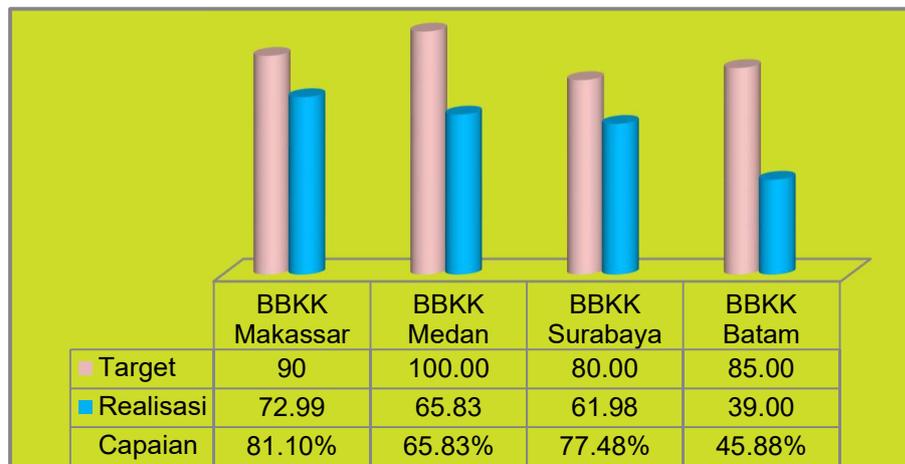
2025 jumlah ASN yang telah mendapatkan peningkatan kompetensi minimal 20 JPL sebanyak 100 orang, berarti masih terdapat 37 orang ASN yang belum mencukupi 20 JPL.

Grafik III.22 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-7 BBKK Makassar Tahun 2022, 2023, 2024, dan Semester I Tahun 2025



Dari grafik III.22 terlihat target untuk tahun 2025 naik dibanding target 2024, karena realisasi di tahun 2024 yang bernilai 100%. Untuk semester I Tahun 2025 sudah terealisasi sebesar 72,99 atau 100 orang ASN telah mendapatkan peningkatan kompetensi minimal 20 JPL.

Grafik III.23 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-7 BBKK Makassar dengan BBKK Medan, BBKK Surabaya dan BBKK Batam Semester I Tahun 2025



Berdasarkan Grafik III.23 terlihat bahwa ke 4 BKK belum terealisasi 100%, artinya masih terdapat ASN BBKK yang belum memenuhi 20 JPL Peningkatan kompetensi. Peningkatan kapasitas ASN sangat fleksibel dapat dilakukan secara daring tanpa menggunakan anggaran, sehingga realisasi tercapainya kegiatan ini sangat maksimal. Untuk realisasi terbesar pada BBKK Makassar.

e. Analisis Keberhasilan Kegiatan

- 1) Anggaran yang tersedia baik di substansi teknis maupun dukungan manajemen untuk peningkatan kapasitas ASN sangat mendukung;
- 2) Informasi yang diperoleh terkait peningkatan kapasitas sangat mudah didapatkan, baik melalui undangan secara *online*, via email kantor, WA grup sesuai dengan kompetensi masing-masing ASN;
- 3) ASN BBKK Makassar sebagian besar adalah pejabat fungsional tertentu sehingga membutuhkan angka kredit dalam peningkatan kompetensi.
- 4) Peningkatan kapasitas ASN mendukung tercapainya target Perjanjian Kinerja Kepala Kantor dengan Pejabat Eselon I.

f. Masalah yang dihadapi

- 1) Peningkatan kapasitas ASN via online mempunyai kelemahan karena peserta Webinar yang cukup banyak, dengan

keterbatasan jaringan sehingga kadang materi yang disampaikan kurang maksimal dipahami oleh peserta Webinar

- 2) Distribusi ASN dalam peningkatan kapasitas belum merata.
- 3) Peningkatan kapasitas ASN kebanyakan dari bagian teknis, sehingga kadang peningkatan kapasitas yang diikuti tidak relevan dengan kompetensi ASN tersebut

g. Usul pemecahan masalah

- 1) Peningkatan kapasitas ASN secara online dapat dibuat secara bergelombang, sehingga optimalisasi pelaksanaan peningkatan kapasitas via online dapat lebih maksimal;
- 2) Usulan peningkatan kapasitas ASN substansi harus dibuat secara berkala dan dibuatkan TNA, sehingga peningkatan kapasitas dapat merata untuk setiap ASN.
- 3) Perlu adanya monitoring dan evaluasi terhadap peningkatan kapasitas ASN terkait kompetensi jabatan masing-masing ASN.

h. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja dikurang realisasi anggaran kinerja dibagi dengan perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan :

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran kinerja

CKi : Capaian kinerja

RAKi : Realisasi anggaran kinerja

NE : Nilai efisiensi

$$E = \frac{(248.719.000 \times 0,81) - 10.491.200}{248.719.000 \times 0,81} \times 100\%$$

$$E = 94,80\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{94,80}{20} \times 50\right)$$

$$NE = 287\%$$

Untuk indikator 7 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 248.719.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.491.200,- serta capaian indikator sebesar 81,10%, sehingga diperoleh efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 94,80%, sehingga nilai efisiensinya 287%.

Selain itu efisiensi penggunaan sumber daya juga dipengaruhi beberapa hal, yaitu :

- 1) Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas secara daring, tanpa membutuhkan anggaran biaya pelaksanaan.
- 2) Mengikuti peningkatan kapasitas yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan LMS

8. Indikator Kedelapan

Persentase Realisasi Anggaran

Target Persentase Realisasi Anggaran sebesar 96%.

a. Pengertian

Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasinya yang menunjukkan ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan perundang-undangan.

b. Definisi Operasional

Penyerapan anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran satker dalam satu tahun anggaran.

Persentase realisasi anggaran BBKK Makassar Tahun 2025 diambil dari Laporan Realisasi Anggaran Aplikasi OM SPAN Kementerian Keuangan RI.

c. Rumus (cara perhitungan)

Pengukuran persentase realisasi anggaran dihitung berdasarkan jumlah realisasi anggaran belanja dibagi dengan jumlah keseluruhan pagu anggaran dikali 100%, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Jumlah Keseluruhan Pagu Anggaran}} \times 100\%$$

Adapun pengukuran capaian indikator kedelapan ini yaitu persentase realisasi anggaran dibagi dengan persentase target indikator kedelapan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Persentase Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Persentase Target Indikator}} \times 100\%$$

d. Capaian Kinerja

Pada pengukuran kinerja indikator kedelapan, Persentase Realisasi Anggaran diambil dari Aplikasi OM SPAN Kemenkeu RI, sebagaimana dalam *screenshot* gambar III.5 di bawah ini :

PAGU DAN REALISASI BELANJA

Bulan : 01 s.d. 05

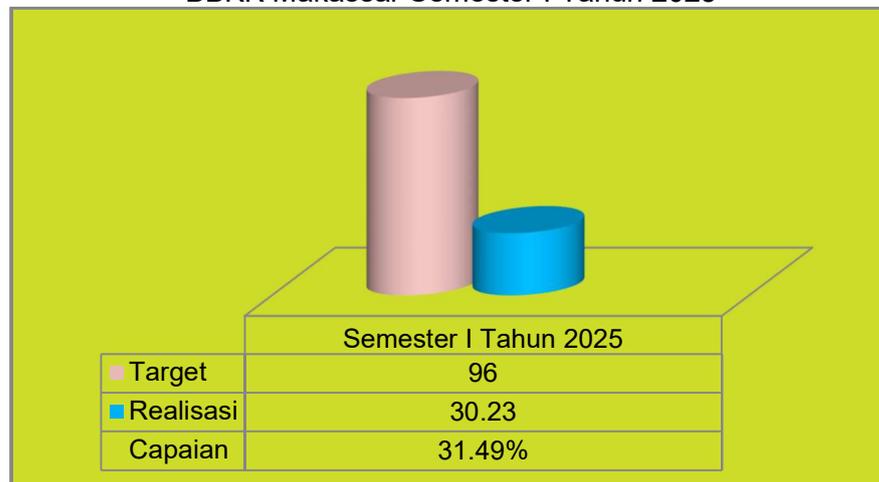
No	BA-Satker	Nama Satker	KPPN	Ket	Jenis Belanja									Total	
					Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-lain	Transfer		
1	024-416145	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR	136	PAGU	20,229,357,000	12,007,042,000	554,532,000	0	0	0	0	0	0	32,790,931,000	
				REALISASI	7,969,798,720	1,834,403,915	108,150,000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9,912,352,635	
					(39.40%)	(15.28%)	(19.50%)							(30.23%)	
					SISA	12,259,558,280	10,172,638,085	446,382,000	0	0	0	0	0	0	22,878,578,365
TOTAL					PAGU	20,229,357,000	12,007,042,000	554,532,000	0	0	0	0	0	32,790,931,000	
					REALISASI	7,969,798,720	1,834,403,915	108,150,000	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	9,912,352,635	
					PERSENTASE	(39.40%)	(15.28%)	(19.50%)							(30.23%)
					SISA	12,259,558,280	10,172,638,085	446,382,000	0	0	0	0	0	22,878,578,365	

Gambar III.5 Screenshot Persentase Realisasi Anggaran BBKK Makassar

Berdasarkan gambar III.3 di atas, realisasi anggaran BBKK Makassar Bulan Mei Tahun 2025 sebesar 30,23%, dengan persentase capaian indikator pada rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Persentase Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Persentase Target Indikator}} \times 100\% \\
 \text{Capaian} &= \frac{30,23\%}{96\%} \times 100\% \\
 \text{Capaian} &= 31,49\%
 \end{aligned}$$

Grafik III.24 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Ke-8 BBKK Makassar Semester I Tahun 2025



Dari grafik III.24 terlihat realisasi tercapai dari target indikator kinerja yang telah ditentukan. Realisasi anggaran sebesar 20,23% dengan target sebesar 96%. Terdapat kebijakan efisiensi anggaran sehingga kegiatan tidak berjalan sesuai dengan RPK dan RPD yang telah ditetapkan, sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan diatur kembali sesuai dengan anggaran perjalanan dinas yang masih bisa digunakan.

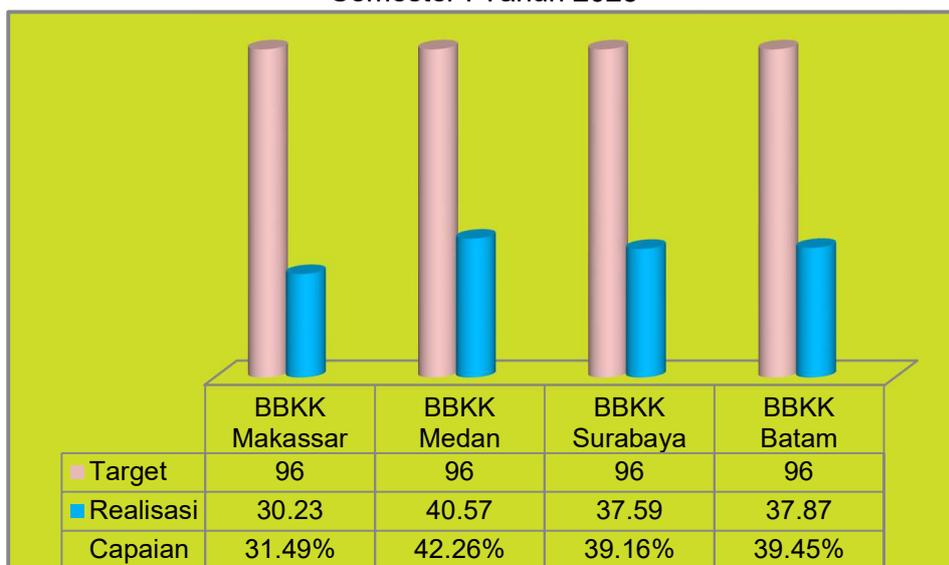
Grafik III.25 Perbandingan Realisasi Anggaran dengan Pagu Anggaran BBKK Makassar tahun 2022, 2023, 2024,

dan Semester I Tahun 2025



Dari grafik III.25 dapat dilihat realisasi anggaran terbesar pada tahun 2024. Target untuk tahun 2025 sama dengan tahun 2024. Realisasi masih sangat rendah karena adanya kebijakan efisiensi anggaran, sehingga sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan. Terdapat beberapa kegiatan yang diblokir untuk penggunaannya.

Grafik III.26 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-8 BBKK Makassar dengan BBKK Medan, BBKK Surabaya dan BBKK Batam Semester I Tahun 2025



Berdasarkan Grafik III.26 terlihat bahwa realisasi terbesar terdapat di BBKK Medan yaitu sebesar 40,57% disusul BBKK Surabaya, Batam, dan Makassar.

e. Analisis Keberhasilan Kegiatan

- 1) Dukungan anggaran yang tersedia baik di substansi teknis maupun dukungan manajemen untuk pelaksanaan kegiatan;
- 2) Dukungan lintas sektor dan lintas program yaitu Dinkes Prov., Kota/Kab., PT. Angkasa Pura I, Otoritas Pelabuhan, Otoritas Bandara, Kesyahbandaran, KSOP, maskapai penerbangan, agen kapal dan travel dalam pelaksanaan kekarantinaan kesehatan.
- 3) Optimalisasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan RPK dan RPD

f. Masalah yang dihadapi

Adanya kebijakan efisiensi belanja Kemneterian/Lembaga terhadap APBN, sehingga terdapat beberapa kegiatan yang diblokir penggunaan anggarannya, sehingga beberapa kegiatan berjalan tidak sesuai dengan RPK dan RPD.

g. Usul pemecahan masalah

Melakukan revisi terhadap RPK dan RPD yang telah ditetapkan menyesuaikan dengan anggaran yang bisa digunakan.

h. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja dikurang realisasi anggaran kinerja dibagi dengan perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan :

E : Efisiensi
 PAKi : Pagu anggaran kinerja
 CKi : Capaian kinerja
 RAKi : Realisasi anggaran kinerja
 NE : Nilai efisiensi

$$E = \frac{(32.790.931.000 \times 0,31) - 9.912.352.635}{32.790.931.000 \times 0,31} \times 100\%$$

$$E = 4\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{4}{20} \times 50\right)$$

$$NE = 60,01\%$$

Untuk indikator 8 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 32.790.931.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.912.352.635,- serta capaian indikator sebesar 31,49%, sehingga diperoleh efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 4%, sehingga nilai efisiensinya 60,01%.

Selain itu efisiensi penggunaan sumber daya juga dipengaruhi beberapa hal, yaitu :

- 1) Terdapat kegiatan yang dilaksanakan secara parallel, sehingga terdapat efisiensi anggaran.
- 2) Beberapa kegiatan peningkatan kapasitas dilaksanakan secara daring, tanpa membutuhkan anggaran biaya pelaksanaan dan biaya perjalanan dinas.
- 3) Terdapat sarana dan prasarana pendukung yang membantu dalam pengawasan pelaku perjalanan.
- 4) Penerapan aplikasi online dalam penerbitan dokumen kesehatan, sehingga mempersingkat waktu dan menyederhanakan alur pelayanan.

B. REALISASI ANGGARAN

1. Berdasarkan Sumber Dana

Realisasi Anggaran berdasarkan sumber dana dapat dilihat dalam tabel III.28 di bawah ini.

Tabel III.28 Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana
Balai Besar Kekearifan Kesehatan Makassar
Semester I Tahun 2025

No	Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Rupiah Murni (RM)	30.871.552.000	9.818.613.960	31,80
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	1.919.379.000	93.738.675	4,88
	Total	32.790.931.000	9.912.352.635	30,23

2. Berdasarkan Jenis Belanja

Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel III.29 di bawah ini.

Tabel III.29 Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja
Balai Besar Kekearifan Kesehatan Makassar
Semester I Tahun 2025

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Belanja Pegawai	20.229.357.000	7.969.798.720	39,40
2	Belanja Barang	12.007.042.000	1.834.403.915	15,28
3	Belanja Modal	554.532.000	108.150.000	19,50
	Total	32.790.931.000	9.912.352.635	30,23

3. Berdasarkan Kegiatan, Klasifikasi Rincian Output dan Rincian Output

Realisasi anggaran berdasarkan kegiatan, Klasifikasi Rincian Output dan Rincian Output dapat dilihat dalam tabel III.30

Tabel III.30 Realisasi Anggaran berdasarkan
Klasifikasi Rincian Output (KRO)
dan Rincian Output (RO) Kegiatan
Balai Besar Kekearifan Kesehatan Makassar Semester I Tahun 2025

KODE	URAIAN	VOL	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
BBKK Makassar				32.790.931.000	9.912.352.635	30.23%
DO	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			6,377,567,000	363,225,651	5.70%

KODE	URAIAN	VOL	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
DO.4249	Dukungan Pelayanan Kekearifan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah			6,377,567,000	363,225,651	5.70%
4249.PEA	Koordinasi[Base Line]	17	kegiatan	204,181,000	2,080,000	1.02%
4249.PEA.001	Koordinasi Pelayanan Kekearifan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah (HS)	17	kegiatan	204,181,000	2,080,000	1.02%
4249.QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat[Base Line]	37	Orang	24,770,000	-	0.00%
4249.QAA.012	Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas (HS-29)	37	Orang	24,770,000	-	0.00%
4249.QAH	Pelayanan Publik Lainnya[Base Line]	1802	layanan	3,775,018,000	171,823,600	4.55%
4249.QAH.016	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan (HS-29)	10	layanan	267,560,000	6,682,000	2.50%
4249.QAH.017	Layanan Pemeriksaan Orang, Barang, Alat Angkut	67	layanan	992,276,000	98,078,600	9.88%
4249.QAH.U01	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Pelabuhan Penyeberangan (HS-29)	240	layanan	140,400,000	9,775,000	6.96%
4249.QAH.U07	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit DBD (HS-29)	104	layanan	127,504,000	2,550,000	2.00%
4249.QAH.U08	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Pes (HS-29)	138	layanan	404,478,000	5,610,000	1.39%
4249.QAH.U09	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Diare (HS-29)	180	layanan	86,760,000	4,760,000	5.49%
4249.QAH.U11	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit DBD (HS-29)	480	layanan	172,800,000	18,785,000	10.87%
4249.QAH.U12	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Malaria (HS-29)	54	layanan	92,880,000	8,755,000	9.43%

KODE	URAIAN	VOL	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
4249.QAH.U13	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Diare (HS-29)	360	layanan	190,800,000	12,155,000	6.37%
4249.QAH.U14	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit HIV AIDS (HS-29)	35	layanan	45,990,000	124,000	0.27%
4249.QAH.U15	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit TBC (HS-29)	14	layanan	76,370,000	124,000	0.16%
4249.QAH.U20	Layanan Penemuan Aktif Surveilans Migrasi Malaria (HS-29)	60	layanan	58,200,000	425,000	0.73%
4249.QAH.U25	Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Embarkasi Kategori I (layanan)	30	layanan	585,000,000	4,000,000	0.68%
4249.QAH.U28	Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Debarkasi Kategori I (layanan)	30	layanan	534,000,000	-	0.00%
4249.RAB	Sarana Bidang Kesehatan[Base Line]	12	PAKET	2,164,719,000	185,343,376	8.56%
4249.RAB.001	Pengadaan alat dan bahan kekarantina kesehatan di pintu masuk (HS-29)	12	Paket	2,164,719,000	185,343,376	8.56%
4249.TBC	Layanan Manajemen SDM Internal[Base Line]	25	Orang	208,879,000	3,978,675	1.90%
4249.TBC.001	Pelatihan kesehatan	25	Orang	208,879,000	3,978,675	1.90%
WA	Program Dukungan Manajemen			26,413,364,000	9,549,126,984	36.15%
WA.4815	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			26,413,364,000	9,549,126,984	36.15%
4815.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	47	Layanan	25,973,087,000	9,503,574,809	36.59%
4815.EBA.956	Layanan BMN	6	Layanan	50,090,000	-	0.00%
4815.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	12	Layanan	15,950,000	-	0.00%

KODE	URAIAN	VOL	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
4815.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	4	Layanan	32,302,000	-	0.00%
4815.EBA.962	Layanan Umum	8	Layanan	104,323,000	-	0.00%
4815.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	5	Layanan	17,660,000	3,690,000	20.89%
4815.EBA.994	Layanan Perkantoran	12	Layanan	25,752,762,000	9,499,884,809	36.89%
4815.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal[Base Line]	9	Orang	39,840,000	6,512,525	16.35%
4815.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	9	Orang	25,940,000	6,512,525	25.11%
4815.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	5	Orang	13,900,000	-	0.00%
4815.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	48	Dokumen	400,437,000	39,039,650	9.75%
4815.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	13	Dokumen	158,407,000	12,707,750	8.02%
4815.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	14	Dokumen	95,650,000	26,331,900	27.53%
4815.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	14	Dokumen	104,086,000	-	0.00%
4815.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	5	Dokumen	35,382,000	-	0.00%
4815.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	2	Dokumen	6,912,000	-	0.00%

4. Berdasarkan Indikator Perjanjian Kinerja BBKK Makassar

Realisasi anggaran berdasarkan indikator Perjanjian Kinerja BBKK Makassar Semester I Tahun 2025.

Tabel III.31 Realisasi Anggaran berdasarkan Indikator Perjanjian Kinerja Balai Besar Kekearifan Kesehatan Makassar Semester I Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Meningkatnya pelayanan kekarantina di pintu masuk negara dan wilayah	1. Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	1	0.39	39.00%	1,714,661,000	16,280,000	0.95%
		2. Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan	100%	100%	100.00%	897,410,000	98,340,500	10.96%
		3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	0.96	0.88	91.67%	1,391,898,000	59,283,100	4.26%
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4. Nilai kinerja anggaran	85	56.54	66.52%	350,493,000	39,039,650	11.14%
		5. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran	90	95.72	106.36%	28,147,798,000	9,688,918,185	34.42%
		6. Kinerja implementasi WBK Satker	81	86.94	107.33%	32,302,000	0	0.00%
		7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	90%	72.99%	81.10%	248,719,000	10,491,200	4.22%
		8. Persentase Realisasi Anggaran	96%	30.23%	31.49%	32,790,931,000	9,912,352,635	30.23%

BAB IV P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian kinerja berdasarkan Target kinerja BBKK Makassar Semester I tahun 2025 yang tertulis di dalam Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Dirjen P2 dengan Kepala BBKK Makassar, dapat disimpulkan :

1. Terdapat 8 indikator dalam Perjanjian Kinerja BBKK Makassar tahun 2025, meliputi :
 - a. Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN dengan target 1 realisasi 0,39 dengan nilai capaian 39%;
 - b. Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan dengan target 100% realisasi 100% dengan nilai capaian 100%;
 - c. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN dengan target 0,96 realisasi 0,88 dengan nilai capaian 91,67%;
 - d. Nilai kinerja anggaran dengan target 85 realisasi 56,54 dengan nilai capaian 66,52%;
 - e. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran dengan target 90 realisasi 95,72 dengan nilai capaian 106,36%;
 - f. Kinerja implementasi WBK Satker dengan target 81 realisasi 86,94 dengan nilai capaian 107,33%;
 - g. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya dengan target 90% realisasi 72,99% dengan nilai capaian 81,10%, dan;
 - h. Persentase realisasi anggaran dengan target 96% realisasi 30,23% dengan nilai capaian 31,49%.

Secara keseluruhan indikator mencapai target yang telah ditetapkan, dengan nilai rata-rata capaian sebesar 77,93%.
2. Selama kurun waktu 2022, 2023, 2024 dan Semester I Tahun 2025 BBKK Makassar memperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar :
 - a. Tahun 2022 dengan rata-rata capaian sebesar 101,69%;
 - b. Tahun 2023 dengan rata-rata capaian sebesar 104,19%.

- c. Tahun 2024 dengan rata-rata capaian sebesar 107,08%.
 - d. Semester I Tahun 2025 dengan rata-rata capaian sebesar 77,93%
Rata-rata capaian kinerja tahunan paling rendah di tahun 2022 sebesar 101,69% dan tertinggi di Tahun 2024 sebesar 107,08%. Untuk tahun 2025 capaian masih beproses semester berikutnya.
3. Perbandingan rata-rata capaian kinerja Semester I tahun 2025 dengan BKK dengan klasifikasi yang sama yaitu BBKK Medan, BBKK Surabaya dan BBKK Batam sebesar :
- a. BBKK Makassar sebesar 77,93%;
 - b. BBKK Medan sebesar 81,18%;
 - c. BBKK Surabaya sebesar 79,07%;
 - d. BBKK Batam sebesar 68,51%.
- Rata-rata capaian kinerja paling rendah berada di BBKK Batam dan yang paling tinggi adalah capaian kinerja BBKK Medan.
4. Peran sumber daya dalam mewujudkan realisasi kinerja sangatlah penting, dalam menganalisis efisiensi sumber daya diperoleh efisiensi untuk setiap indikator yaitu :
- a. indikator 1 sebesar 97,57%;
 - b. indikator 2 sebesar 89,04%;
 - c. indikator 3 sebesar 95,35%;
 - d. indikator 4 sebesar 83,26%;
 - e. indikator 5 sebesar 67,64%;
 - f. indikator 6 sebesar 100%;
 - g. indikator 7 sebesar 94,80%;
 - h. indicator 8 sebesar 4%.
- Efisiensi sumber daya terbesar terdapat pada indikator 6 sebesar 100% hal ini dipengaruhi oleh realisasi anggaran yang lebih kecil dari anggaran yang disediakan, karena untuk kinerja implementasi WBK satker menggunakan nilai assement di tahun 2024.
5. Anggaran yang digunakan dalam pencapaian indikator BBKK Makassar untuk Semester I tahun 2025 sebesar Rp. 9.912.352.635,- dari pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp. 32.790.931.000,-, sehingga realisasi menjadi 30,23% dengan capaian 31,49% karena target untuk tahun 2025 sebesar 96%.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk meningkatkan capaian kinerja BBKK Makassar di Semester berikutnya, terdapat rencana tindak lanjut yang dapat dilaksanakan :

1. Melakukan penyesuaian rencana pelaksanaan kegiatan untuk indikator indeks deteksi factor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN, masing-masing parameter yaitu pengawasan orang, alat angkut, barang, dan lingkungan.
2. Melakukan evaluasi terhadap lokus TTU yang TMS agar dapat memenuhi syarat pada pemantauan di bulan berikutnya, serta melakukan evaluasi terhadap lokus kualitas air bersih agar dapat memenuhi syarat pada pemantauan di bulan berikutnya.
3. Mengoptimalkan pelaksanaan anggaran dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi serta melakukan pemantauan terhadap update dari dashboard aplikasi SAKTI dan SMART Kemenkeu agar dapat diperoleh Nilai Kinerja Anggaran yang maksimal dan baik.
4. Peningkatan kompetensi terhadap 37 orang ASN untuk mencapai nilai minimal 20 JPL melalui pendidikan dan pelatihan baik secara daring dan luring.

PUSTAKA ACUAN

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan

Peraturan MENPAN-RB RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantaraan Kesehatan

Rencana Strategis (Renstra) Kemenkes Tahun 2020-2024

Rencana Aksi Program (RAP) Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2020-2024

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) BBKK Makassar Tahun 2020-2024, BBKK Makassar Revisi ke-5 Maret 2024

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BBKK Makassar tahun anggaran 2024

Daftar Urut Kepangkatan (DUK) BBKK Makassar, Juni tahun 2024

Laporan Kinerja KKP Kelas I Makassar, KKP Kelas I Makassar tahun 2023

Laporan Keuangan BBKK Makassar Semester I tahun 2024

PENYUSUN

Pengarah : Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan
Makassar
Penanggung Jawab : Kasubag Adum
Ketua : Arni Angriany Amir, ST
Anggota : Mardiyana, SKM, M.Adm.Kes
Andi Kudrat, SKM
Nining Ayu Purnama, S.Kom
Arfiani, SKM
Amriana Amin, SE
Saydaturrizky, AMd.Ak

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DITJEN Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Jamaludin, SKM, M.Kes
Jabatan : Kepala Balai Besar Kekejarantinahan Kesehatan Makassar
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : dr. Yudhi Pramono, MARS
Jabatan : Ptl. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

dr. Yudhi Pramono, MARS
NIP 197603192006041001

Jakarta, 27 Desember 2024

Pihak Pertama


Agus Jamaludin, SKM, M.Kes
NIP 196908221993031005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR**

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK 2025
1	2	3	4
A Sasaran Strategis (08)			
	Menguatnya Surveilans yang Adekuat	Persentase Kabupaten/Kota yang Melakukan Respon KLB/Wabah (PE, Pemeriksaan Laboratorium, Tata Laksana Kasus)	80 Person
I Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			
	Meningkatnya Kemampuan Surveilans Berbasis Laboratorium	Persentase Kabupaten/Kota yang Melakukan Deteksi dan Respon Potensi KLB/Wabah serta Pengendalian Faktor Resiko Kesehatan yang Berpotensi KLB/Wabah	40 Person
1 Kegiatan : Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah			
	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	1,00 Indeks
		Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan	100 Person
		Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	0,96 Indeks
B Sasaran Strategis (17)			
	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Capaian Tata Kelola Kemenkes yang Baik	90 Indeks
I Program Dukungan Manajemen			
	Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan dan Pemberian Dukungan Manajemen Kementerian Kesehatan	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	95 Nilai
		Nilai Reformasi Birokrasi	98 Nilai
		Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	96 Person
1 Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			
	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Nilai Kinerja Anggaran	85 Nilai
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90 Nilai
		Kinerja Implementasi WBK Satker	81 Nilai
		Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	90 Person
		Persentase Realisasi Anggaran	96 Person
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti	95 Person

No	Program	Kegiatan	Anggaran
1	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	6.377.567.000,00
2	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	26.413.364.000,00
TOTAL			32.790.931.000,00

Jakarta, 27 Desember 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama


 dr. Yuzhi Pramono, MARS
 NIP 197603192006041001


 Agus Jamaludin, SKM, M.Kes
 NIP 196908221993031005

SK Tim Pengelola SAKIP



Kementerian Kesehatan
BBKK Makassar

📍 Jalan Bendera Sultan Hasanuddin Makassar, Maros
Sulawesi Selatan 90552
☎ (0411) 4834926
🌐 <https://bbkkmakassar.com>

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR
NOMOR : HK.02.03/C.IX.3/3869/2024

TENTANG

TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR

- Menimbang:
- bahwa dalam upaya peningkatan tugas dan fungsi pada Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Makassar;
 - bahwa untuk tercapainya point 1 tersebut di atas, salah satunya melalui peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Makassar tentang Tim Pengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Makassar;
- Mengingat:
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeantinaan Kesehatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR



- KESATU : Menunjuk nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- KEDUA : Tim Pengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar Kejarantinaan Kesehatan Makassar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Kejarantinaan Kesehatan Makassar;
- KETIGA : Tugas Tim Pengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar Kejarantinaan Kesehatan Makassar adalah :
- a. Melakukan koordinasi untuk penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. Menyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah meliputi perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu atas laporan kinerja;
 - c. Melakukan inventarisasi data dukung yang diperlukan dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Balai Besar Kejarantinaan Kesehatan Makassar.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada tanggal : 27 Agustus 2024

Kepala Balai Besar Kejarantinaan Kesehatan
Makassar,



Agus Jamaludin

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500667 dan <https://halo.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tds.kemkes.go.id/verify/OT>. Atau laporkan ke layanan pengaduan BBKK Makassar, Email bbkmakassar@yahoo.co.id, Telp (0411) 4834926, 4834215, WA 085256044860

Lampiran :
Keputusan Kepala Balai Besar Kekeantinaan
Kesehatan Makassar Tentang Tim Pengelola
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Makassar
Nomor : HK.02.03/C.IX.3/3869/2024
Tanggal : 27 Agustus 2024

**TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR**

Pengarah : Kepala Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Makassar
Penanggung Jawab : Kepala Sub Bagian Administrasi Umum
Ketua : Arni Angriany Amir, ST
Sekretaris : Nining Ayu Purnama, S.Kom
Anggota : Mardiyana, SKM, M.Adm.Kes
Andi Kudrat, SKM
Arfiani, SKM
Amriana Amin, SE
Saydaturrizky, AMd.Ak

Kepala Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan
Makassar,



Agus Jamaludin, SKM, M.Kes
NIP 196908221993031005

SOP Pengumpulan Data Kinerja

<p>KEMENTERIAN KESEHATAN RI DITJEN P2P</p>  <p>BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR</p>	NOMOR SOP	: OT.02.02/1.2/0403/2023
	TGL. PEMBUATAN	: 14 November 2018
	REVISI	: Ke-3
	TANGGAL EFEKTIF	: 21 Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	 <p>Agus Jamaludin, SKM, M.Kes NIT. 198908221993031005</p>
SUB BAGIAN PROGRAM DAN LAPORAN	NAMA SOP	PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
<ol style="list-style-type: none"> IHR Tahun 2005 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan 	<ol style="list-style-type: none"> Umum, minimal SLTA sederajat Memahami Tata Administrasi Arsip 	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN	
<ol style="list-style-type: none"> SOP Pengukuran Kinerja SOP Pengarsipan Dokumen 	<ol style="list-style-type: none"> Alat Tulis Kantor Jaringan Internet Printer Komputer 	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	<ol style="list-style-type: none"> Buku Penomoran Surat; Lembar Disposisi, dll 	

PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		KEPALA BALAI	KASUBAG ADUM	KETUA TIM KERJA	PERENCANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Memerintahkan pengumpulan data kinerja					SK Tim Penyusun Lakip, Surat dan Disposisi	1 hari	Disposisi	
2	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi kinerja dari masing-masing Timker dan Subag Adum						1 hari	Format Pengumpulan Data dan informasi Kinerja	
3	Mengisi form kinerja masing-masing Timker dan Subag Adum					Format Pengumpulan Data dan informasi Kinerja	3 hari	Format Pengumpulan Data dan informasi dari Timker dan Subag Adum	
4	Menghimpun format data dan informasi kinerja dari masing-masing Timker dan Subag Adum					Format Pengumpulan Data dan informasi dari Timker dan Subag Adum	1 hari	Hasil Kompilasi Pengumpulan Data dan Informasi dari Timker dan Subag Adum	
5	Memverifikasi semua data kinerja untuk bahan final laporan kinerja bulanan					Hasil Kompilasi Pengumpulan Data dan Informasi dari Timker dan Subag Adum diverifikasi	3 hari	Kertas Kerja Pengumpulan Data dan Informasi Hasil Pengukuran Kinerja yang telah diverifikasi	
6	Melaporkan hasil verifikasi data kinerja ke Kasubag Adum					Kertas Kerja Pengumpulan Data dan Informasi Hasil Pengukuran Kinerja yang telah diverifikasi	30 menit	Data Kinerja	
7	Melakukan input data kinerja ke dalam format rekapitulasi bulanan					File format data kinerja laporan bulanan	1 hari	Arsip file format data kinerja laporan bulanan	
8	Menyimpan data kinerja bulanan						30 menit		

SOP Pengukuran Kinerja

 KEMENTERIAN KESEHATAN RI DITJEN P2P BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR	NOMOR SOP	: OT.02.02/1.2/0404/2023
	TGL. PEMBUATAN	: 12 November 2018
	REVISI	: Ke-3
	TANGGAL EFEKTIF	: 21 Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	 Agus Jamaludin, SKM, M.Kes NIP. 196908221993031005
SUB BAGIAN PROGRAM DAN LAPORAN	NAMA SOP	PROSEDUR PENGUKURAN KINERJA
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1. IHR Tahun 2005 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 3. Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeantinaan Kesehatan	1. Umum, minimal SLTA sederajat 2. Memahami Tata Administrasi Arsip	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN	
1. SOP Pengumpulan Data Kinerja 2. SOP Pengarsipan Dokumen	1. Alat Tulis Kantor 2. Jaringan Internet 3. Printer 4. Komputer	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	1. Buku Penomoran Surat; 2. Lembar Disposisi, dll	

PROSEDUR PENGUKURAN KINERJA

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			PERENCANA	MUTU BAKU			KETERANGAN
		KEPALA BALAI	KASUBAG ADUM	TIM PENYUSUN LKj		KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Memerintahkan penyusunan pengukuran kinerja					SK Tim Penyusun LKj, Surat dan Format	1 hari	Disposisi	
2	Mengolah data dan menganalisa data kinerja dari pengumpulan data kinerja ke dalam kertas kerja perhitungan kinerja					Disposisi dan data kinerja	1 hari	Format Kertas Kerja Perhitungan Kinerja	
3	Memeriksa dan melakukan koreksi hasil perhitungan kinerja					Format Kertas Kerja Perhitungan Kinerja	3 hari	Hasil Koreksi Format Kertas Kerja Perhitungan Kinerja	
4	Melakukan pengesahan atas kertas kerja perhitungan kinerja yang telah valid					Hasil Koreksi Format Kertas Kerja Perhitungan Kinerja	1 hari	Kertas Kerja Perhitungan Kinerja yang sudah disahkan	
5	Menyusun hasil perhitungan kinerja ke dalam format laporan kinerja					Kertas Kerja Perhitungan Kinerja yang sudah Format laporan kinerja	1 hari	Format laporan kinerja	
6	Memeriksa dan melakukan koreksi atas draft laporan kinerja					Draft Laporan Kinerja	2 hari	Draft Laporan Kinerja	
7	Mengesahkan draft laporan kinerja yang telah valid					Draft Laporan Kinerja yang sudah disahkan	30 menit	Laporan Kinerja yang sudah di ttd oleh Kepala Balai	
8	Penandatanganan Laporan kinerja oleh Kepala Balai					Laporan Kinerja yang sudah di ttd oleh Kepala Balai	30 menit	Laporan Kinerja yang sudah di ttd oleh Kepala Balai terkirim ke Eselon 1 dan diarsipkan oleh Arsiparis	SOP Pengukuran Kinerja
9	Penggandaan laporan kinerja dan pengiriman ke Eselon 1 via email atau Jasa Kirim								